



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD)  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005-2025**



**PULAU PUNJUNG, 2012**



## **BUPATI DHARMASRAYA**

### **RANCANGAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR      TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya (RPJPD) Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

22. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**DHARMASRAYA**

**dan**  
**BUPATI DHARMASRAYA**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA**  
**:** **PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 – 2025**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Nagari.
6. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat dan Daerah), Masyarakat, dan Dunia Usaha.

9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui serangkaian pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada.
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD atau Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu ) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Arah kebijakan pembangunan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP RPJPD TAHUN 2005 – 2025**

#### **Pasal 2**

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

#### **Pasal 3**

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Sistematika RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis

Bab IV : Visi dan Misi Daerah

Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab VI : Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan

Bab VII : Kaidah Pelaksanaan

### **Pasal 5**

- (1) RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tahunan daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam rencana tahunan RKPD.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah yang dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Ketentuan pelaksanaan mengenai RPJPD Kabupaten Dharmasraya yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal  
2013

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**H. ADI GUNAWAN**

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

**Ir. H. BENNY MUKHTAR,MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 19560815 198610 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013 NOMOR**

...

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**NOMOR   TAHUN 2013**  
**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 – 2025**

**I. UMUM**

RPJPD Kabupaten Dharmasraya adalah dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, yang menerjemahkan cita-cita dan aspirasi pembangunan daerah kedalam rumusan visi, misi dan arah pembangunan sebagai dasar membangun komitmen dan pengambilan kebijakan dalam setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

Setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah tersebut dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang selanjutnya dijabarkan kedalam Renstra-SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja-SKPD.

Jangka waktu RPJPD mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Akan tetapi, periode RPJMD tidak harus mengikuti periode RPJPN karena pemilihan presiden dan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2005 – 2025 terdiri dari 5 Bab dan 8 Pasal.

## **II.PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya mengacu kepada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat agar terwujud sinkronisasi rencana pembangunan daerah kabupaten berdasarkan kewenangan otonomi daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional.

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR**

...

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan. Penyusunan RPJPD dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi seluruh stakeholder (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) agar pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya dapat terarah, berkesinambungan serta memiliki arah dan tahapan yang jelas. Sehingga harapan visi daerah menjadi “Kabupaten Dharmasraya Maju dan Berbudaya” di tahun 2025 dapat diwujudkan.

Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam merumuskan dokumen RPJPD, akhir kata saya berharap agar seluruh stakeholder dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan sesuai dengan perannya masing-masing.

BU



---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
1.5 Maksud dan Tujuan .....	7
<b>BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	8
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	18
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	39
2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	58
<b>BAB 3 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1 Permasalahan Pembangunan.....	64
3.2 Isu-Isu Strategis .....	91
<b>BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH</b>	
4.1 Visi .....	98
4.2 Misi .....	99
<b>BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH</b>	
5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan .....	101
5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan .....	112
<b>BAB 6 INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	
6.1 Integrasi RPJP Tahun 2005-2025 dengan RTRW Tahun 2011-2031 .....	129
6.2 Arah Kebijakan Dalam RPJPD Yang Terkait Dengan Pemerataan Pembangunan ....	138
<b>BAB 7 KAIDAH PELAKSANAAN .....</b>	<b>140</b>

---

## DAFTAR TABEL

1. Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya .....	9
2. Kelerengan Lahan di Kabupaten Dharmasraya .....	11
3. Status Penggunaan Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	14
4. Komposisi Penduduk Dharmasraya Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010 .....	15
5. Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Dharmasraya .....	18
6. PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) 2007 – 2011.....	20
7. Basis Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Indeks Location Quotion (LQ) .....	20
8. Kontribusi Sektor-Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2007-2011 .....	21
9. Lima Komoditi Unggulan Kabupaten Dharmasraya.....	22
10. Tingkat Inflasi.....	23
11. Banyaknya Uang Beredar .....	24
12. Transfer Dana Masuk dan Keluar Melalui Jasa Bank.....	24
13. Perbandingan Pendapatan Perkapita Kabupaten Dharmasraya dengan Propinsi Sumatera Barat.....	25
14. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin .....	26
15. Gini Rasio Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2011.....	26
16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008-2010 .....	27
17. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2008-2010 .....	28
18. Distribusi Jumlah dan Proporsi Penduduk Dharmasraya Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 .....	31
19. Indikator Angka Partisipasi Kasar Tahun 2005 - 2011 .....	31
20. Perkembangan APM Tahun 2007-2011.....	31
21. Perbandingan APM antar kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011.....	32
22. Penduduk Usia 15-44 Tahun yang Melek Huruf Tahun 2010.....	32
23. Angka Buta Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 .....	33
24. Rasio Murid Per Guru di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 .....	34
25. Rasio Kelas Per Guru di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 .....	35
26. Rasio Guru Per Sekolah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011.....	35
27. Angka Kematian Bayi Kabupaten Dharmasraya Per 1000 KH .....	36
28. Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 .....	37
29. Angka Kematian Ibu Kabupaten Dharmasraya Per 100.000 KH.....	37
30. Angka Kelahiran Kabupaten Dharmasraya per Puskesmas Tahun 2011 .....	38
31. Angka Kematian di Kabupaten Dharmasraya per Puskesmas Tahun 2011 .....	39
32. Jumlah Penderita Gizi Buruk per Puskesmas Tahun 2011.....	39
33. Status Gizi Balita Menurut Jenis kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten/Kota Dharmasraya Tahun 2011 .....	39
34. Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Dharmasraya Tahun 2011 .....	40
35. Capaian Program Dinas Kesehatan Tahun 2005-2010 .....	40
36. Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya .....	41

---

37. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011.....	42
38. Distribusi Tenaga Medis, Keperawatan dan Bidan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011.....	43
39. Tipe pengairan di Kabupaten Dharmasraya.....	46
40. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dharmasraya.....	48
41. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya.....	53
42. Kawasan Alokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Sumberdaya Pertambangan Lainnya diluar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Dharmasraya Per Kecamatan.....	55
43. Pasar Menurut Lokasi dan Jumlah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011.....	51
44. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya.....	59
45. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Di Sumatera Barat.....	59
46. Pengeluaran Rata-rata pekapita Perbulan Menurut Kelompok Barang.....	60
47. Banyaknya Peristiwa Kamtibmas dan Pelanggaran.....	60
48. Wilayah Potensi Pengembangan Komoditi Kelapa Sawit dan Karet Di Sumatera Barat.....	61
49. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten dengan Isu Nasional dan Provinsi.....	93
50. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya.....	98
51. Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025.....	106
52. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya.....	113
53. Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJP Untuk Mewujudkan Rencana Pusat Kegiatan Perkotaan dalam RTRW.....	128
54. Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RPJP untuk Mewujudkan Rencana Peruntukan Ruang Dalam RTRW.....	130
55. Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RPJP untuk Mewujudkan Rencana Kawasan Strategis Dalam RTRW.....	132
56. Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RPJP untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan.....	136

---

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Perencanaan Pembangunan.....	2
2. Hubungan Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang.....	6
3. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Dharmasraya Dengan Dokumen Terkait Lainnya.....	6
4. Posisi Kabupaten Dharmasraya dalam Lingkup Wilayah.....	9
5. Wilayah Administrasi Kabupaten Dharmasraya .....	10
6. Topografi Kabupaten Dharmasraya.....	12
7. Status Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	14
8. Piramida Penduduk Dharmasraya Hasil SP Tahun 2010.....	17
9. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB.....	19
10. Kontribusi Sektoral Tahun 2011 .....	22
11. Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Pertanian Tahun 2011 .....	22
12. Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya .....	40
13. Sebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya .....	41
14. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 .....	47
15. Kawasan Perkebunan Besar di Kabupaten Dharmasraya.....	50
16. Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Dharmasraya .....	52
17. Peta Area Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Dharmasraya .....	54
18. Sebaran Pasar di Kabupaten Dharmasraya .....	56
19. Lahan Terpakai Kelapa Sawit .....	60
20. Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan, dan Pengembangan Modal Daerah ( <i>Assets-Based Development</i> ).....	64
21. Peta Rencana Jaringan Transportasi Kabupaten Dharmasraya.....	85
22. Tema/Agenda Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya 2005-2025.....	112
23. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Dharmasraya .....	129
24. Rencana Pola Ruang Kabupaten Dharmasraya .....	133
25. Rencana Kawasan strategis Kabupaten Dharmasraya .....	136

# BAB 1

## PENDAHULUAN

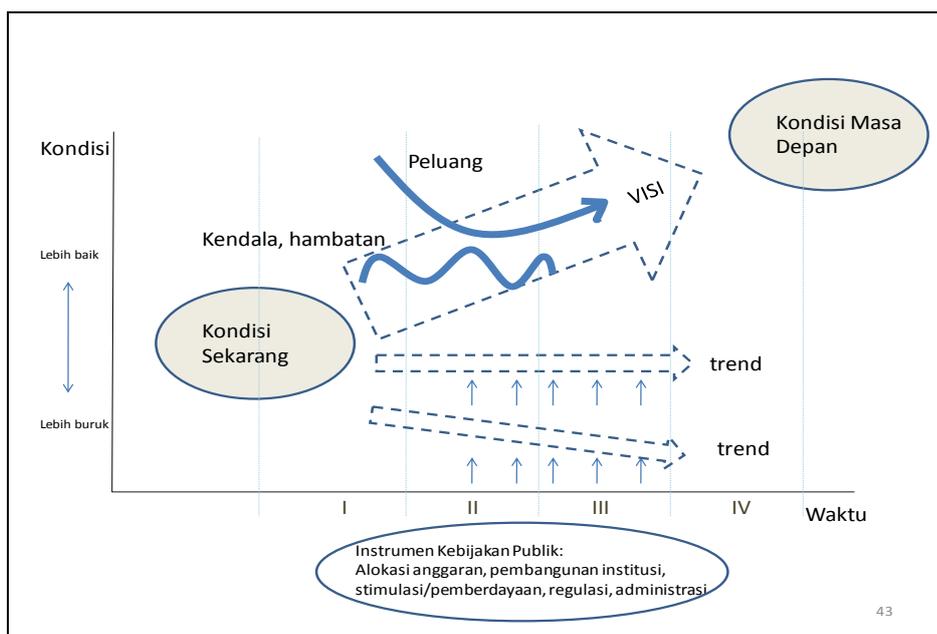
### 1.1. Latar Belakang



Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah ini bersifat makro yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang.

Perencanaan Pembangunan adalah upaya mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan visi pembangunan yang ditetapkan dengan memanfaatkan berbagai peluang dan mengatasi berbagai kendala/hambatan pembangunan. Upaya tersebut berupa pengerahan berbagai instrumen pembangunan seperti pengalokasian anggaran pembangunan, pembangunan institusi, stimulasi/ pemberdayaan masyarakat, penguatan aspek regulasi, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan berbagai upaya pembangunan tersebut, kecenderungan (*trend*) ekonomi, fisik, sosial, budaya, administrasi pemerintahan dan kelembagaan pembangunan yang tidak selaras dengan visi pembangunan perlu diubah arahnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.

**Gambar 1: Kerangka Perencanaan Pembangunan**



Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yaitu :

1. RPJP Daerah Kabupaten mengacu pada RPJP Provinsi dan Nasional;
2. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah;

Dalam upaya merumuskan visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, maka penyusunan RPJP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 dilaksanakan melalui tata cara dan proses sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan RPJPD Kabupaten guna memperoleh gambaran awal visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
2. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dilaksanakan guna memperoleh masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.
3. Seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJPD hingga menjadi Rancangan Akhir RPJPD;
4. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum; dan
5. Rancangan Akhir RPJPD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah guna diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025.

---

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

- 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  21. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
  22. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 05);
  23. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 4);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);

- 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 32);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49).

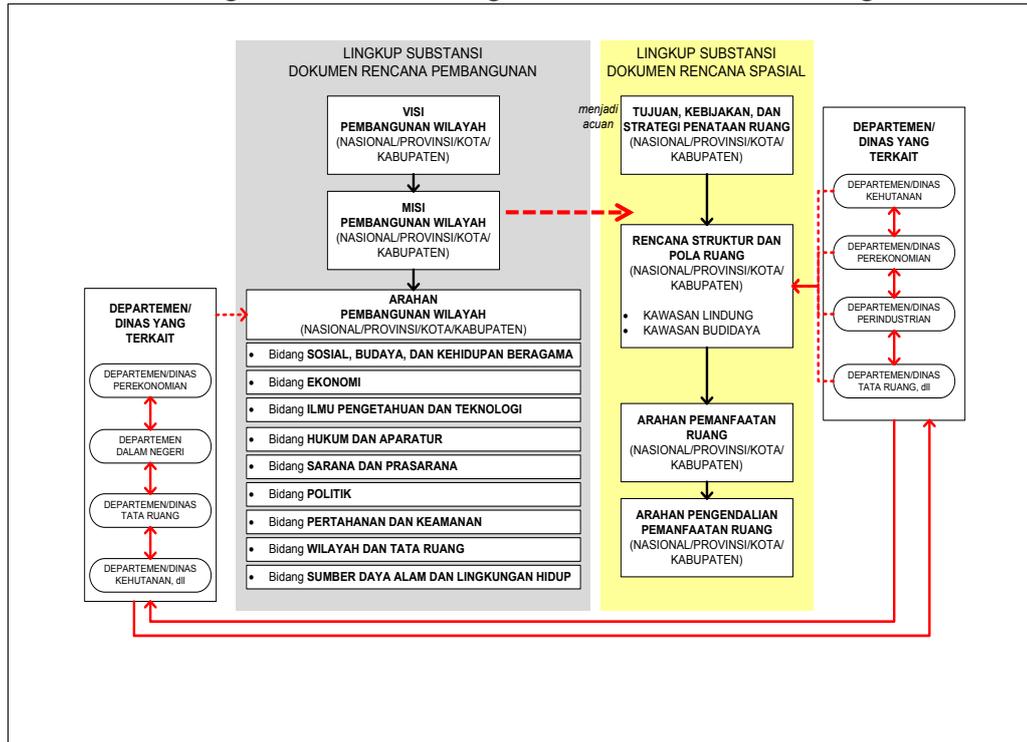
### **1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat serta memperhatikan dokumen RPJPD Kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, munculnya dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) menjadi suatu *blueprint* penting yang juga mesti menjadi perhatian daerah dalam perwujudan pencapaian target RPJP Nasional yang menjadi satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

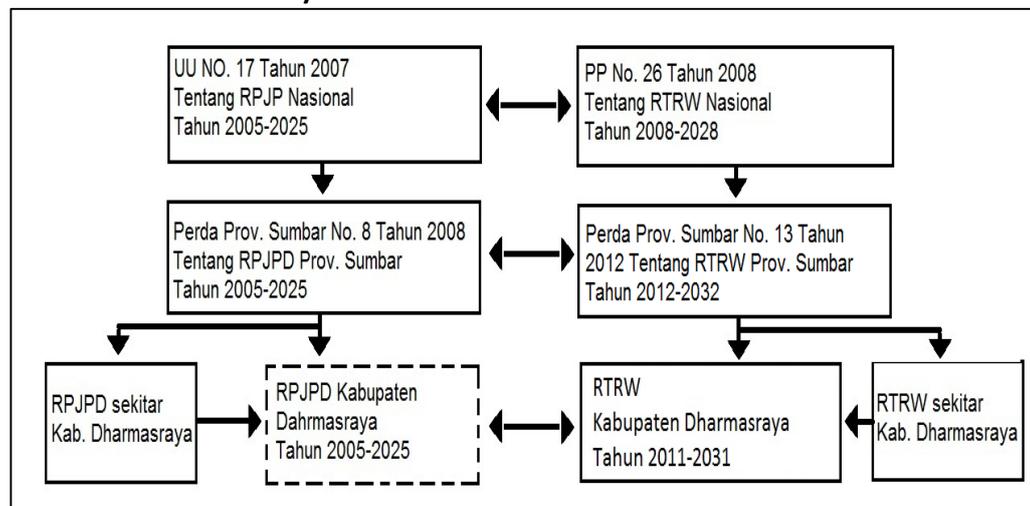
Selain mengacu pada dokumen RPJP Nasional maupun RPJPD Provinsi Sumatera Barat, Proses penyusunan RPJPD kabupaten Dharmasraya juga memperhatikan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 serta RPJPD dan RTRW daerah sekitar.

RPJPD merupakan rencana pembangunan yang bersifat makro sektoral dan RTRW mengintegrasikan dan mengalokasikan kegiatan pembangunan tersebut ke dalam aspek fisik ruang dalam rencana struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, arahan/indikasi program pembangunan, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua dokumen rencana pembangunan berjangka panjang daerah tersebut perlu terintegrasi dan tersinkronisasi.

**Gambar 2: Hubungan Rencana Pembangunan Dan Rencana Tata Ruang**



**Gambar 3: Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Dharmasraya Dengan Dokumen Terkait Lainnya**



**1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

---

<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.3. Aspek Pelayanan Umum
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</b>
	3.1. Permasalahan Pembangunan
	3.2. Isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>VISI DAN MISI DAERAH</b>
	4.1. Visi
	4.2. Misi
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH</b>
	5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi
	5.2. Tahapan dan Prioritas
<b>BAB VI</b>	<b>INTEGRASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN</b>
	6.1. Integrasi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RTRW Tahun 2011-2031
	6.2. Arah Kebijakan Dalam RPJP Yang Terkait Dengan Pemerataan Pembangunan
<b>BAB VII</b>	<b>KAIDAH PELAKSANAAN</b>

## 1.5. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 dimaksudkan sebagai pedoman daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, rencana tahunan, dan investasi agar kebijakan dan program perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergis sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025 adalah menyediakan pedoman kebijakan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun untuk menyelaraskan dan membangun komitmen para pemangku kepentingan pembangunan di kabupaten agar sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyusunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya secara rinci:

- Memberi gambaran masa depan dari cita-cita/harapan bersama dalam jangka panjang 20 tahun.
- Merumuskan isu-isu jangka panjang yang perlu ditangani dan diantisipasi dalam jangka menengah.
- Merumuskan perubahan menuju visi masa depan yang perlu disiapkan langkah-langkahnya dalam arah kebijakan pembangunan.
- Menjadi pedoman penyusunan kebijakan dan program pembangunan jangka menengah (dengan memperhatikan visi, misi, dan kebijakan jangka panjang).

---

# BAB 2

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

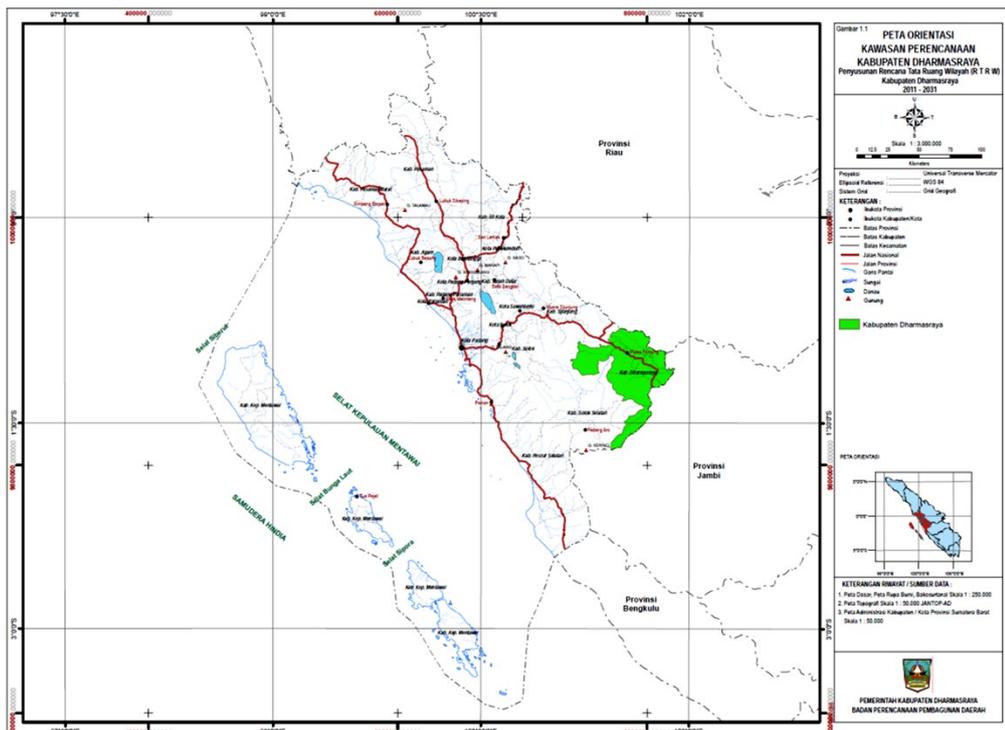
#### a. Karakteristik lokasi dan wilayah

##### 1) Luas dan batas wilayah administrasi



Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu 2.961,13 Km<sup>2</sup> (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi peta citra dalam penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 11 Kecamatan. Dengan dihapusnya sistem pemerintahan desa, pemerintah yang berada setingkat dibawah kecamatan adalah nagari, dan selanjutnya dibawah nagari adalah jorong. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari terdapat sebanyak 48 nagari. Pada Tahun 2009 dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan, dari 48 nagari menjadi 52 nagari dan dengan 260 jorong.

Gambar 4 : Posisi Kabupaten Dharmasraya dalam Lingkup Wilayah



Tabel 1 : Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari		Jorong	
			sebelum 2008	Setelah 2008	sebelum 2008	Setelah 2008
1	Sungai Rumbai	5.106	6	4	26	24
2	Asam Jujuhan*	48.541	-	5	-	22
3	Koto Besar*	56.057	-	7	-	32
4	Koto Baru	22.120	7	4	38	26
5	Koto Salak**	12.145	-	5	-	27
6	Padang Laweh**	6.062	-	4	-	17
7	Tiumang**	13.443	-	4	-	17
8	Sitiung	12.457	3	4	20	22
9	Timpeh***	32.301	-	5	-	21
10	Pulau Punjung	44.316	5	6	25	31
11	IX Koto****	50.050	-	4	-	21
<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>302.599</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>109</b>	<b>260</b>

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009

Ket : \* : Pemekaran dari Kecamatan Sungai Rumbai  
 \*\* : Pemekaran dari Kecamatan Koto Baru  
 \*\*\* : Pemekaran dari Kecamatan Sitiung  
 \*\*\*\* : Pemekaran dari Kecamatan Pulau Punjung



bergelombang; perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang sampai sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam dan perbukitan karst paralel tertoreh; (d) sistem pergunungan yang merupakan pergunungan sangat tertoreh; dan (e) sistem volkan yang terdiri dari: lereng atas volkan dengan topografi sangat curam; lereng tengah volkan dengan topografi curam; lereng bawah volkan dengan topografi agak curam; dan dataran volkan bergelombang dengan topografi landai.

### 3) Topografi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan bervariasi dari datar-landai (54,29%), agak curam-curam (34,29%) sampai sangat curam (11,42%) seperti terlihat pada tabel.

**Tabel 2: Kelerengan Lahan di Kabupaten Dharmasraya**

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23.155	7,65
Agak Landai	3-8	68.786	22,73
Landai	8-15	72.339	23,91
Agak Curam	15-25	74.730	24,70
Curam	25-40	29.023	9,59
Sangat Curam	40-60	34.567	11,42
Jumlah	Luas	302.599	100,00

Sumber : Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar Tahun 2007

### 4) Geologi

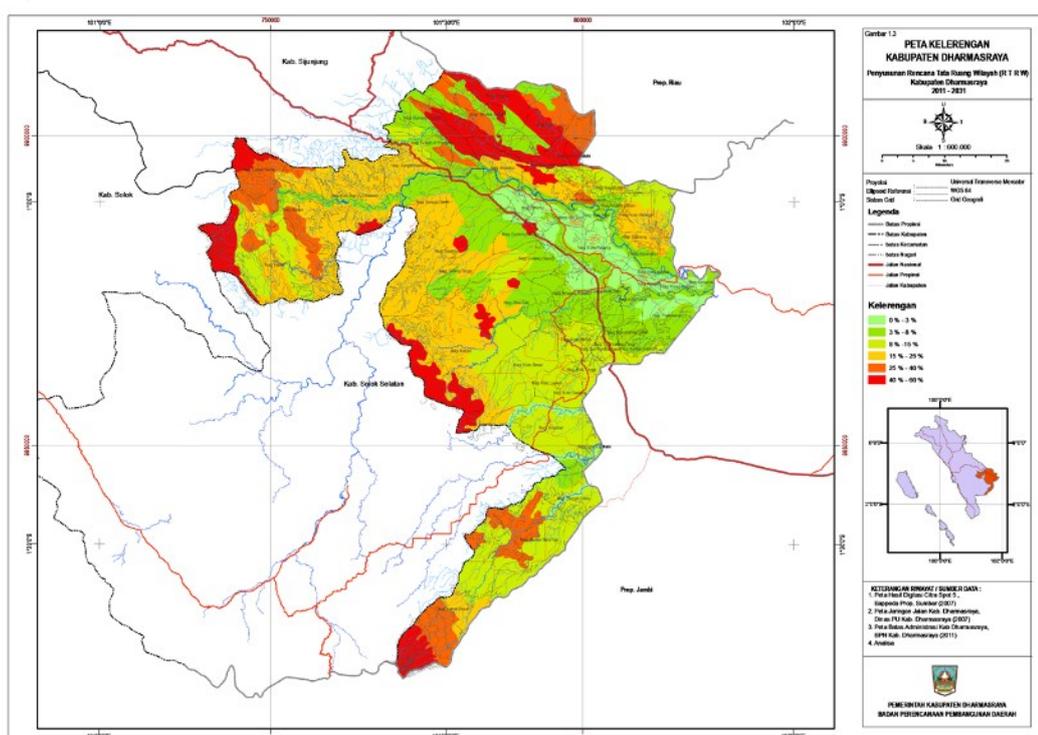
Formasi batuan di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari : Aluvium; Batuan Intrusi; Formasi Barisan; Formasi Kuantan; Formasi Rantauikil; Batuan Gunung Api; Batuan Metamorf; Formasi Kasai; Formasi Palepat; dan Formasi Sangkarewang.

Variasi batuan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari beberapa satuan batuan dari tua ke muda, terurai sebagai berikut :

- a) Batuan Lava tua dan muda yang menutupi 45% daerah Dharmasraya, berumur kwarter.
- b) Batuan Gunung Api muda yang terdiri dari breksi pasir, lahar dan tufa dengan kelulusan yang sangat beragam, menutupi 33%, berumur Pleistocen.
- c) Batuan Sedimen dan Aluvial (undak-undak) yang terdiri dari kerikil, kerakal serta pasir, menutupi 20% daerah Dharmasraya.
- d) Batuan Beku Granit dan Granodiorit berupa teobosan/intrusi yang berumur sekarang, menutupi 5-7% daerah Dharmasraya.

Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi/kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat didaerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana strukur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.

**Gambar 6 : Topografi Kabupaten Dharmasraya**



## 5) Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu dan tengah yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Saat ini Sungai Batanghari masih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pasar hasil bumi dari wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya dijual oleh para pedagang di Kota Jambi dan Kuala Tungkal. Selain Sungai di Kabupaten Dharmasraya juga terdapat beberapa embung yang dijadikan sumber air.

## 6) Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 21°C hingga 33°C, dengan tingkat kelembaban antara 70 - 80%.

## 7) Penggunaan lahan

Berdasarkan peta citra satelit SPOT 5, di Kabupaten Dharmasraya terdapat lahan pertanian yang teridentifikasi jelas, hutan dengan vegetasi primer, hutan yang bercampur dengan kebun rakyat, dan hutan tanaman.

(a) Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya yang teridentifikasi jelas seluas 99.314 Ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.647 Ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 9.652 Ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tadah hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 Ha (1,34%).

(b) Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7.290 Ha (2,42%) dan hutan dengan vegetasi sekunder yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6.115 Ha.

(c) Kawasan potensi pertambangan dan Bahan Galian

Selain sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan potensi lain yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah pertambangan. Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari batu bara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil, mangan, dan suseki.

Berdasarkan status penguasaan lahan, luas dan proporsi lahan yaitu: kawasan hutan seluas 87.174 Ha (28,91%); perkebunan seluas 75.840 Ha (25,15%); kawasan pertambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan serta izin lainnya diluar WIUP (operasi produksi dan eksplorasi) seluas 23.305 Ha (7,73%); lahan masyarakat seluas 113.934 Ha (37,78%); selain itu dicadangkan lahan untuk transmigrasi seluas lebih kurang 1.300 Ha.

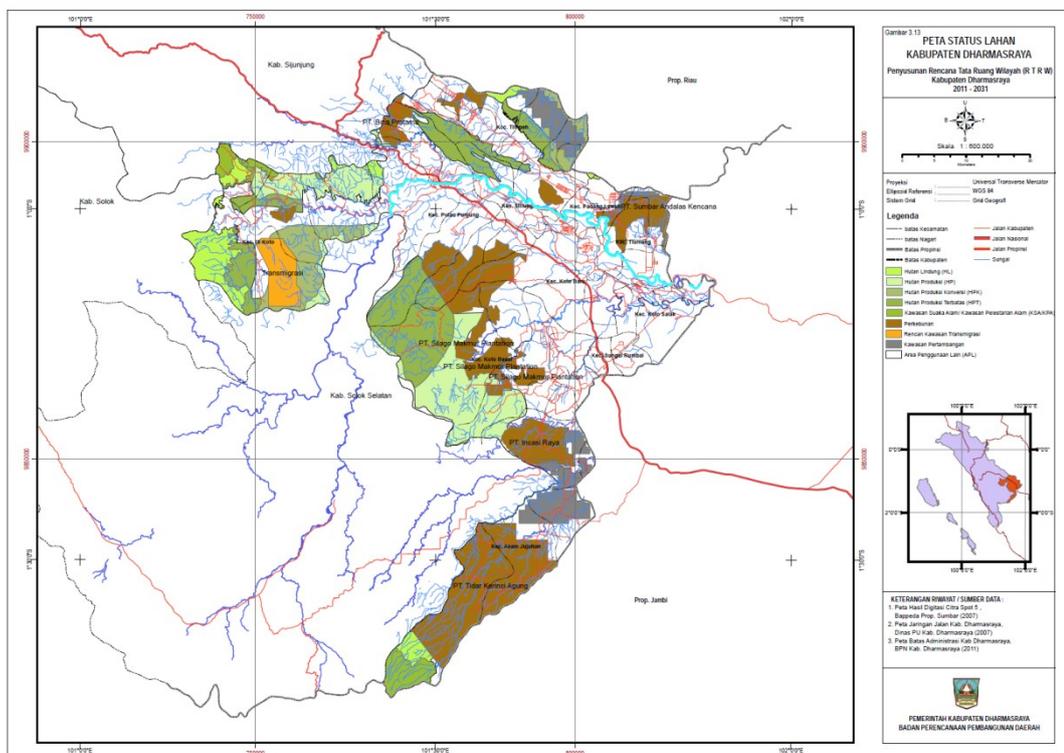


**Tabel 3: Status Penggunaan Lahan Kabupaten Dharmasraya**

Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan Hutan	87.174	28,91%
– Hutan Lindung (HL)	11.984	3,97%
– Hutan Produksi (HP)	26.161	8,68%
– Hutan Produksi Konversi (HPK)	11.779	3,91%
– Hutan Produksi Terbatas (HPT)	31.845	10,56%
– Kaw. Suaka Alam/Pelest. Alam (KSA/KPA)	5.405	1,79%
Perkebunan Besar	75.840	25,15%
Kawasan Pertambangan	23.305	7,73%
Rencana Kawasan Transmigrasi	1.300	0,43%
Lahan budidaya dan permukiman masyarakat	113.934	37,78%
<b>Total Luas</b>	<b>301.553</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

**Gambar 7 : Status Lahan Kabupaten Dharmasraya**



**b. Potensi pengembangan wilayah**

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidayanya yang terbesar didaratan Provinsi Sumatera Barat dan proporsi luas kawasan lindung dengan budidaya terkecil diantara Kabupaten di Sumatera Barat. Posisi geografis wilayah yaitu termasuk kedalam kawasan hulu sampai tengah DAS Batang Hari dengan dibatasi bukit barisan yang membentang pada

---

arah barat menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumberdaya alam Kabupaten Dharmasraya.

Selain potensi pertanian perkebunan juga terdapat peluang pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah, budidaya perikanan darat, hortikultura buah-buahan dan hasil hutan serta pertambangan.

### **c. Wilayah rawan bencana dan pencemaran lingkungan**

Lokasi rawan longsor di Kabupaten Dharmasraya yaitu: Kecamatan IX Koto, Nagari Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Kawasan yang rawan bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada dataran banjir dengan morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Siat. Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir: Kampung Surau, Nagari Sungai Kambuik Kecamatan Pulau Punjung, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Jorong Ranah Baru dan Jorong Bonjol di Sungai Batang Siat Kecamatan Koto Besar, dan di Kecamatan Koto Salak, kecamatan Padang laweh, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang.

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor Kerawanan sedang dan tinggi terdapat pada kawasan berbukit yang terdapat pada bagian barat dan sebagian timur kabupaten.

Selain itu terdapat kerawanan pencemaran lingkungan pada sungai di Kabupaten Dharmasraya. Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

### **d. Demografi**

Penduduk sebagai modal dasar pembangunan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan dengan pertumbuhan yang tinggi akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah/bangsa sebgaaian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan oleh melimpahnya sumberdaya alam (SDA). SDA yang melimpah tanpa diimbangi dengan SDM yang baik akan tetap tertinggal.

Masalah kependudukan merupakan masalah serius yang di hadapi oleh negara-negara di Dunia, bahkan tahun-tahun belakangan ini para ahli ekonomi telah memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Perencanaan pembangunan ini dituangkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan dimana kependudukan perlu dipertimbngan sebagai tolak ukur pembangunan masyarakat.

#### a) Jumlah Penduduk dan Persebaran

Saat ini penduduk Indonesia diperkirakan mendekati angka sekitar 238 juta jiwa (BPS, 2011), dan keempat terbanyak di dunia. Bila dilihat jumlah penduduk kabupaten Dharmasraya saat ini berdasarkan sensus penduduk (SP) tahun 2010 adalah sebanyak 191.422 jiwa, terdiri 98.892 orang laki-laki (51,66%), dan 92.530 orang perempuan (48,34%), dengan rasio jenis kelamin 106,88. Jumlah ini kemudian menjadi 197.599 jiwa tahun 2011, terdiri dari 102.103 laki-laki dan 95.496 perempuan dan rasio jenis kelamin 106,92.

Rasio jenis kelamin hampir pada setiap kelompok umur mencapai angka lebih dari seratus, yang menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan, kecuali pada kelompok umur 65 tahun ke atas (Tabel 1). Banyaknya jumlah penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan, terutama pada usia kerja dapat diinterpretasikan bahwa migrasi masuk ke daerah ini cukup besar, khususnya laki-laki, apalagi daerah ini merupakan salah satu daerah pengembangan sentra perkebunan Sumatera Barat seperti kelapa sawit dan tanaman karet.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Dharmasraya termasuk kategori tinggi yakni 3,09 % per tahun, bahkan tertinggi bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni 1,34 % dan lebih dari dua kali LPP nasional yang hanya pada level 1,49 %.

**Tabel 4: Komposisi Penduduk Dharmasraya Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010**

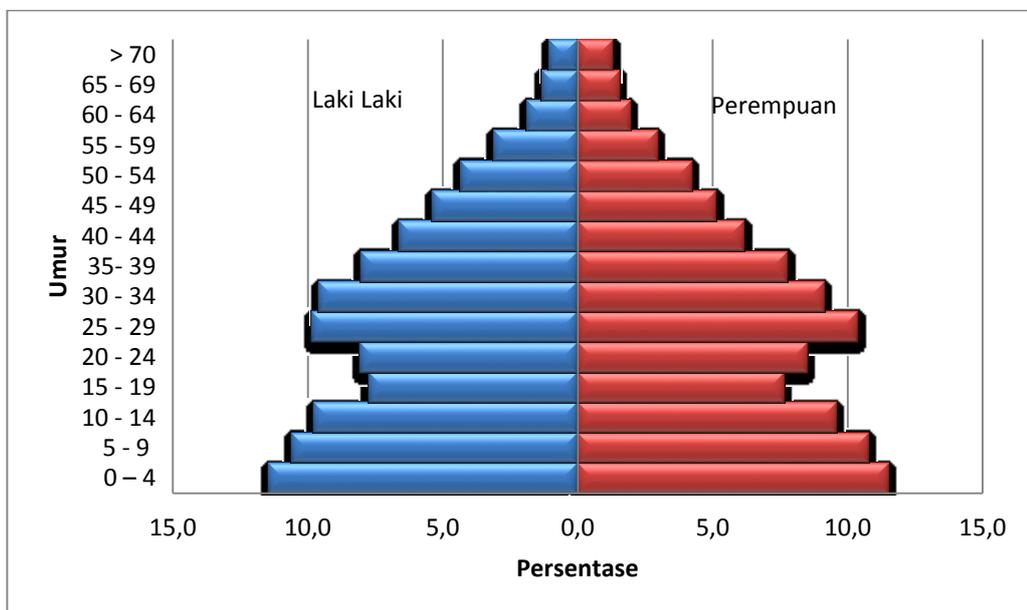
Umur	Penduduk						Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	Kumulatif	
0 – 4	11.329	11,46	10.663	11,52	21.992	21.992	106,25
5-9	10.501	10,62	9.977	10,78	20.478	42.470	105,25
10.-14	9.661	9,77	8.872	9,59	18.533	61.003	108,89
15 – 19	7.668	7,75	7.070	7,64	14.738	75.741	108,46
20 – 24	7.989	8,08	7.876	8,51	15.865	91.606	101,44
25 – 29	9.734	9,84	9.606	10,38	19.340	110.946	101,33
30 – 34	9.484	9,59	8.466	9,15	17.950	128.896	112,02
35- 39	7.949	8,04	7.200	7,78	15.149	144.045	110,40
40 – 44	6.543	6,62	5.712	6,17	12.255	156.300	114,55
45 – 49	5.323	5,38	4.752	5,14	10.075	166.375	112,02
50 – 54	4.291	4,34	3.901	4,22	8.192	174.567	110,00
55 – 59	3.098	3,13	2.754	2,98	5.852	180.419	112,49
60 – 64	1.882	1,9	1.807	1,95	3.689	184.108	104,15
65 – 69	1.321	1,34	1.436	1,55	2.757	186.865	91,99
70-74	1.045	1,06	1.201	1,3	2.246	189.111	87,01
75+	1.074	1,09	1.237	1,34	2.311	191.422	86,82
<b>Jumlah</b>	<b>98.892</b>	<b>51,66</b>	<b>92.530</b>	<b>48,34</b>	<b>191.422</b>		<b>106,88</b>

Berdasarkan data tabel 3 diperoleh Median umur penduduk Dharmasraya tahun 2010 adalah 26,06 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Dharmasraya termasuk kategori pertengahan atau intermediate. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika

median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Sementara rasio ketergantungan penduduk Dharmasraya adalah 55. Artinya setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 55 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Angka ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio ketergantungan penduduk perdesaan yakni 56,30, tetapi masih lebih tinggi dari rasio ketergantungan penduduk perkotaan adalah 46,59.

Selanjutnya berdasarkan penduduk kelompok umur dan jenis kelamin di atas dapat dibuat piramida penduduk seperti pada gambar 1. Piramida ini sama halnya dengan piramida penduduk Indonesia yang memperlihatkan ciri-ciri: alas piramida lebih lebar, dan semakin ke atas makin kecil sebagai ciri dari penduduk muda. Dengan ciri yang demikian dapat diprediksi bahwa angka fertilitas cenderung tinggi, sebagaimana disebutkan di atas bahwa LPP Dharmasraya termasuk kategori tinggi.

**Gambar 8: Piramida Penduduk Dharmasraya Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010**



Terkait dengan kependudukan, salah satu permasalahan yang dihadapi daerah Dharmasraya adalah LPP yang tinggi sebagaimana disampaikan di atas. LPP yang tinggi bisa karena tingginya pertumbuhan penduduk alamiah (natural increase), dan karena migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar. Mengacu pada bentuk grafik penduduk Dharmasraya tahun 2011, untuk kelompok umur tertentu (usia kerja) ada kemungkinan migrasi masuk cukup besar. Kemudian dengan alas yang masih tetap lebar menunjukkan bahwa untuk keseimbangan pembangunan dan penduduk, maka angka fertilitas perlu diwaspadai. Artinya kebijakan penduduk masih perlu bertumpu pada upaya menurunkan angka fertilitas.

**b) Kepadatan Penduduk**

Berdasarkan data tabel 4 dapat dilihat bahwa konsentrasi penduduk terdapat di kecamatan Koto Baru, Sungai Rumbai, dan Sitiung. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Sungai Rumbai dengan kepadatan 3,69 jiwa per Ha, berikut Sitiung dengan kepadatan 1,89 jiwa per Ha, dan Koto Baru dengan kepadatan 1,34

jiwa per Ha. Kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu kecamatan IX Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan kepadatan masing-masingnya 0,15 jiwa dan 0,23 jiwa per Ha.

Tingginya kepadatan penduduk Sungai Rumbai karena daerah tersebut merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Selain itu, daerah ini dapat dikatakan sebagai gerbang tenggara Sumatera Barat sekaligus juga sebagai pusat perdagangan, sedangkan kecamatan Sitiung merupakan kawasan konsentrasi transmigrasi. Proses transmigrasi ini terjadi antara tahun 1976 hingga 2002 dan mencapai proporsi sepertiga penduduk kabupaten. Koto Baru dan Gunung Medan berfungsi sebagai daerah transit bagi penduduk yang melakukan perjalanan antar propinsi. Kec. IX Koto dan Kec. Asam Jujuhan merupakan kawasan berbukit diperbatasan dan memiliki kawasan lindung yang cukup luas serta jauh dari pusat kegiatan sehingga kepadatan penduduk di kawasan ini rendah.

**Tabel 5: Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Dharmasraya**

No.	Kecamatan	Luas		Penduduk Seluruhnya				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Ha	%	L	P	L+P	%	
1	Sungai Rumbai	5.106	1,69%	9.859	9.001	18.860	9,54%	3,69
2	Koto Besar	56.057	18,53%	12.049	11.268	23.317	11,80%	0,42
3	Asam Jujuhan	48.541	16,04%	6.153	5.209	11.362	5,75%	0,23
4	Koto Baru	22.120	7,31%	15.113	14.438	29.551	14,96%	1,34
5	Koto Salak	12.145	4,01%	7.788	7.568	15.356	7,77%	1,26
6	Tiumang	13.443	4,44%	5.793	5.425	11.218	5,68%	0,83
7	Padang Laweh	6.062	2,00%	2.998	2.679	5.677	2,87%	0,94
8	Sitiung	12.457	4,12%	12.086	11.457	23.543	11,91%	1,89
9	Timpeh	32.301	10,67%	7.073	6.669	13.742	6,95%	0,43
10	Pulau Punjung	44.316	14,65%	19.382	18.047	37.429	18,94%	0,84
11	IX Koto	50.050	16,54%	3.809	3.735	7.544	3,82%	0,15
<b>Jumlah</b>		<b>302.599</b>	<b>100,00</b>	<b>102.103</b>	<b>95.496</b>	<b>197.599</b>	<b>100,00</b>	<b>0,65</b>

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan indikator makro pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan indikator sosial ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, tingkat kesejahteraan sosial.

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan PDRB

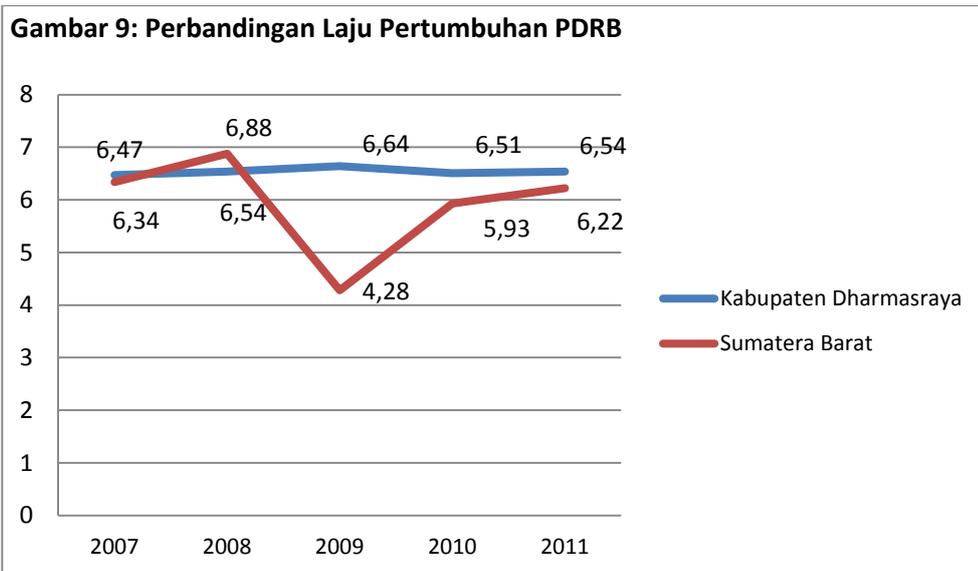
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi terbentuk dari perubahan yang terjadi pada berbagai sektor ekonomi dalam suatu daerah yang tersaji dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dari tahun ketahun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya terus memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan PDRB tahun 2008 sebesar 6,54 persen meningkat menjadi 6,64 persen tahun 2009 dan kembali turun menjadi 6,51 persen pada tahun 2010, lalu tahun 2011 naik kembali menjadi

6,55%, namun demikian secara rata-rata pertumbuhan PDRB dari tahun 2007-2011 masih sebesar 6.54 persen lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Sumatera Barat yang hanya 5.93 % pada periode tahun tersebut.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada periode tahun 2007-2008, pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya masih dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Tetapi pada periode tahun setelah itu, perekonomian Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan yang sangat pesat dan berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Apabila diperhatikan tabel dibawah ini, ada beberapa lapangan usaha yang mempunyai laju pertumbuhan rata-rata sektoral diatas laju pertumbuhan rata-rata keseluruhan yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha bangunan dan lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa keuangan dan lapangan usaha jasa Hal ini mengindikasikan bahwa kelima lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang mempunyai potensi pengembangan cukup besar dan diharapkan menjadi lapangan usaha andalan bagi perekonomian Kabupaten Dharmasraya. Disamping itu kondisi kabupaten Dharmasraya sebagai Kabupaten hasil pemekaran yang pasti baru memulai proses pembangunan sehingga menyebabkan beberapa lapangan usaha melaju dengan cepat seiring dengan dimulainya proses pembangunan.



**Tabel 6: PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) 2007 – 2011**

No	LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010*	2011**	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.	Pertanian	376.206,15	380.541,52	407.396,17	429.804,26	453.964,98	5,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	37.788,56	59.953,21	63.444,49	70.557,79	76.057,59	7,6
3.	Industri pengolahan	65.484,92	69.374,72	72.302,46	75.907,11	79.801,14	5,22
4.	Listrik dan air	10.084,37	10.286,38	10.343,05	10.705,71	11.412,61	4,48
5.	Bangunan	105.051,62	114.201,62	122.502,72	131.842,72	139.542,33	7,31
6.	Perdagangan, hotel dan Restoran	110.260,13	116.304,39	124.619,02	133.205,25	142.855,03	6,67
7.	Angkutan dan komunikasi	61.544,70	65.009,48	68.861,33	72.734,36	77.616,01	6,19
8.	Keu, persewaan & Jasa Perusahaan	38.402,16	41.696,64	45.106,33	49.642,99	53.463,06	8,66
9.	Jasa-jasa	152.679,86	162.711,56	173.200,42	184.157,33	199.663,39	6,72
	<b>Total PDRB</b>	<b>957.502,47</b>	<b>1.020.079,52</b>	<b>1.087.775,99</b>	<b>1.158.557,51</b>	<b>1.234.376,14</b>	<b>6,54</b>

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya

Kondisi pembangunan ekonomi sektoral berdasarkan potensi dan daya saing dapat diketahui dengan menggunakan analisis indeks Location Quotient (LQ). Analisis ini mengkategorikan sektor perekonomian menjadi sektor basis dan non-basis. Sektor produksi basis yaitu sektor yang memiliki nilai  $LQ > 1$  berarti sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan mengekspor ke daerah lainnya. Dengan kata lain, sektor basis memiliki daya saing dan keunggulan komparatif. Sebaliknya, nilai  $LQ < 1$  menunjukkan bahwa produksi suatu sektor tergantung kepada impor atau pemenuhan dari daerah lain. Potensi ekonomi sektoral Kabupaten Dharmasraya secara lengkap disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7: Basis Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Indeks Location Quotient (LQ)**

No	Lapangan Usaha	Indeks LQ	
		2008	2011
1.	Pertanian	1,55	<b>1,61</b>
	Tanaman Pangan & Hortikultura	0,36	0,53
	Tanaman Perkebunan	2,68	<b>3,92</b>
	Peternakan	0,99	<b>1,66</b>
	Kehutanan	1,28	<b>2,30</b>
	Perikanan	0,47	0,88
2.	Pertambangan dan penggalian	1,90	<b>2,03</b>
3.	Industri pengolahan	0,53	0,53
4.	Listrik dan air	0,87	0,83
5.	Bangunan	2,25	<b>2,06</b>
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	0,62	0,64
7.	Angkutan dan komunikasi	0,45	0,41
8.	Keuangan persewaan & jasa perusahaan	0,79	0,85
9.	Jasa-jasa	0,99	0,95

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, data diolah

Keterangan: Potensi Pengembangan ekonomi merupakan hasil perhitungan LQ pada tahun 2008 dan 2010.

Berdasarkan metode LQ pada tahun 2011 ditemukan hasil bahwa sektor-sektor basis Kabupaten Dharmasraya yaitu pertambangan (2,03) dan pertanian (1,61)

dengan catatan bahwa sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, dan perikanan belum menjadi sektor basis perekonomian. Sementara sektor bangunan memiliki proporsi yang besar (2.06). Subsektor peternakan mengalami transformasi positif pada tahun 2011 (0,99 menjadi 1,66) .

#### b. Kontribusi Sektoral Pendapatan Regional

Secara sektoral perekonomian Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2009 masih didominasi 4 sektor utama sebagai penghasil nilai tambah terbesar terhadap PDRB , yaitu (1) sektor pertanian, (2) sektor bangunan, dan (3) sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta (4) sektor jasa-jasa. Sementara itu pada tahun 2010 dari total PDRB Kabupaten Dharmasraya sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 37.1%, dilanjutkan dengan sektor bangunan (11.38%), sektor perdagangan hotel dan restoran (11.5%), serta sektor jasa-jasa (15.9%). Pada tahun 2011, sektor pertanian juga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB kabupaten Dharmasraya yaitu sebesar 36,78%.

Meskipun demikian apabila dilihat dari tren pertumbuhan kontribusi sektoral, sektor pertanian yang mendominasi perekonomian mempunyai kecenderungan yang menurun dari periode waktu 2007-2011. Hal yang sebaliknya ditunjukkan oleh sektor-sektor yang memberikan sedikit kontribusi tetapi menunjukkan tren yang meningkat seperti sektor pertambangan yang hanya berkontribusi sebesar 6.09 % pada tahun 2010 dan meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 6.16% kontribusinya. Begitu pula dengan sektor lainnya seperti sektor keuangan meskipun hanya berkontribusi sebesar yang kecil yaitu hanya 4.28 % pada tahun 2010 tetapi meningkat pada tahun 2011 menjadi 4.33% dan cenderung menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun.

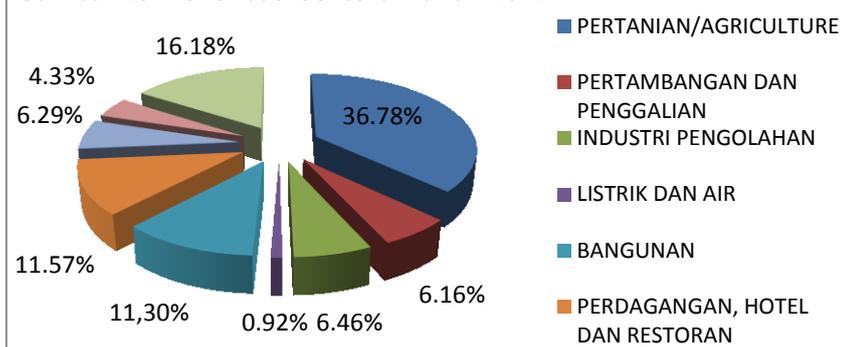
**Tabel 8: Kontribusi Sektor-Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2007-2011**

No	Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pertanian	39,29	37,31	37,45	37,10	36,78
2.	Pertambangan dan galian	3,95	5,88	5,83	6,09	6,16
3.	Industri Pengolahan	6,84	6,80	6,65	6,55	6,46
4.	Listrik dan air	1,05	1,01	0,95	0,92	0,92
5.	Bangunan	10,97	11,20	11,26	11,38	11,30
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,52	11,40	11,46	11,50	11,57
7.	Angkutan dan Komunikasi	6,43	6,37	6,33	6,28	6,29
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,01	4,09	4,15	4,28	4,33
9.	Jasa-jasa	15,95	15,95	15,92	15,90	16,18

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya, 2012

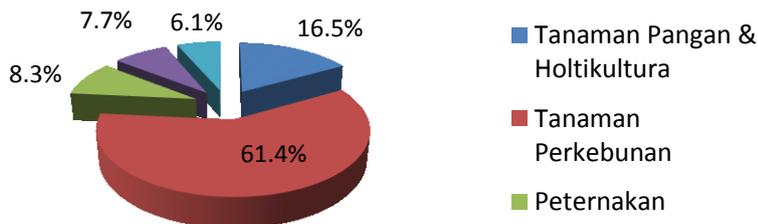
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di Wilayah Kabupaten Dharmasraya, yang selalu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pembangunan ekonomi saat ini, dimana kontribusi sektor pertanian paling besar terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya. Pada grafik dibawah ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2011, kontribusi sektor pertanian sebesar 36.78 %. Tetapi kecenderungan kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang menurun .

**Gambar 10: Kontribusi Sektoral Tahun 2011**



Sub sektor pertanian yang memberi kontribusi terbesar terhadap sektor pertanian adalah subsektor tanaman perkebunan yaitu sebesar 61,4%. Hal ini sesuai dengan kondisi yang menunjukkan bahwa sebagian besar lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh subsektor tanaman perkebunan. Besarnya kontribusi masing-masing subsektor dalam sektor pertanian terlihat dalam gambar dibawah ini.

**Gambar 11: Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Pertanian Tahun 2011**



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Bank Indonesia Padang terhadap komoditi-komoditi Unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat termasuk didalamnya yaitu Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan bahwa komoditi unggulan untuk Kabupaten Dharmasraya seperti yang diperlihatkan tabel dibawah ini, dimana dari lima komoditi unggulan Kabupaten Dharmasrayatiga komoditi berasal dari sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman perkebunan yaitu komoditi Karet, Kelapa Sawit dan Coklat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya sebagai Kabupaten yang mempunyai potensi besar di sektor pertanian dan perekonomiannya lebih didominasi oleh sektor pertanian.

**Tabel 9: Lima Komoditi Unggulan Kabupaten Dharmasraya**

No.	KPJU	Sektor Usaha
1.	Karet	Perkebunan
2.	Kelapa Sawit	Perkebunan
3.	Tempe	Industri
4.	Coklat	Perkebunan
5.	Sapi Potong	Peternakan

Sumber: Bank Indonesia, Hasil Penelitian 2011

### c. Laju Inflasi dan Uang Beredar

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Apabila diperhatikan tabel dibawah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Dharmasraya secara rata-rata dari tahun 2007 sampai tahun 2010 tergolong pada inflasi ringan atau dibawah 10%. Tetapi pada tahun 2007 dan 2008 terjadi inflasi kategori sedang dimana tingkat inflasi diatas 10 %. Hal ini terjadi dikarenakan pada periode tersebut perekonomian Indonesia secara keseluruhan sedang dilanda krisis yang menyebabkan terjadi peningkatan harga secara umum tidak saja di Kabupaten Dharmasraya tetapi juga di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi di Sumatera Barat, maka pada beberapa tahun tertentu yaitu tahun 2007, 2009 dan 2011 tingkat inflasi di Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi daripada tingkat inflasi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap harga hasil produk-produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet. Sebagaimana diketahui komoditi pertanian merupakan produk unggulan dan penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah. Kenaikan harga produk pertanian menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat dan meningkatkan daya beli yang sudah tentu akan berpengaruh besar terhadap kenaikan harga secara umum di daerah ini.

**Tabel 10: Tingkat Inflasi**

Tahun	Dharmasraya	Sumatera Barat
2007	11,31	6,9
2008	10,70	12,68
2009	4,35	2,05
2010	6,94	7,84
2011	7,36	5,37

Sumber: BPS Sumatera Barat 2012, data diolah

Penciptaan uang/besarnya uang beredar dalam masyarakat dapat digambarkan sebagai proses pasar. Jumlah Uang Beredar juga mempunyai keterikatan dengan suku bunga deposito. Semakin banyak jumlah uang yang beredar dimasyarakat, investasi menjadi lebih menarik bila dibandingkan dengan menyimpan dalam bentuk tabungan. Jumlah uang beredar dalam arti luas merupakan penjumlahan uang kartal dan uang quasi. Dimana uang quasi dapat diprosikan sebagai dana simpanan pihak ketiga yang tersimpan pada bank umum.

Menurut data yang ada seperti diperlihatkan tabel dibawah ini, jumlah simpanan dana pihak ketiga di Kabupaten Dharmasraya dari tahun-ketahun berfluktuasi. Peningkatan yang sangat besar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 765.65%. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009 masih terjadi peningkatan yang sangat besar terhadap uang beredar di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini secara tidak langsung

dipengaruhi oleh peningkatan yang sangat besar terhadap harga produk-produk pertanian khususnya tanaman perkebunan. Tetapi pada tahun 2010 dimana pada tahun ini harga produk perkebunan mengalami penurunan maka secara langsung juga menurunkan jumlah uang beredar sebesar 70,85%. Tetapi pada tahun 2011 terjadi lonjakan yang sangat besar pada jumlah uang yang beredar di kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 11: Banyaknya Uang Beredar**

Tahun	Uang Beredar (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2007	953.780	
2008	1.266.389	32,78
2009	1.339.014	5,73
2010	390.272	-70,85
2011	16.129.117	4.032,78

Sumber: 8 Bank Di Kabupaten Dharmasraya

Tingginya jumlah uang yang beredar berpengaruh kepada tingkat bunga dan investasi. Dimana diharapkan investasi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar. Tetapi apabila kita perhatikan tabel dibawah ini, dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terlihat bahwa terdapat selisih negatif aliran uang di Kabupaten Dharmasraya, Dimana aliran uang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan aliran uang keluar. Sangat disayangkan apabila hal ini terjadi setiap saat karena mengindikasikan terjadinya aliran modal keluar dari Kabupaten Dharmasraya. Seharusnya terjadi adalah uang beredar di Kabupaten Dharmasraya dapat digunakan untuk berinvestasi dan mengembangkan perekonomian daerah.

**Tabel 12: Transfer Dana Masuk dan Keluar Melalui Jasa Bank**

Tahun	Masuk (Juta)	Keluar (Juta)	Selisih
2007	10.892.896	12.372.707	-1.479.812
2008	297.410	4.462.001	- 4.164.591
2009	978.988	1.382.080	- 403.093
2010	137.228	412.641	- 275.414
2011	123.453	459.658	- 336.205

Sumber: Delapan Bank di Kabupaten Dharmasraya

#### d. Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan

Dampak kebijakan pembangunan suatu daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya PDRB suatu daerah belum tentu mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karena juga sangat tergantung kepada perkembangan jumlah penduduk. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita, yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Angka-angka perkapita akan menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Untuk melihat gambaran secara riil keadaan tersebut digunakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Tahun 2011 kenaikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 13.22 persen dengan nilai sebesar Rp. 15.838.958,48 per orang per tahun sedangkan tahun 2010 hanya sebesar Rp. 13.988.935,49 per orang per tahun.

Begitu juga dengan Pendapatan Regional Perkapita yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 13,39 %. Peningkatan nilai PDRB Perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan pendapatan perkapita penduduk Sumatera Barat, maka pendapatan perkapita masyarakat Dharmasraya masih berada dibawah pendapatan perkapita Sumatera Barat secara keseluruhan atau tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dharmasraya masih dibawah tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat seperti yang diperlihatkan tabel dibawah ini. Tetapi dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya yang lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat maka bisa dipastikan suatu saat tingkat pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Dharmasraya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Sumatera Barat umumnya.

**Tabel 13: Perbandingan Pendapatan Perkapita Kabupaten Dharmasraya dengan Propinsi Sumatera Barat**

Tahun	Kabupaten Dharmasraya		Sumatera Barat	
	PDRB/kapita	Pendapatan Regional/kapita	PDRB/kapita	Pendapatan Regional/kapita
2007	10.180.286,52	9.678.778,66	12.808.637,46	11.762.362,70
2008	11.314.964,39	10.766.881,98	15.003.730,16	13.769.096,99
2009	12.417.559,87	11.811.441,54	16.023.751,76	14.688.468,49
2010	13.988.935,49	13.330.464,79	17.960.699,96	16.499.092,87
2011	15.838.958,48	15.115.745,28	20.168.840,57	18.486.657,11
Rata-rata	12.748.141,00	12.140.662,40	16.393.132,00	15.041.135,60

Sumber: BPS, 2011

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga bisa dilihat dengan sebesar besar penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, telur, mie instan, tahu dan tempe. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah. Disamping itu unsur Inflasi juga sangat berpengaruh dengan jumlah penduduk miskin. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat karena harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Dari tahun ke tahun garis kemiskinan semakin meningkat seiring meningkatnya inflasi. Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya semakin menurun. Perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2006 sampai tahun 2010, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 4,37 %,

artinya terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun atau bisa juga diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dari tahun ketahun seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

**Tabel 14: Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin**

Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kap/Bln	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Penduduk Miskin (%)	Perubahan per tahun (%)
2006	169,588	170.440	25.400	14,93	
2007	175,577	175.573	23.800	14,42	-6,30
2008	184,683	180.915	21.400	12,53	-10,08
2009	229,181	186.354	19.900	11,40	-7,01
2010	358,859	191.422	20.300	10,56	2.01

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya, 2011

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, dapat menggunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya), koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna dan 0 yang berarti merata sempurna.

Pada tabel dibawah dijelaskan besaran koefisien Gini untuk semua daerah Kabupaten yang ada di Sumatera Barat, dimana pada tahun 2011 secara rata-rata semua daerah kabupaten di Sumatera Barat mempunyai distribusi pendapatan relatif merata karena memiliki angka Koefisien Gini 0.329. Beberapa daerah memiliki Gini rasio dibawah rata-rata Sumatera Barat salah satunya adalah daerah Kabupaten 50 Kota dengan Gini rasio sebesar 0.255 yang berarti pendapatan masyarakat di kabupaten ini relatif merata.

Kabupaten Dharmasraya sendiri memiliki Gini rasio kedua terbesar di Sumatera Barat setelah Kota Padang Panjang dan tertinggi diantara kabupaten yaitu 0.369. Artinya pendapatan masyarakat Kabupaten Dharmasraya relatif timpang dibandingkan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya.

**Tabel 15: Gini Rasio Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2011**

No	Kabupaten/ Kota	Gini Rasio
1	Kep. Mentawai	0,326
2	Pesisir Selatan	0,264
3	Solok	0,285
4	Sijunjung	0,299
5	Tanah Datar	0,345
6	Padang Pariaman	0,314
7	Agam	0,277
8	Lima Puluh Kota	0,255
9	Pasaman	0,291
10	Solok Selatan	0,292
<b>11</b>	<b>Dharmasraya</b>	<b>0,369</b>
12	Pasaman Barat	0,269
13	Padang	0,304
14	Payakumbuh	0,320

No	Kabupaten/ Kota	Gini Rasio
15	Bukittinggi	0,329
16	Sawahlunto	0,336
17	Solok	0,345
18	Pariaman	0,349
19	Padang Panjang	0,399
	Rata-rata	0,329

Sumber: Gini Rasio Kabupaten Dharmasraya 2012

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas kehidupan manusia yang terlihat dari berbagai indikator kualitas hidup manusia dan pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar untuk mendukung kehidupan yang berkualitas terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

### a. Kondisi Kualitas Pembangunan Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)

Kondisi kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010 sebesar 69,13 berada pada peringkat ke 17 di Provinsi Sumatera Barat diatas Solok Selatan dan Mentawai. Pencapaian per indikator yaitu: rata-rata lama sekolah 7,77 tahun (rata-rata Sumbar 8,48 tahun); pengeluaran perkapita Rp. 608.890 terendah setelah Mentawai (rata-rata Sumbar Rp. 635,29); angka melek huruf 96,38% urutan ke 7 dari 12 kabupaten(rata-rata Sumbar 97,09%); dan angka harapan hidup rata-rata 66 tahun terendah di Sumbar (rata-rata Sumbar 69,50 tahun).

**Tabel 16 : Indeks Pembangunan Manusia  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008-2010**

Indikator/ indeks	2008	2009	2010	2011
<b>Indeks harapan hidup</b>	67,50	67,92	68,33	
Angka Harapan Hidup	65,50	65,75	66,00	
<b>Indeks tingkat pendidikan</b>	80,07	80,86	81,52	
<b>Indeks melek huruf</b>	95,54	96,16	96,38	
Angka Melek Huruf	95,54	96,16	96,38	
<b>Indeks lama sekolah</b>	49,13	50,27	51,80	
Rata-rata lama sekolah	7,37	7,54	7,77	
<b>Indeks Hidup Layak</b>	56,40	56,50	57,52	
pengeluaran perkapita	604,04	604,49	608,89	
<b>IPM Dharmasraya</b>	<b>67,99</b>	<b>68,43</b>	<b>69,13</b>	

Sumber: BPS Kab. Dharmasraya, 2012. Data diolah

Pencapaian pada tahun 2010 tersebut merupakan peningkatan karena sampai tahun 2007 peringkat IPM Kabupaten Dharmasraya terendah di Provinsi Sumbar. Dilihat dalam peringkat nasional antar daerah dalam rentang tahun 2004 -2010 terdapat kenaikan cukup signifikan yaitu naik 21 peringkat dari urutan 379 menjadi 358.

**Tabel 17 : Indeks Pembangunan Manusia  
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2008-2010**

No	KABUPATEN/ KOTA	Angka Harapan Hidup (Tahun)			Angka Melek huruf (Persen)			Rata-rata lama Sekolah (Tahun)			Pengeluaran riil per kapita yg d disesuaikan (Rp. 000)			IPM		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	Bukitinggi	71,22	71,37	71,53	99,49	99,55	99,92	10,43	10,47	10,50	646,58	648,49	651,09	<b>77,59</b>	<b>77,86</b>	<b>78,26</b>
2	Padang	70,39	70,64	70,89	99,48	99,49	99,49	10,80	10,85	10,91	643,92	644,31	647,24	<b>77,19</b>	<b>77,40</b>	<b>77,81</b>
3	Pdg Panjang	70,60	70,95	71,30	99,28	99,29	99,30	10,20	10,21	10,23	645,38	645,60	646,57	<b>76,93</b>	<b>77,16</b>	<b>77,44</b>
4	Payakumbuh	70,31	70,46	70,62	99,16	99,17	99,18	9,07	9,27	9,66	633,02	633,52	636,22	<b>74,96</b>	<b>75,23</b>	<b>75,82</b>
5	Kota Soioik	69,34	69,51	69,69	98,50	98,51	98,51	9,80	9,86	10,43	631,39	632,50	635,24	<b>74,69</b>	<b>74,91</b>	<b>75,65</b>
6	Sawahlunto	71,22	71,44	71,65	98,43	98,50	98,55	8,77	8,95	9,14	622,71	623,01	624,52	<b>74,28</b>	<b>74,58</b>	<b>74,96</b>
7	Pariaman	68,56	68,79	69,02	98,24	98,68	98,92	9,33	9,49	9,90	625,98	627,23	628,66	<b>73,43</b>	<b>73,87</b>	<b>74,47</b>
8	Tanah Datar	70,22	70,58	70,94	96,63	96,64	97,10	7,80	7,88	8,35	627,58	628,05	628,88	<b>72,98</b>	<b>73,54</b>	<b>74,00</b>
9	Agam	68,67	68,85	69,04	97,82	97,84	97,85	8,20	8,28	8,50	625,22	628,31	629,65	<b>72,50</b>	<b>72,90</b>	<b>73,28</b>
10	Pasaman	66,76	67,10	67,44	98,36	98,40	98,73	7,57	7,60	7,61	633,12	638,48	639,84	<b>71,71</b>	<b>72,32</b>	<b>72,71</b>
11	Pdg Pariaman	67,92	68,28	68,65	94,45	94,46	94,49	7,13	7,25	7,26	626,29	629,31	630,40	<b>70,63</b>	<b>71,15</b>	<b>71,45</b>
12	Lima Puluh kota	67,72	68,08	68,45	98,70	98,71	98,85	7,70	7,82	7,94	607,97	608,70	608,70	<b>70,47</b>	<b>70,80</b>	<b>71,22</b>
13	Pesisir Selatan	66,75	67,03	67,31	92,83	92,84	94,92	7,53	7,62	7,84	628,40	628,93	629,30	<b>70,07</b>	<b>70,61</b>	<b>71,15</b>
14	Kab.Solok	65,90	66,25	66,60	97,10	97,13	97,19	7,30	7,33	7,60	621,05	623,78	627,25	<b>69,81</b>	<b>70,41</b>	<b>70,93</b>
15	Sijunjung.	66,25	66,58	66,92	93,07	93,08	94,78	7,20	7,30	7,43	630,49	634,30	633,55	<b>69,77</b>	<b>70,37</b>	<b>70,92</b>
16	Pasaman Barat	64,62	64,88	65,15	97,83	98,18	98,20	7,90	7,91	8,00	616,14	619,52	621,31	<b>69,33</b>	<b>69,82</b>	<b>70,18</b>
17	Dharmasraya	<b>65,50</b>	<b>65,75</b>	<b>66,00</b>	<b>95,54</b>	<b>96,16</b>	<b>96,38</b>	<b>7,37</b>	<b>7,54</b>	<b>7,77</b>	<b>604,04</b>	<b>604,49</b>	<b>608,89</b>	<b>67,99</b>	<b>68,60</b>	<b>69,13</b>
18	Solok Selatan	64,35	64,48	64,61	97,24	97,74	97,53	7,57	7,76	7,82	606,31	610,08	613,28	<b>68,06</b>	<b>68,67</b>	<b>68,98</b>
19	Kep. Mentawai	68,28	68,36	68,45	92,37	92,38	93,58	6,50	6,51	6,51	601,23	606,40	606,53	<b>67,97</b>	<b>68,42</b>	<b>68,75</b>
	SUMATERABARAT	69,00	69,26	69,50	96,60	96,81	97,09	8,26	8,45	8,48	631,52	633,72	635,29	<b>72,95</b>	<b>73,45</b>	<b>73,79</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2011

## b. Kondisi Pendidikan



Pendidikan merupakan salah satu bidang strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam pemenuhannya. Mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Untuk itu, perencanaan yang cepat dan terarah dalam pembangunan pendidikan mutlak diperlukan.

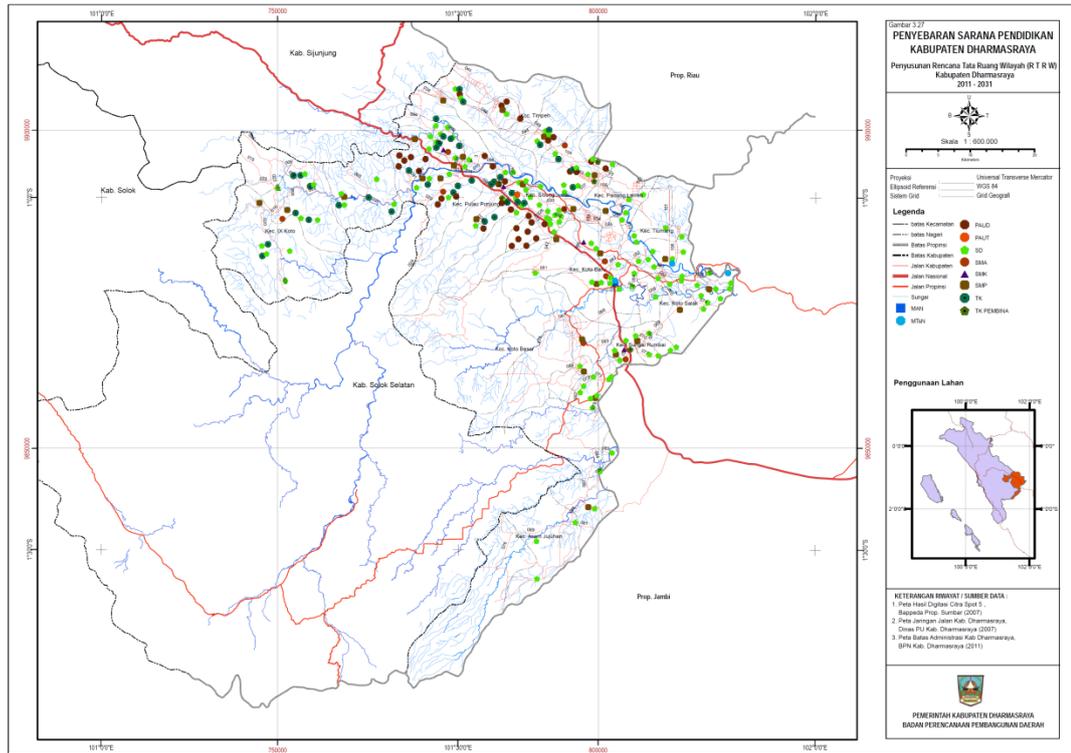
Berdasarkan data tahun 2011 jumlah SD/MI adalah 150 unit, SMP/MTS adalah 46 unit dan SMU/MA sebanyak 18 Unit. Kecamatan-kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan SMA/MA adalah Asam Jujuhan, Tiumang, Padang Laweh, dan IX Koto. Kecamatan-kecamatan ini perlu mendapatkan prioritas pelayanan. Sarana pendidikan dasar (SD) sampai sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) perlu direncanakan untuk dapat menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Dharmasraya. Kendala yang dihadapi adalah tersebarnya penduduk pada area yang luas sehingga jarak menjadi kendala utama pelayanan. Untuk itu minimal pada setiap kota kecamatan telah tersedia sarana pendidikan dari SD sampai SLTA. Akses dari kawasan permukiman menuju pusat pelayanan kecamatan tersebut perlu untuk ditingkatkan.

**Tabel 18: Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011**

No	Kecamatan	SD/MI			SLTP			SLTA			
		SD	MI	Jmlh	SMP	MTs	Jmlh	SMA	SMK	MA	Jmlh
1	Sungai Rumbai	9	-	9	2	1	3	1	1		2
2	Koto Besar	15	2	17	3	1	4	1	-	-	1
3	Asam Jujuhan	8	-	8	1	-	1	-	-	-	-
4	Koto Baru	17	-	17	4	4	8	2	1	3	6
5	Koto Salak	12	1	13	2	-	2	-	-	-	-
6	Tiumang	12	1	13	1	1	2	-	-	-	-
7	Padang Laweh	4	-	4	1	-	1	-	-	-	-
8	Sitiung	20	-	20	3	4	7	1	-	4	5
9	Timpeh	11	1	12	4	1	5	1		1	2
10	Pulau Punjung	24	-	24	7	3	10	2	2	2	6
11	IX Koto	13	-	13	3	-	3	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>145</b>	<b>5</b>	<b>150</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>22</b>

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Dharmasraya 2011

**Gambar 12 : Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya**



**1). Angka Melek Huruf**

Indikator lain terkait dengan pendidikan penduduk dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah angka melek huruf penduduk usia 15-44. Kelompok penduduk usia ini merupakan penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator ini.

**Tabel 19: Penduduk Usia 15-44 Tahun yang Melek Huruf Tahun 2010**

No.	Kecamatan	Penduduk 15-44 tahun			Penduduk Buta Huruf 15 - 44 Th			Penduduk Bisa Baca 15-44 Th			Angka Melek Huruf
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Sungai Rumbai	4.742	4.386	9.128	180	87	267	4.562	4.299	8.861	97,07
2	Koto Baru	7.353	6.958	14.311	167	143	310	7.186	6.815	14.001	97,83
3	Sitiung	5.748	5.418	11.166	109	8	117	5.639	5.410	11.049	98,95
4	Pulau Punjung	9.505	8.727	18.232	367	110	477	9.138	8.617	17.755	97,38
5	IX Koto	1.682	1.650	3.332	0	0	0	1.682	1.650	3.332	100,00
6	Timpeh	3.250	3.164	6.414	0	0	0	3.250	3.164	6.414	100,00
7	Koto Salak	3.721	3.589	7.310	0	0	0	3.721	3.589	7.310	100,00
8	Tiumang	2.799	2.652	5.451	0	0	0	2.799	2.652	5.451	100,00
9	Padang Laweh	1.488	1.313	2.801	0	0	0	1.488	1.313	2.801	100,00
10	Asam Jujuhan	3.198	2.671	5.869	0	0	0	3.198	2.671	5.869	100,00
11	Koto Besar	5.874	5.396	11.270	0	0	0	5.874	5.396	11.270	100,00
<b>Dharmasraya</b>		<b>49.360</b>	<b>45.924</b>	<b>95.284</b>	<b>823</b>	<b>348</b>	<b>1.171</b>	<b>48.537</b>	<b>45.576</b>	<b>94.113</b>	<b>98,77</b>

Berdasarkan data Tabel 19 dapat dilihat bahwa hampir semua penduduk usia 15-44 tahun di daerah Dharmasraya sudah melek huruf, kecuali di empat kecamatan yaitu Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung dan Sitiung masih ditemukan penduduk yang buta huruf meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit (kurang dari lima persen).

**Tabel 20: Angka Buta Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011**

Kota/Kabupaten		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
Kota		2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	Padang	0,25	0,47	1,10	0,72	0,68	0,60
2	Solok	0,87	1,34	1,26	0,61	1,07	0,96
3	Sawahlunto	0,91	1,61	1,01	0,79	0,96	1,19
4	Padang Panjang	0,56	0,60	1,37	0,23	0,96	0,42
5	Bukittinggi	0,17	0,18	0,15	-	0,16	0,08
6	Payakumbuh	1,27	0,55	1,66	1,45	1,48	0,99
7	Pariaman	0,69	0,53	0,72	0,53	0,70	0,53
Kabupaten							
1	Kep.Mentawai	4,01	3,05	6,38	6,23	5,15	4,56
2	Pesisir Selatan	1,04	2,24	2,94	2,42	2,04	2,33
3	Solok	2,14	2,87	4,32	3,13	3,26	3,01
4	Sijunjung	2,16	2,39	4,96	4,75	3,61	3,61
5	Tanah Datar	1,73	1,73	2,17	1,72	1,96	1,72
6	Padang Pariaman	2,94	2,04	5,45	6,31	4,31	4,22
7	Agam	1,92	1,34	2,76	2,57	2,35	1,97
8	50 Kota	1,42	1,69	3,50	2,64	2,51	2,18
9	Pasaman	1,10	0,64	1,59	1,27	1,35	0,96
10	Solok Selatan	1,93	1,70	2,68	2,49	2,31	2,09
<b>11</b>	<b>Dharmasraya</b>	<b>1,11</b>	<b>0,98</b>	<b>3,16</b>	<b>3,30</b>	<b>2,10</b>	<b>2,12</b>
12	Pasaman Barat	0,60	1,12	2,70	1,27	1,66	1,20

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, angka buta huruf kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ketujuh. Begitu juga dengan perbandingan antar kabupaten di Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ketujuh.

## 2). Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

**Tabel 21: Indikator Angka Partisipasi Kasar Tahun 2005-2011**

No.	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK)	Tahun						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	APK SD	105,84	105,06	123,26	121,93	100,52	101,02	114,21
2	APK SMP	69,69	70,34	72,47	75,80	69,58	69,66	86,72
3	APK SMA	35,04	38,77	87,49	73,91	85,85	88,72	71,43

Dari indikator APK Kabupaten Dharmasraya tahun 2005 sampai dengan 2011 terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Dharmasraya lebih dari 100% yang berarti terdapat kemungkinan adanya pelajar dari daerah lain atau murid yang berusia diluar usia resmi SD. APK SMP dalam rentang tahun 2005-2011 meningkat dari 69,69% menjadi 89,72% dan APK SMA meningkat dari 35,04% menjadi 71,43%.

### 3). Angka pendidikan yang ditamatkan (APT)

Pendidikan bukan sekadar upaya atau sarana orang mencari pekerjaan, melainkan sebuah proses pendewasaan diri untuk bisa hidup bermartabat. Karena merupakan proses pendewasaan diri, maka pendidikan tidak akan pernah berakhir, sekalipun yang bersangkutan telah mapan secara material dalam hidupnya (*education is long life*). Dengan demikian, pendidikan bukan alat (*means*) melainkan tujuan (*ends*). Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar.

**Tabel 22: Distribusi Jumlah dan Proporsi Penduduk Dharmasraya Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010**

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Penduduk	
		Jumlah	%
1	Tidak/belum pernah sekolah	27.845	14,55
2	Tidak/belum tamat SD	37.290	19,48
3	<b>Tamat SD</b>	<b>50.842</b>	<b>26,56</b>
4	<b>Tamat SMP</b>	<b>34.952</b>	<b>18,26</b>
5	<b>Tamat SMA</b>	<b>21.958</b>	<b>11,47</b>
6	<b>Tamat SMK</b>	<b>9.438</b>	<b>4,93</b>
7	<b>Tamat Perguruan Tinggi</b>	<b>9.097</b>	<b>4,75</b>
	- Tamat Diploma I/II	2.765	1,44
	- Tamat Diploma III/Sarjana muda	2.391	1,25
	- Tamat Sarjana	3.941	2,06
<b>Jumlah</b>		<b>191.422</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Dharmasraya 2011

Data tabel diatas memperlihatkan bahwa 60,59% penduduk Kabupaten Dharmasraya tidak pernah sekolah, tidak tamat SD sampai hanya tamat SD. proporsi terbesar penduduk Dharmasraya tahun 2010 adalah tamat SD (26,56%), kemudian tidak/belum tamat SD (19,48%), tamat SMP (18,26%), tidak/belum pernah sekolah (14,55%). Berdasarkan sebaran data terdapat kecendungan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit penduduk yang berpartisipasi di dalamnya.

#### 4). Angka Partisipasi Murni (APM)

Pendidikan merupakan kunci strategi dalam mempersiapkan terwujudnya anak bangsa yang demokratis, berkecakupan, cerdas, kreatif, mempertahankan akhlak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menghadapi persaingan global yang tanpa batas. Selain tingkat pendidikan, keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan juga dapat dilihat dari perkembangan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu).

**Tabel 23: Perkembangan APM Tahun 2007-2011**

Usia	2007	2008	2009	2010	2011
7 – 12	98,76	99,12	97,32	97,77	99,30
13 – 15	85,85	85,85	88,19	80,30	84,68
16 – 18	60,85	60,13	55,51	56,41	54,69

Perkembangan Angka Partisipasi Murni, untuk semua kelompok usia sekolah baik SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA/SMK periode 2007-2011 setiap tahun mengalami fluktuatif. Akan tetapi pola APM dari ketiga kelompok usia sekolah tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa, makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah tingkat partisipasi penduduk di dalamnya. Dengan kata lain, tingkat partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD lebih tinggi dibanding jenjang pendidikan di atasnya, SMP dan SMA. Hal ini bisa jadi disebabkan masih banyaknya lulusan SD dan SMP melanjutkan pendidikan keluar kabupaten Dharmasraya yang tidak terdata. Atau bisa jadi sebaliknya masih banyaknya penduduk tamat SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah tetapi kurang terdata dengan baik.

Jika dibandingkan dengan 12 kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat, untuk angka partisipasi sekolah kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ke 6 untuk tingkat SD, peringkat 12 untuk tingkat SLTP, dan peringkat 9 untuk tingkat SLTA. Sedangkan untuk perbandingan APM antar kabupaten, kabupaten Dharmasraya untuk tingkat SD berada pada peringkat ke tiga tertinggi, peringkat ke lima untuk tingkat SMP dan peringkat ke dua untuk tingkat SMA.

#### 5). Angka Partisipasi Murni perkecamatan

Bila dilihat APM di masing-masing kecamatan, untuk kelompok umur 7-12 hampir disemua daerah kecamatan sudah termasuk baik, dengan angka partisipasi lebih dari 100 persen. Berbeda halnya untuk kelompok umur 13-15, APM di masing-masing kecamatan cukup variatif. Masih terdapat daerah-daerah dengan APM rendah mencapai angka dibawah 50 persen. Daerah dengan partisipasi yang rendah adalah Asam Jujuhan yaitu 24, 31 persen, Tiumang 33, 16, dan Padang Laweh dengan tingkat partisipasi 45,30 persen. Sementara APM pada kelompok usia 16-18 memperlihatkan pola yang sangat berbeda, APM Kota Salak, Tiumang, dan Padang Laweh adalah nol persen. Hal ini terkait distribusi sekolah SMA/MA/SMK, untuk ketiga daerah ini belum lagi terdapat sekolah SMA dan sejenisnya. Kecamatan Tiumang dan Padang Laweh

dengan kepadatan penduduknya di atas 80/100 m<sup>2</sup> barangkali perlu dipertimbangkan untuk pembangunan sekolah baru untuk level SMA.

**Tabel 24. Perbandingan APM antar kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011**

No	Kecamatan	Angka Partisipasi Murni		
		SD	SLTP	SLTA
1	Sungai Rumbai	102,45	87,30	94,60
2	Koto Baru	95,59	116,10	133,76
3	Sitiung	102,82	91,22	102,81
4	Pulau Punjung	100,66	101,77	87,01
5	IX Koto	108,58	58,29	35,34
6	Timpeh	98,17	81,04	66,02
7	Koto Salak	105,16	69,66	0,00
8	Tiumang	109,83	33,16	0,00
9	Padang Laweh	92,54	45,30	0,00
10	Asam Jujuhan	82,30	24,31	11,53
11	Koto Besar	110,91	71,21	15,34
<b>Dharmasraya</b>		101,34	84,41	71,43

Sumber : Pengolahan data sekunder tahun 2011

### c. Kesehatan

Harapan bangsa yaitu dapat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang sehat jasmani dan rohani. Upaya peningkatan derajat kesehatan penduduk sangat penting dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, agar seluruh penduduk dapat menikmati hidup sehat. Peningkatan derajat kesehatan harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Derajat kesehatan yang lebih baik merupakan investasi modal manusia dalam meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan di bidang kesehatan juga menekankan pentingnya peningkatan perilaku hidup sehat dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Upaya kesehatan sedapat mungkin dilakukan sejak dini bahkan sejak masih dalam kandungan, karena masalah kesehatan dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Berikut ini dipaparkan tentang berbagai indikator kesehatan yang terdapat di kabupaten Dharmasraya, baik terkait dengan sarana prasarana, maupun kualitas kesehatan masyarakat.

#### a) **Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas kedepan adalah memperkuat system kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

**Tabel 25: Angka Kematian Bayi Kabupaten Dharmasraya Per 1000 KH**

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Target MDGs 2015
AKB	19	25	25	23	16	17	22	23 per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat, disamping AKI dan angka harapan hidup. Berdasarkan data AKB tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi di daerah Dharmasraya mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2006 dan 2007 berada diatas angka target MDGs. Namun untuk tahun 2008 AKB Dharmasraya persis sama dengan target MDGs. Sedangkan pada tahun 2005, 2009, 2010 dan 2011 menunjukkan angka yang lebih rendah.

**Tabel 26: Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.**

Kota		Kematian Bayi	Lahir Hidup	AKB	Peringkat Kab & Kota	Peringkat Kabupaten
<b>Kota</b>						
1	Padang	65	15.444	4,21	6	
2	Solok	8	659	12,14	17	
3	Sawahlunto	12	1.073	11,18	16	
4	Padang Panjang	17	3.634	4,68	8	
5	Bukittinggi	0	1.973	0,00	1	
6	Payakumbuh	0	1.985	0,00	1	
7	Pariaman	6	1.122	5,35	11	
<b>Kabupaten</b>						
1	Kep.Mentawai	3	2.127	1,41	4	2
2	Pesisir Selatan	81	666	121,62	19	12
3	Solok	25	2.284	10,95	15	10
4	Sijunjung	34	3.539	9,61	14	9
5	Tanah Datar	25	5.290	4,73	9	5
6	Padang Pariaman	3	6.746	0,44	3	1
7	Agam	22	7.662	2,87	5	3
8	50 Kota	19	4.193	4,53	7	4
9	Pasaman	26	4.899	5,31	10	6
10	Solok Selatan	11	1.445	7,61	12	7
<b>11</b>	<b>Dharmasraya</b>	<b>11</b>	<b>1.173</b>	<b>9,38</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
12	Pasaman Barat	47	3.693	12,73	18	11

**b) Angka Kematian Ibu**

Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian.

**Tabel 27: Angka Kematian Ibu Kabupaten Dharmasraya Per 100.000 KH**

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Target MDGs 2015
AKI	311	292	292	257	249	174	111	102 per 1000 LH

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat, disamping AKB dan angka harapan hidup. Berdasarkan data AKI tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu di daerah Dharmasraya terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada setiap tahun, namun angka terakhir (2011) masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka target MDGs 2015.

Angka kematian ibu tahun 2005 hingga 2011 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan target MDGs 2015 yaitu pada level 102 per 100.000 kelahiran hidup. Masih tingginya angka kematian bayi bisa terjadi karena jumlah anak yang besar, jarak kelahiran yang pendek maupun terkait dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan ibu tentang peningkatan gizi keluarga. Atau bisa terkait dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat yang dapat mendukung upaya peningkatan gizi keluarga, terutama gizi ibu hamil.

Dengan demikian, sebagaimana disebutkan di atas program kebijakan penduduk perlu bertumpu pada upaya menurunkan angka fertilitas. Upaya menurunkan angka kematian ibu perlu didukung dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan *unmet need* yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

### c) Angka Kematian Bayi dan Balita serta Gizi Buruk per Puskesmas

Angka kematian balita pada tahun 2011 per puskesmas tercatat 30 dari 3.611 kelahiran. Jumlah penderita gizi buruk tercatat perpuskesmas sebanyak 717 orang dan gizi kurang sebanyak 1.877 orang dari 15.469 yang ditimbang.

Peserta KB aktif di Kabupaten Dharmasraya 4.480 orang dari 15.469 orang pasangan usia subur (14,5%).

**Tabel 28: Angka Kelahiran Kabupaten Dharmasraya per Puskesmas Tahun 2011**

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Jumlah Kelahiran								
			Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
			Hidup	Mati	Total	Hidup	Mati	Total	Hidup	Mati	Total
1	IX Koto	Silago	59	0	59	53	0	53	112	0	112
2	Pulau Punjung	Sialang	105	1	106	109	0	109	214	1	215
		Sungai Dareh	261	3	264	197	2	199	458	5	463
3	Sitiung	Gunung Medan	98	0	98	95	0	95	193	0	193
		Sitiung I	120	2	122	94	0	94	214	2	216
4	Timpeh	Timpeh	108	2	110	106	2	108	214	4	218
5	Padang Laweh	Padang Laweh	70	1	71	29	1	30	99	2	101
6	Koto Baru	Koto Baru	337	3	340	330	3	333	667	6	673
7	Koto Salak	Koto Salak	105	0	105	132	2	134	237	2	239
8	Koto Besar	Koto Besar	261	2	263	220	0	220	481	2	483
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	305	3	308	177	3	180	482	6	488
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	100	0	100	110	0	110	210	0	210
Jumlah			1.929	17	1.946	1.652	13	1.665	3.581	30	3.611

**Tabel 29: Angka Kematian di Kabupaten Dharmasraya per Puskesmas Tahun 2011**

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Jumlah Kematian								
			Laki-Laki			Perempuan			Total		
			Bayi	Anak Balita	Balita	Bayi	Anak Balita	Balita	Bayi	Anak Balita	Balita
1	IX Koto	Silago			0	0	0	0	0	0	0
2	Pulau Punjung	Sialang			0	0	0	0	0	0	0
		Sungai Dareh	2	1	3	1	1	2	3	2	5
3	Sitiung	Gunung Medan	1		1	1	0	1	2	0	2
		Sitiung I	1	1	2	0	0	0	1	1	2
4	Timpeh	Timpeh		3	3	0	0	0	0	3	3
5	Padang Laweh	Padang Laweh			0	0	0	0	0	0	0
6	Koto Baru	Koto Baru	4	1	5	3	1	4	7	2	9
7	Koto Salak	Koto Salak			0	1	0	1	1	0	1
8	Koto Besar	Koto Besar	4	1	5	1	1	2	5	2	7
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1	1	2	0	0	0	1	1	2
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau			0	1	0	1	1	0	1

**Tabel 30: Jumlah Penderita Gizi Buruk per Puskesmas Tahun 2011**

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Gizi Buruk	
			Jumlah	%
1	IX Koto	Silago	53	6,13
2	Pulau Punjung	Sialang	42	5,72
		Sungai Dareh	108	6,14
3	Sitiung	Gunung Medan	41	4,66
		Sitiung I	23	2,07
4	Timpeh	Timpeh	33	3,25
5	Padang Laweh	Padang Laweh	13	2,75
6	Koto Baru	Koto Baru	182	5,69
7	Koto Salak	Koto Salak	47	5,77
8	Koto Besar	Koto Besar	95	5,44
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	42	2,49
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	38	3,19
Jumlah			717	4,64

**Tabel 31: Status Gizi Balita Menurut Jenis kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten/Kota Dharmasraya Tahun 2011**

No	Kecamatan	Puskesmas	Balita				
			Balita Ditimbang	Gizi Lebih	Gizi Baik	Gizi Kurang	Gizi Buruk
1	IX Koto	Silagi	864	16	0	228	53
2	Pulau Punjung	Sialang	734	10	0	147	42
		Sungai Dareh	1.758	62	0	352	108
3	Sitiung	Gunung Medan	880	22	0	158	41
		Sitiung I	1.110	13	0	235	23
4	Timpeh	Timpeh	1.016	18	0	212	33
5	Padang Laweh	Padang Laweh	472	9	0	110	13
6	Koto Baru	Koto Baru	3.200	47	0	659	182
7	Koto Salak	Sitiung II	814	17	0	134	47
8	Koto Besar	Koto Besar	1.747	47	0	312	95
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1.684	55	0	207	42
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	1.190	25	0	123	38
Jumlah			15.469	341	0	1.877	717

**Tabel 32: Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota Dharmasraya Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Pus*	Peserta KB Baru		Peserta KB Aktif	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pulau Punjung	Sungai Dareh	3.951	263	6,7	676	17,1
		Sialang	1.807	389	21,5	389	21,5
2	IX Koto	Silago	1.180	676	57,3	263	22,3
3	Timpeh	Timpeh	2.166	364	16,8	498	23,0
4	Sitiung	Sitiung I	2.060	48	2,3	48	2,3
		Gunung Medan	1.657	498	30,1	364	22,0
5	koto baru	Koto Baru	6.404	292	4,6	928	14,5
6	Padang laweh	Padang Laweh	864	928	107,4	292	33,8
7	Koto Salak	Sitiung II	2.423	46	1,9	46	1,9
8	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	2.903	126	4,3	749	25,8
9	Asam jujuhan	Sungai Limau	1.697	749	44,1	101	6,0
10	Koto besar	Koto Besar	3.679	101	2,7	126	3,4
Jumlah			30.791	4.480	14,5	4.480	14,5

Catatan: \* PUS (Pasangan Usia Subur)

**Tabel 33: Capaian Program Dinas Kesehatan Tahun 2005-2010**

No	Indikator	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
		Capaian	%	Capaian	%								
1	Jumlah Kematian Bayi (per seribu kelahiran hidup)	50	17	46	14	87	26	79	23	59	17,9	56	13,6
2	Jumlah Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	11	366	4	120	10	296	9	257	9	273,8	6	145
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	44	17	53	22	55	22	88	42	186	102,2	156	81,5

#### d) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) yang menunjukkan usia rata-rata harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya antara tahun 2007 – 2010 meningkat dari 65,3 tahun menjadi 66,0 tahun. Meskipun terdapat sedikit kenaikan tetapi masih dibawah AHH Sumbar pada tahun 2007 - 2010 yaitu tercatat 68,81 tahun dan 69,5 tahun

#### f. Fokus Seni Budaya

Kabupaten Dharmasraya memiliki jejak kekayaan budaya sejak abad ke 14. Dalam masa sekarang berkembang keragaman budaya terutama Minangkabau dan Jawa. Peninggalan budaya berupa bangunan seperti beberapa candi pada situs kawasan perkembangan kerajaan Dharmasraya dan empat rumah gadang kerajaan. Seni budaya yang menonjol yang telah berkembang seperti batik tanah liat. Selain itu masih hidup berbagai kesenian tradisional yang masih dipentaskan pada hari perayaan tertentu.

## g. Fokus Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan pemuda seperti kegiatan organisasi kepemudaan dalam hal kepemimpinan, kewirausahaan, dan ketrampilan. Selain itu terkait juga dengan berbagai upaya untuk mengatasi dampak negatif dari perilaku. Berbagai hal telah dilakukan untuk pengembangan kegiatan kepemudaan. Tetapi masih dibutuhkan berbagai kegiatan yang mendorong kemandirian dan ketrampilan usaha bagi pemuda.

Belum terdapat sarana olah raga tingkat kabupaten yang minimal memenuhi standar untuk melangsungkan kegiatan olahraga yang populer seperti sepak bola, basket atau voli sehingga bisa menampung event kejuaraan di Kabupaten Dharmasraya. Perkembangan prestasi olahraga anak-anak, remaja dan pemuda Dharmasraya terkendala dengan kurangnya sarana ini.

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 1) Pendidikan

##### 1). Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengukur jumlah siswa berdasarkan tingkatan usia yang masih bersekolah, capaian APS 7-12 tahun pada tahun 2011 menunjukkan angka melebihi 100. Ini menunjukkan bahwa jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah di Dharmasraya melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, artinya terdapat siswa berusia 7-12 tahun yang bersekolah di Kabupaten Dharmasraya berasal dari luar daerah Kabupaten Dharmasraya

**Tabel 34: Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012**

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	<b>APS 7-12 Tahun</b>	<b>104,41</b>
	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun	25.567
	Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun	24.487
2	<b>APS 13-15 Tahun</b>	<b>84,74</b>
	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun	9.073
	Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun	10.707
3	<b>APS 16-18 Tahun</b>	<b>55,33</b>
	Jumlah siswa usia 16-18 Tahun	5.004
	Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun	9.044

## 2). Rasio Murid Per Guru

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid per guru dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Jika rasio tinggi, berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Sebagaimana dinyatakan dalam indikator rasio murid per guru dapat ditunjukkan keefektifan seorang guru dibanding dengan jumlah siswa yang dilayani.

Sesuai dengan angka pada tabel 21 ditunjukkan berbagai indikasi pada setiap kecamatan sebagai berikut: (a) untuk tingkat SD dua rasio tertinggi adalah di Sungai Rumbai (18) dan Koto Besar (17). Sementara rasio terendah berada IX Koto (9), (b) untuk tingkat SMP rasio guru tertinggi berada di Sungai Rumbai (14) dan terendah di Tiumang (5), dan (c) untuk tingkat SMA/MA rasio guru tertinggi juga terdapat di Sungai Rumbai (10), dan untuk SMA terdapat kecamatan dengan rasio guru nol. Artinya pada daerah tersebut belum tersedia sekolah SMA dan sejenisnya.

**Tabel 35: Rasio Murid Per Guru di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010**

No	Kecamatan	Siswa Per Guru		
		SD+MI	SMP+MTs	SMA+SMK+MA
1	Sungai Rumbai	18	14	10
2	Koto Besar	17	11	7
3	Asam Jujuhan	14	11	-
4	Koto Baru	14	10	9
5	Koto Salak	12	10	-
6	Tiumang	11	5	-
7	Padang Laweh	13	8	-
8	Sitiung	14	8	8
9	Timpeh	14	7	9
10	Pulau Punjung	13	11	8
11	IX Koto	9	8	-
<b>Dharmasraya</b>		<b>14</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Dari penjelasan rasio guru per kecamatan di atas terlihat bahwa kecukupan guru untuk pendidikan dasar dan menengah secara relatif sudah memadai, walau ada indikasi bahwa di wilayah tertentu seorang guru hanya melayani sedikit siswa atau rata-rata kurang dari 10 orang. Angka ini menggambarkan kurang efisiennya praktek pembelajaran, karena guru "lebih banyak" dibanding dengan siswa yang harus dilayani. Sementara itu, ada beberapa daerah kecamatan di Dharmasraya belum tersedia sekolah untuk jenjang SMA/MA yaitu: IX Koto, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh dan Asam Jujuhan.

### 3). Rasio Kelas Per-Guru

Rasio Kelas per Guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah kelas dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Kegunaannya adalah untuk mengetahui kekurangan/kelebihan guru yang mengajar di kelas pada suatu daerah tertentu. Makin tinggi nilai rasio, berarti makin banyak pula jumlah kelas yang harus diisi pelajaran oleh guru dan ini berarti juga konsentrasi mengajar guru makin terpecah.

**Tabel 36. Rasio Kelas Per Guru di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Rasio Kelas Per Guru		
		SD	SLTP	SLTA
1	Sungai Rumbai	0,52	0,45	0,30
2	Koto Besar	0,59	0,51	0,27
3	Asam Jujuhan	0,56	0,60	
4	Koto Baru	0,55	0,33	0,29
5	Koto Salak	0,55	0,41	
6	Tiumang	0,54	0,34	
7	Padang Laweh	0,51	0,38	
8	Sitiung	0,61	0,31	0,28
9	Timpeh	0,59	0,43	0,29
10	Pulau Punjung	0,48	0,47	0,30
11	IX Koto	0,61	0,36	
<b>Dharmasraya</b>		<b>0,55</b>	<b>0,40</b>	<b>0,29</b>

### 4). Rasio Guru per Sekolah

Rasio Tenaga pengajar per Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu.

**Tabel 37. Rasio Guru Per Sekolah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Rasio Guru Per Sekolah		
		SD	SLTP	SLTA
1	Sungai Rumbai	16,67	21,33	39,50
2	Koto Besar	12,76	17,75	22,00
3	Asam Jujuhan	12,25	10,00	-
4	Koto Baru	14,65	26,88	37,00
5	Koto Salak	12,38	24,50	-
6	Tiumang	11,31	17,50	-
7	Padang Laweh	13,75	13,00	-
8	Sitiung	11,80	21,29	25,00
9	Timpeh	12,17	17,20	20,50
10	Pulau Punjung	15,54	19,90	33,00
11	IX Koto	10,54	11,00	-
<b>Dharmasraya</b>		<b>13,13</b>	<b>20,09</b>	<b>31,23</b>

Di kabupaten Dharmasraya untuk tingkat SD, rata-rata rasio guru per sekolah adalah 13,07 dengan rasio terendah ada di Kecamatan IX Koto. Rata-rata dalam satu sekolah hanya terdapat 10 orang guru. Sedangkan rasio tertinggi terdapat

pada kecamatan Sungai Rumbai, dimana dalam satu sekolah rata-rata terdapat hampir 17 orang guru. Namun keadaan di atas tidak jauh berbeda dengan keadaan di SMP dimana rata-rata dalam satu sekolah terdapat 13 orang guru. Berbeda dengan keadaan di SMA, rata-rata dalam satu sekolah di kabupaten Dharmasraya terdapat 20 orang guru.

Berdasarkan sebaran data di atas dapat disimpulkan bahwa, pencapaian indikator sosial terkait dengan potensi pendidikan secara umum sudah termasuk tinggi, dan potensi tersebut perlu dipertahankan dengan selalu meningkat pembangunan dalam bidang pendidikan seperti memperhatikan pemerataan jumlah guru berdasarkan bidang studi yang ada, memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa pada kelas ekonomi rendah, beasiswa pengembangan bakat minat. Prioritas pembangunan pendidikan juga perlu diprioritaskan pada daerah-daerah dengan capaian potensi pendidikan agak tertinggal dibanding daerah kecamatan lainnya di Dharmasraya, yaitu kecamatan IX Koto, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh dan Asam Jujuhan. Selain itu, agar orientasi pembangunan berjalan dengan baik perlu dilakukan pendataan indikator pendidikan termasuk enrollment ratio secara lebih baik dan terpercaya.

## 2) Kesehatan

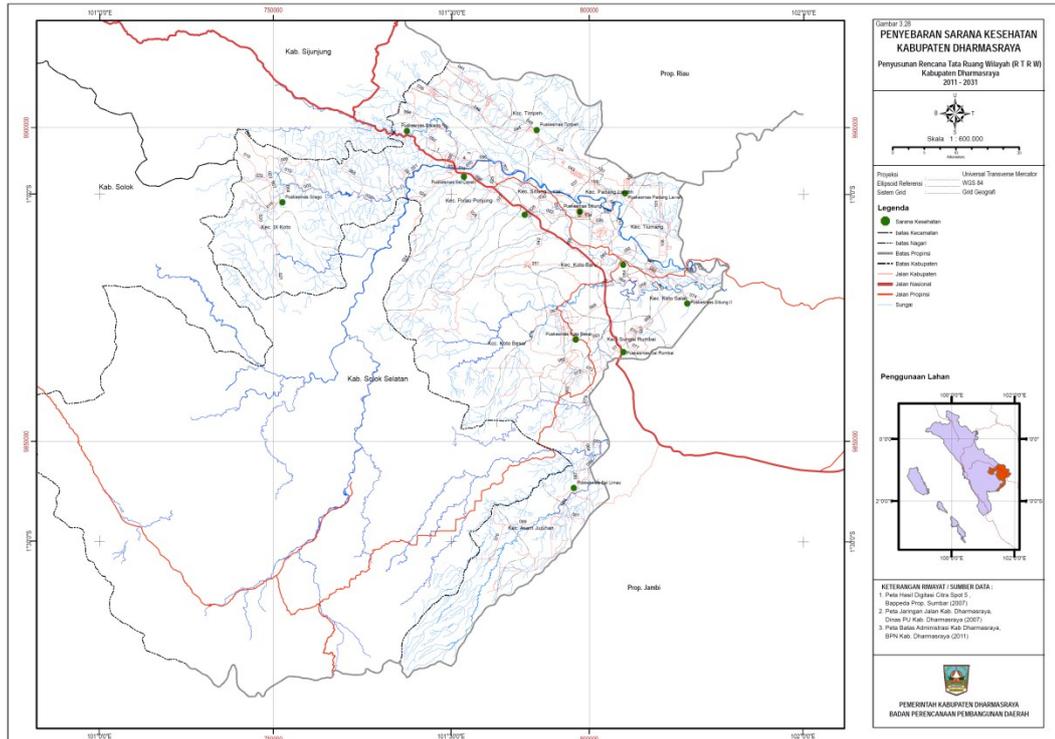
Sarana kesehatan yang ada meliputi RSUD, Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas Pembantu. Saat ini terdapat 2 unit rumah sakit yaitu RSUD Sungai Dareh dan Rumah Sakit Rujukan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Jumlah puskesmas yang tersedia adalah sebanyak 12 unit, setiap kecamatan rata-rata memiliki 1 puskesmas kecuali untuk kecamatan Pulau Punjung dan Sitiung masing-masing terdapat dua puskesmas. Sementara di kecamatan Tiumang tidak terdapat puskesmas yang dapat melayani penduduk.

**Tabel 38: Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011**

No	Kecamatan	Sarana Kesehatan (unit)					
		RSU	Puskesmas	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu	Balai Pengobatan	Rumah Bersalin
1	Sungai Rumbai	-	1	1	7	1	3
2	Koto Besar	-	1	-	2		
3	Asam Jujuhan	-	1	1	-		
4	Koto Baru	-	1	1	5	1	
5	Koto Salak	-	1	1	5		
6	Tiumang	-	-	-	7		
7	Padang Laweh	-	1	1	2		
8	Sitiung	-	2	2	6	1	
9	Timpeh	-	1	1	4	1	
10	Pulau Punjung	2	2	1	4	3	1
11	IX Koto	-	1	1	3		
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2012

**Gambar 13 : Sebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya**



Jumlah dokter spesialis di kabupaten Dharmasraya sebanyak 6 orang sudah secara standar minimal mencukupi jika dibandingkan dengan standar rasio dokter spesialis per penduduk berdasarkan peraturan menteri kesehatan 2010 yaitu 3 dokter per 100.000 penduduk. Selain itu jumlah dokter umum sebanyak 64 orang dengan rasio 31,9 dokter per 100.000 Untuk itu, dengan jumlah penduduk Dharmasraya 191.000 jiwa, masih perlu ditambahkan jumlah dokter umum agar kebutuhan dokter dapat tercukupi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 40 dokter per 100.000. Selanjutnya jumlah dokter gigi di Dharmasraya 21 orang dengan rasio sebesar 10,1 per 100.000 penduduk. Angka ini tidak jauh berbeda dengan angka standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 11 orang per 100.000.

**Tabel 39: Distribusi Tenaga Medis, Keperawatan dan Bidan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011.**

No	Wilayah	Unit Kerja	Dokter			Pera- wat	Bidan
			Spesialis	Umum	Gigi		
1	Kab.Dharmasraya	Rumah Sakit	6	11	2	70	21
2	Kab.Dharmasraya	Dinas Kesehatan	0	1	1	14	5
3	Kec.IX Koto	Puskesmas Silago	0	5	1	14	26
4	Kec.Pulau Punjung	Puskesmas Sialang	0	2	1	12	21
		Puskesmas S. Dareh	0	3	2	9	12
5	Kec.Sitiung	Puskesmas Gunung Medan	0	5	2	12	27
		Puskesmas Sitiung I	0	6	1	22	23
6	Kec.Timpeh	Puskesmas Timpeh	0	4	1	13	18
7	Kec.Padang Laweh	Puskesmas Padang Laweh	0	9	3	41	42
8	Kec.Koto Baru	Puskesmas Koto Baru	0	2	1	5	19
9	Kec.Koto Salak	Puskesmas Koto Salak	0	3	1	12	21

No	Wilayah	Unit Kerja	Dokter			Perawat	Bidan
			Spesialis	Umum	Gigi		
10	Kec.Koto Besar	Puskesmas Koto Besar	0	8	2	22	23
11	Kec.Sungai Rumbai	Puskesmas S.Rumbai	0	2	2	7	9
12	Kec.Asam Jujuhan	Puskesmas S. Limau	0	3	1	8	18
<b>Total</b>			<b>6</b>	<b>64</b>	<b>21</b>	<b>300</b>	<b>278</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2012

Selanjutnya untuk tenaga keperawatan, rasio tenaga perawat yang tersedia sebanyak 131 per 100.000 penduduk, dimana standar kecukupan yang harus dicapai hanya 117,5 orang per 100.000. Dengan demikian, tidak perlu ada penambahan jumlah perawat. Demikian juga tenaga bidan, di Dharmasraya terdapat 142 bidan per 100.000 penduduk. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan angka kebutuhan bidan, yaitu 100 orang per 100.000 penduduk. Artinya jumlah bidan di Dharmasraya sudah lebih banyak dibanding dengan kebutuhan yang ada.

### 3) Pekerjaan Umum

#### **Prasarana Air Minum**

Proporsi pelayanan air minum BPAM Kabupaten Dharmasraya hanya 0,67% paling sedikit di Sumbar jauh dibawah rata-rata pelayanan 15,95%. Sementara sumber air minum kemasan isi ulang dilevel kabupaten tertinggi bersama Sijunjung dan Pasaman Barat. Terlihat bahwa pada sentra perkebunan kebutuhan air minum menjadi masalah daerah. Dari indikator lain, sumber air minum dengan pompa menjadi tertinggi di Sumbar (18,96%) sementara Sijunjung (1,78%) dan Pasaman Barat (1,83%). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan air minum di Kabupaten Dharmasraya masih jauh dibawah pelayanan penyediaan.

Berdasarkan data 2010, 53,52% RT telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan : 49,18% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan dan 55,75% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan.

BPAM (Badan Pengelolaan Air Minum) baru mampu melayani sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebanyak 132 pelanggan. Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki instalasi pengolahan air (WTP) sebanyak 5 Unit. Beberapa sumber air baku yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: Sungai Batang Siat; Sungai Batang Momong; Sungai Batang Pauh; Sungai Batang Siraho; Sungai Betung; dan Sungai Batang Timpeh.

#### **Sanitasi Lingkungan**

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya menggunakan WC sendiri sebagai fasilitas buang air besar/kecil yaitu sebesar 68%, sedangkan 10% RT memakai jamban bersama dan 2% RT yang menggunakan jamban umum, sementara 20% sisanya masih belum memiliki jamban sendiri. bahwa hanya 57,42% rumah tangga yang memiliki septic tank (SPAL), sedangkan sisanya memanfaatkan sungai ataupun tempat

---

lain sebagai saluran akhir pembuangan air limbahnya. 42,58% rumah tangga (19.769 Rumah Tangga) belum memiliki sistem pembuangan air limbah yang layak.

Status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan indikator target 7C pada tahun 2010 berdasarkan jumlah Rumah Tangga (RT) adalah sebagai berikut:

1. 53,52% RT telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan :
  - a. 49,18% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan;
  - b. 55,75% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan.
2. 44,21% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:
  - a. 21,76% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan;
  - b. 57,31% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perdesaan.

Meskipun SPAL tinja mencapai 57,42% (tertinggi kedua di kabupaten setelah Agam) tetapi proporsi pembuangan lubang tanah 20,27% tertinggi di Sumbar (Susenas, 2010). Sementara Sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum tersedia.

Meskipun Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki TPA, tetapi dalam belum bisa dioperasikan secara maksimal, karena keterbatasan dan masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA seperti : Belum memadainya jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) kontainer, gerobak, kendaraan pengangkut sampah, dump truck dan Belum tersedianya alat-alat berat yang dibutuhkan (seperti Buldozer, loader), dan jembatan timbang

### **Prasarana Transportasi**

Sejak pemekaran tahun 2004 sampai tahun 2011 telah terjadi pembangunan akses yang cukup berarti. Panjang jalan aspal kabupaten tahun 2011 yaitu 432,75 km atau telah bertambah 133,70 km (43,26%) sejak tahun 2004. Akan tetapi masih perlu dilakukan terus pembangunan dan peningkatan jaringan jalan.

Untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dimasa depan beberapa akses utama yang telah direncanakan dikembangkan yaitu (RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031):

- Pengembangan ruas jalan lingkar utara dengan tiga titik keluar menuju kawasan timur Pulau Sumatera. Ruas jalan yang dikembangkan sebagai akses regional menuju koridor timur Pulau Sumatera tersebut yaitu ruas jalan yang menghubungkan Sungai Rumbai – Ampalu – Sungai Langkok - Padang Laweh – Timpeh - Kamang Baru.

- Pengembangan ruas jalan lingkaran selatan dengan fungsi lokal primer yang menghubungkan: Sungai Rumbai – Koto Besar - Bukit Gadiang – Aur Jaya - Bukit Mindawa) – Sungai Dareh.
- Pengembangan ruas jalan lingkaran Sungai Batanghari dengan membangun jalan sisi Sungai Batanghari sebagai akses menuju rencana kawasan strategis kawasan agroindustri terpadu dan kawasan bersejarah Siguntur sekaligus meningkatkan akses menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung menghubungkan: Kampung Surau – Lubuk Bulang - Siluluak- Sungai Langsek –Pulau Tengah Sitiung - Pulau- Bukit Tujuh.
- Pengembangan ruas jalan dengan kabupaten berbatasan yang menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten berbatasan diarah barat yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci serta pengembangan akses diarah utara dengan Kabupaten Sijunjung.
- Pengembangan ruas jalan menuju pusat-pusat kegiatan kabupaten untuk memudahkan akses menuju pusat kegiatan pelayanan kabupaten, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan.

Sementara sarana terminal yang dibangun sesuai standar fisik fungsi terminal belum tersedia di Kabupaten Dharmasraya.

#### Prasarana Sumberdaya Air



Sumberdaya air untuk keperluan pengairan lahan sawah di Kabupaten Dharmasraya cukup besar. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha dengan debit 25 m<sup>3</sup>/dt dan memanfaatkan lebih kurang 11 m<sup>3</sup>. Selain itu terdapat DI yang dikelola kabupaten pada lahan lebih kurang 3.500 Ha yang memerlukan peningkatan pengairan. Irigasi teknis di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.155 Ha (55,56%), setengah teknis 1.421 Ha (15,32%), sementara irigasi sederhana, non PU, dan tandah hujan seluas 2.702 Ha (29,13%).

Luas sawah berdasarkan tipe pengairan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 40: Tipe pengairan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Tipe Pengairan	Total Luas	
		Ha	%
1	Teknis	5.155	55,56%
2	Setengah teknis	1.421	15,32%
3	Sederhana	333	3,59%
4	Irigasi non PU	612	6,60%
5	Tadah hujan	1.757	18,94%
6	Luas Total	9.278	100,00%

Sumber: Kabupaten dalam Angka Tahun 2011

---

Pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan masih terdapat potensi ekstensifikasi lahan selanjutnya dalam jangka panjang seluas 3.276 Ha.

#### **Prasarana Kawasan Permukiman dan Perumahan**

Kantong-kantong kawasan kumuh atau tidak layak huni yaitu kawasan permukiman dan perumahan yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur lingkungan memadai terdapat pada kawasan permukiman padat yang dihuni penduduk berpenghasilan rendah terutama di Sungai Rumbai, Koto Baru dan Pulau Punjung.

#### **4) Penataan Ruang**

Penataan ruang merupakan upaya merencanakan, memanfaatkan dan pengendalian tata ruang. Aspek pengendalian tata ruang yang terdiri atas perijinan, pengawasan dan sanksi merupakan aspek penting dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Kecenderungan alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan serta pengendalian kegiatan pertambangan liar terjadi di Kabupaten Dharmasraya.

#### **5) Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan dilakukan bertahap mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, penyusunan RKPD dan terakhir berupa penganggaran kegiatan dalam APBD. Perencanaan pembangunan seringkali memiliki kendala dalam menyaring dan menentukan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dana yang tersedia sehingga transparansi kegiatan yang dianggarkan dari semua usulan sulit dilakukan. Kendala penentuan prioritas kegiatan juga disebabkan format usulan kurang menggambarkan urgensi dan dampak dari usulan kegiatan. Hal ini disebabkan kurang tersedianya data dan informasi yang terstruktur, lengkap dan akurat ditingkat nagari sebagai dasar perencanaan.

#### **6) Lingkungan Hidup**

Perkembangan kegiatan pertambangan menjadi penyebab utama pencemaran air sungai. Baku mutu air raksa terdeteksi telah dilewati terutama oleh sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

#### **7) Pertanahan**

Berdasarkan status lahan, kepemilikan atau penguasaan lahan di Kabupaten Dharmasraya beragam dan menyangkut area yang luas. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat kawasan pertambangan, kawasan perkebunan besar, kawasan hutan, kawasan transmigrasi, dan lahan yang dimiliki pemerintah untuk pengembangan fasilitas. Aspek pertanahan dalam pengertian luas terkait dengan informasi status lahan oleh berbagai instansi yang berwenang mengeluarkan perijinan. Untuk itu dibutuhkan administrasi pertanahan yang

andal dengan sistem informasi pertanahan yang mampu mengkoordinasikan data pertanahan lintas instansi yang mengurus aspek status lahan. Dengan sistem informasi yang baik dapat dicegah tumpang tindih status lahan dan konflik pertanahan dapat diidentifikasi dari awal. Sertifikasi lahan sebagai program nasional yang menjamin kepastian terhadap lahan masih perlu ditingkatkan pencapaiannya.

#### 8) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Sosial

Angka fertilitas perempuan usia subur di Kabupaten Dharmasraya tinggi. Sementara ketimpangan gender terlihat dari indikator berikut:

- Angka partisipasi sekolah penduduk laki-laki lebih besar dibanding penduduk perempuan.
- sementara angka mengulang dan angka putus sekolah tingkat SD dan SMP anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Untuk tingkat SMA angka tersebut relatif sama.

#### 9) Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih apabila disertai dengan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

Perekonomian di Kabupaten Dharmasraya masih didominasi oleh sektor pertanian, maka penyerapan tenaga kerja terbesar juga berada di sektor ini. Tabel dibawah ini menjelaskan perkembangan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Dharmasraya. Dari Tahun 2009 sampai tahun 2011, angka daya serap tenaga kerja di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan angka yang sangat bagus artinya tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya sangat rendah. Pada tahun 2011 rasio penyerapan angkatan kerja sebesar 93,35% artinya hanya 6,62% angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya yang menganggur, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio penyerapan tenaga kerja Sumatera Barat yang hanya 66,19%.

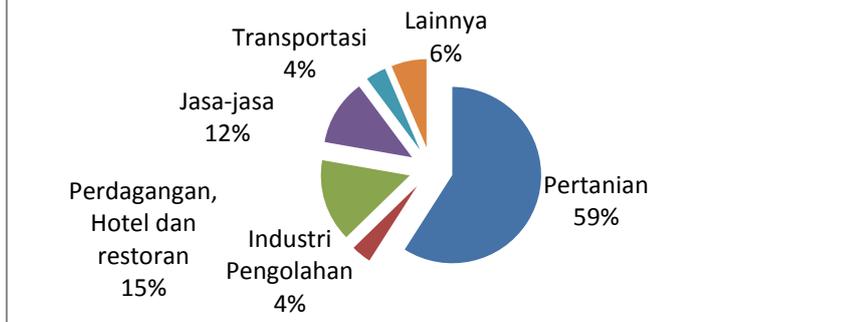
**Tabel 41: Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dharmasraya**

Lapangan Usaha	Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja		
	2009	2010	2011
Pertanian	55,133	55,013	50,015
Industri Pengolahan	4,480	3,745	3,105
Perdagangan, Hotel dan restoran	6,465	12,796	12,822
Jasa-jasa	6,329	8,611	10,239
Transportasi	1,357	1,864	3,149
Lainnya	4,054	5,390	5,447
Total	77,818	87,419	84,777
Jumlah Angkatan Kerja	83,339	90,963	90,816
Daya Serap Tenaga Kerja (%)	93.38	96.10	93.35
Daya Serap Tenaga Kerja Sumatera Barat (%)	64.19	60.36	66.19

Sumber: Sumbar Dalam Angka dan DDA berbagai tahun edisi

Apabila diperhatikan gambar dibawah ini, maka pada tahun 2011 sebagian besar tenaga kerja yang ada di Kabupaten Dharmasraya masih bekerja di lapangan usaha pertanian yaitu sebanyak 59%. Hal ini terkait dengan realita yang ada di Kabupaten Dharmasraya bahwa memang sector pertanian khususnya tanaman perkebunan mendominasi perekonomian.

**Gambar 14: Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011**



## 10) Penanaman Modal

Investasi (pembentukan modal tetap bruto) Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu setelah pemekaran wilayah yaitu tahun 2004 sampai 2011 meningkat dari 193,20 Milyar menjadi 312,04 Milyar atau meningkat 162%. Rata-rata laju pertumbuhan investasi yaitu 7,09%/tahun. Jumlah investasi ini yang ditanamkan ini cukup tinggi.

Kecenderungan investasi yang terjadi dilakukan oleh institusi rumah tangga dan BUMD/N Swasta dengan proporsi yang berimbang 45,38% dan 42,22%. Sementara investasi dilakukan oleh pemerintah hanya 12,40%. Hal ini memperlihatkan bahwa peran masyarakat dan swasta sangat besar.

Koefisien ICOR yang tinggi, nilai tambah dari investasi yang masih rendah dan sinergi antara perusahaan besar dengan pemerintah daerah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanaman modal. Pengembangan investasi perlu difokuskan pada investasi yang memberikan nilai tambah besar dengan nilai koefisien ICOR terkecil seperti pertambangan, pertanian dan jasa, Pembuatan pabrik pengolahan yang dikelola oleh pemerintah atau kemitraan masyarakat, pemerintah dan swasta perlu dilakukan. Penguasaan yang besar terhadap sektor hilir (pabrik pengolahan) berpotensi menimbulkan konflik harga dan pemasaran dan pada akhirnya nilai tambah dari investasi yang ditanamkan tidak dinikmati masyarakat secara penuh. Selain itu perlu merangsang tumbuh kembangnya usaha ekonomi rakyat berskala kecil terkait dengan meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian.

---

## 11) Kebudayaan

Upaya dibidang kebudayaan terkait dengan pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya pada situs bekas kerajaan Dharmasraya dan site empat bangunan rumah gadang kerajaan yang tersebar di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu upaya pengembangan atraksi seni budaya yang menonjol dan pengembangan produk unggulan seperti batik tanah liat yang menjadi ciri khas daerah yang selama ini telah dilakukan menjadi fokus pengembangan dimasa depan.

## 12) Kepemudaan Dan Olah Raga

Berbagai kegiatan yang mendorong kemandirian pemuda perlu terus ditingkatkan berupa kegiatan kewirausahaan dan ketrampilan. Meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya rendah tetapi upaya pengembangan berbagai usaha ekonomi selain disektor perkebunan bagi mengembangkan berbagai lapangan kerja bagi pemuda diluar sektor perkebunan perlu terus ditingkatkan. Demikian juga kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan kreatifitas pemuda akan berdampak untuk menumbuhkan sikap dan perilaku positif bagi pemuda.

sarana olah raga dan rekreasi adalah sarana pelayanan masyarakat yang penting untuk disediakan. Saat ini di Kabupaten Dharmasraya sedang dibangun stadion olah raga (sport center) berskala Kabupaten yang berfungsi untuk menampung kegiatan olah raga maupun kegiatan publik lainnya. Dalam pengembangan keolahragaan selain sarana juga dibutuhkan pengembangan berbagai kegiatan dan pembinaan olahraga berprestasi untuk pelajar, remaja, dan pemuda.

## 13) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Nagari sebagai unit terendah dalam pengelolaan pembangunan telah memiliki kelengkapan organisasi sebagai unit pengelolaan masyarakat. Selain walinagari terdapat LPM, BAMUS, PAN, dan KAN. Nagari sebagai unit pemerintahan dan sosial ekonomi terendah dalam tahun belakangan ini telah mendapatkan berbagai bantuan program seperti PNPM, kredit mikro nagari, kredit usaha agro pertanian, kredit usaha ekonomi, unit simpan pinjam dan lainnya. Pada tahun belakangan ini terdapat kecenderungan peningkatan peran nagari dari unit administratif menjadi unit sosial ekonomi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Luas lahan sawah eksisting di Kabupaten Dharmasraya yaitu 9.278 Ha yang terdapat di D.I. Batanghari seluas 5.782 Ha dan D.I. yang dikelola kabupaten seluas 3.496 Ha. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas

---

pengairan 18.936 Ha dengan debit 25 m<sup>3</sup>/dt. Pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan masih terdapat potensi ekstensifikasi lahan selanjutnya dalam jangka panjang seluas 3.276 Ha. Dimasa depan masih dimungkinkan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Dharmasraya seluas 4.991 Ha.

Tanaman pangan lain seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan. Budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering berkembang di Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Koto Besar, Kec. Sitiung, Koto Baru, dan Koto Salak.

Pertanian hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran) di Kabupaten Dharmasraya merupakan kegiatan yang belum memiliki peran besar dalam pertanian seperti perkebunan. Tetapi terdapat komoditi lokal seperti manggis, duku atau durian, yang berpeluang untuk dikembangkan.

## 2) Perkebunan



Kabupaten Dharmasraya tercatat sebagai daerah potensi terbesar di Sumbar untuk tanaman karet yaitu 31,23% dari luas lahan budidaya di Sumbar dan kelapa sawit kedua terbesar yaitu 18,83% dari luas lahan budidaya di Sumbar (Sumber: BKPMP tahun 2011).

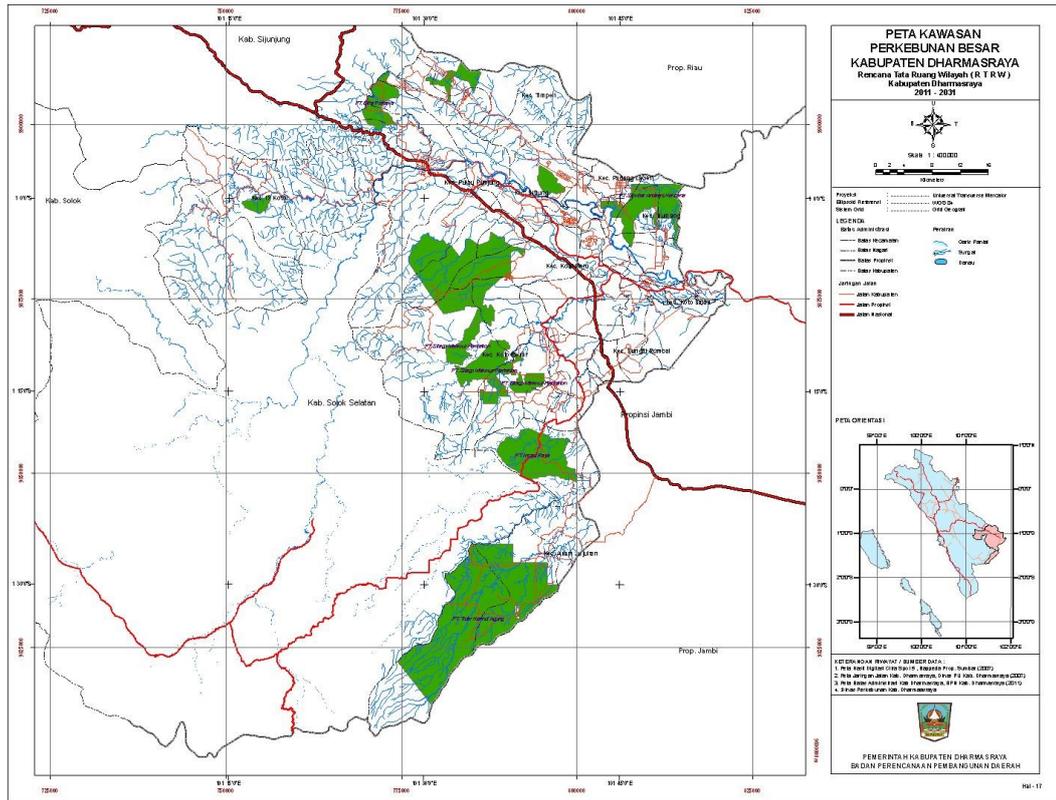
Luas lahan kelapa sawit perkebunan besar 60.374 Ha. Luas kebun kelapa sawit rakyat 29.708 Ha yang terdiri dari kebun produktif 26.381 Ha dan belum produktif 3.327 Ha.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat enam industri CPO yang menampung TBS inti dan plasma serta swakarya, yakni PT. Tidar Kerinci Agung (TKA), PT. Sumber Andalas Kencana (SAK), PT. Incasi Raya, PT. Bina Pratama dan PT Silago Makmur Platation, PT. Dharmasraya Lestarindo dengan total kapasitas produksi 290 ton TBS/jam.

Luas lahan karet perkebunan rakyat 38.359 Ha yang terdiri dari kebun produktif 29.501 Ha; belum produktif 6.871 Ha; dan tidak produktif 2.180 Ha.

Produksi utama perkebunan lainnya di Kabupaten Dharmasraya yaitu kopi dengan luas lahan 461 Ha dan kakao seluas 1.395 Ha.

**Gambar 15 : Kawasan Perkebunan Besar di Kabupaten Dharmasraya**



### 3) Perikanan



Perkembangan sektor perikanan sampai saat ini cukup besar dalam segi produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Produksi perikanan budidaya tercatat 1.555 ton pada lahan budidaya seluas 1.028 Ha yang terdiri atas kolam air tenang dan deras 389 Ha; keramba, keramba jaring apung dan jaring tancap 641 Ha; dan mina padi 24,2 Ha. Sementara produksi ikan perairan umum rawa 1.269 ton; sungai 645 ton; dan telaga 11,74 ton (data 2009). Tenaga kerja yang terlibat: jumlah petani budidaya 2.017 orang; pengolahan 63 orang dan pemasaran 104 orang.

Perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Dharmasraya didukung oleh infrastruktur: 2 unit Balai Benih Ikan (BBI) yang terdapat di Pulau Punjung dan Koto Baru; 11 unit pembenihan rakyat; 5 unit depo; dan 10 unit kolam percontohan. Produksi BBI Kabupaten Dharmasraya ketiga terbesar di Sumbar setelah Pasaman dan Tanah Datar yaitu 16,71%.

Kontribusi perikanan darat budidaya Kabupaten Dharmasraya di Sumbar hanya 1,23%. Besar produksi perikanan urutan kedelapan dari kabupaten di Sumbar diatas Solok Selatan, Solok, Pesisir Selatan dan Mentawai. Produksi terbesar di Sumbar bagian selatan yaitu Kabupaten Sijunjung sebesar 3.912 ton (Sumbar Dalam Angka 2010).

#### 4) Peternakan



Populasi hewan ternak di Kabupaten Dharmasraya tercatat pada tahun 2011 yaitu: sapi 25.773 ekor; kambing 12.683 ekor; kerbau 4.402 ekor; ayam ras 579 ekor; dan itik 32.033 ekor. Populasi hewan ternak selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan. Khusus sapi potong,

jumlah sapi di Kabupaten Dharmasraya 7,88% dari populasi Sumbar. Dengan rumah tangga pemelihara sapi 7.969 maka rata-rata kepemilikan sapi adalah 3,2 ekor per rumah tangga. Penjualan sapi potong hampir seluruhnya didalam kabupaten sendiri (sumber: PSPK Tahun 2011).

#### 5) Kehutanan

Kawasan hutan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK MenHut 304 Tahun 2011 seluas 87.174 Ha (28,91% dari luas kabupaten). Dari seluruh kawasan hutan tersebut, kawasan hutan berfungsi lindung yaitu hutan lindung dan hutan suaka alam/pelestarian alam seluas 17.368 Ha (5,74% dari luas kabupaten).

Sementara itu dilihat dari tutupan vegetasi, luas tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya tercatat tinggal seluas 7.290 Ha. Tetapi dari data ekritisasi lahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlalu besar. Lahan dengan kondisi kritis dan sangat kritis di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.961 Ha (atau 1,98% dari luas wilayah). Lokasi lahan kritis pada kawasan perbukitan terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Silago, dan Koto Besar

**Tabel 42: Luas Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya**

No	Lahan Kritis	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Tidak Kritis	22.6401	74,82
2	Potensial Kritis	51.129	16,90
3	Agak Kritis	17.301	5,72
4	Kritis	4.062	1,34
5	Sangat Kritis	1.897	0,63
6	Tubuh Air	1.809	0,60
<b>Luas Total</b>		302.599	100,00

Sumber : Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL) SWP DAS Batanghari (BPDAS Batanghari Jambi , 2009)



Luas peruntukan pertambangan dalam pola ruang Kabupaten Dharmasraya selain yang telah definitif seluas 2.388 Ha masih bisa bertambah didalam kawasan IUP eksplorasi dan lahan potensi pertambangan lainnya diluar WIUP dalam kawasan seluas 20.917 Ha.

Saat ini terdapat sebanyak 12 perusahaan yang memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Dan Mineral Logam, 10 perusahaan tambang yang aktif dan 2 perusahaan yang tidak aktif (PT. TBN Muaro dan PT. Centra Bara Indonesia). Selain perusahaan tambang batu bara juga terdapat IUP batuan sebanyak 9 perusahaan.

Kawasan IUP terdapat di Kec. Asam Jujuhan, Padang Laweh, Kec. Koto Besar, Kec. Tiumang, Kec. Timpeh, IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, dan Kec. Koto Salak dengan potensi tambang dominan yaitu batu bara dan biji besi. Kawasan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Dharmasraya seperti terlihat dalam tabel.

**Tabel 43: Kawasan Alokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Sumberdaya Pertambangan Lainnya diluar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Dharmasraya Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Ha)
IUP Batubara dan mineral logam		
1	Asam Jujuhan	11.990
2	Padang Laweh	499
3	Tiumang	3.176
4	Timpeh	4.290
	Luas Total	19.955
IUP Batuan		
1	IX Koto	2
2	Pulau Punjung	3,96
3	Sitiung	10,41
4	Koto Salak	4,53
	Luas Total	20,90
Sumberdaya Pertambangan Terukur Lainnya diluar WIUP		
1	Asam Jujuhan	500
2	Padang Laweh	450
3	Timpeh	500
4	IX Koto	125
5	Koto Besar	200
6	Sitiung	310
7	Pulau Punjung	495
8	Koto Baru	250
9	Tiumang	500
	Luas Total	3.330

Sumber : Dinas Energi, Sumberdaya Mineral Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Selain itu terdapat potensi pertambangan rakyat untuk bahan tambang seperti mangan, lempung, batu gamping. Eksploitasi pertambangan rakyat harus terkendali dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).



lingkar utara serta pembukaan akses jembatan wisata yang menghubungkan Sikabau dengan kawasan cagar budaya.

- b). Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar dengan objek situs: Rumah Kerajaan Koto Besar, Makam Raja Koto Besar, Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba, Makam Rajo Kuek Kuaso
- c). Kawasan Padang Laweh di Kec. Padang Laweh dengan objek situs: Rumah Kerajaan Padang Laweh, Rumah Kerajaan Tiang Panjang, dan Rumah Gadang Puti Bulian
- d). Situs budaya di Kec. Pulau Punjung: Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung dan Makam Datuak Gadang Sikabau

8) Perdagangan

Sarana perdagangan pasar di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 4 unit merupakan pasar klas I yaitu Pasar Pulau Punjung, Pasar Sikabau, pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai. Sarana komersial berupa pasar dan pertokoan mempunyai kecenderungan untuk berkembang di Kabupaten Dharmasraya (Pasar Sungai Rumbai, Pasar Pulau Punjung, Pasar Koto Baru, Pasar Blok B Sitiung). Sarana seperti perbelanjaan modern, perbankan, perbengkelan dan onderdil membutuhkan lahan untuk pengembangan karena permintaan yang semakin tinggi akibat peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu untuk menunjang kegiatan pasar diperlukan terminal. Sarana terminal pada Kabupaten Dharmasraya saat ini masih kurang. Dengan meningkatnya aktivitas pelayanan armada yang ada di Kabupaten Dharmasraya terutama pada kota-kota yang berada di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, dimana kegiatan pelayanan sudah relatif lebih intensif dan padat, sehingga keberadaan terminal di Kabupaten Dharmasraya yang representatif sangat dibutuhkan.

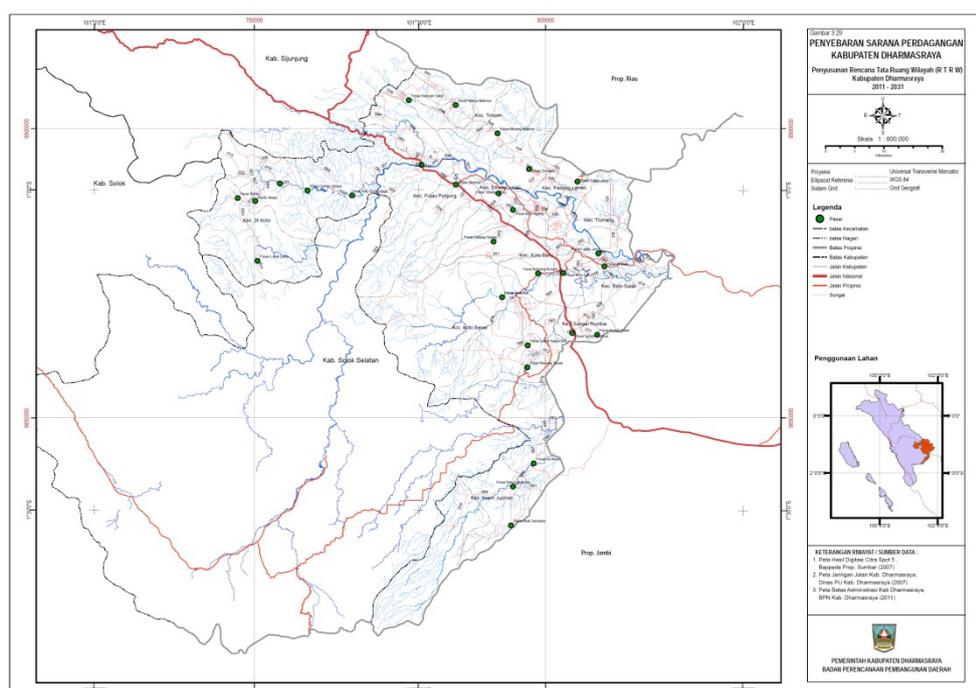
**Tabel 44 : Pasar Menurut Lokasi dan Jumlah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011**

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status
1	Sungai Rumbai	2	Pasar Sungai Rumbai	I	Sungai Rumbai	Nagari
			Pasar Kurnia Koto Salak	II	Kurnia Solok	Nagari
2	Koto Besar	3	Pasar Abai Siat	III	Abai Siat	Nagari
			Pasar Mayang Taurai	III	Koto Gadang	Nagari
			Pasar Lubuk Karya Sit . 4	III	Koto Tinggi	Nagari
3	Asam Jujuhan	3	Pasar Sei Limau	III	Sungai Limau	Nagari
			Pasar Batu Kangkung	III		Nagari
			Pasar Bulit Sembilan	III	Alahan Nan tigo	Nagari
4	Koto Baru	3	Pasar Koto Baru	I	Koto Baru	Nagari
			Pasar Sialang Gaung	II	Sialang Gaung	Nagari
			Pasar Ampang Kuranji	III	Ampang Kuranji	Nagari
5	Koto Salak	1	Pasar Ampalu	III	Ampalu	Nagari
6	Tiumang	1	Pasar Lagan Jaya	III	Sungai Langkok	Nagari
7	Padang Laweh	1	Pasar Sopan Jaya	III	Sopan Jaya	Nagari
8	Sitiung	2	Pasar Sitiung	II	Sitiung	Nagari
			Pasar Koto Agung	II	Sitiung	Nagari

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status
9	Timpeh	4	Pasar Minang Makmur	III	Tabek	Nagari
			Pasar Marga Makmur	III	Taratak Tinggi	Nagari
			Pasar Trimulya	III	Penyeberangan	Nagari
			Pasar Beringin Sakti	III	Taratak Tinggi	Nagari
10	Pulau Punjung	2	Pasar Pulau Punjung	I	Pulau Punjung	Nagari
			Pasar Sikabau	I	Sikabau	Serikat
11	IX Koto	6	Pasar Silago	III	Silago	Nagari
			Pasar Lubuk Labu	III		Nagari
			Pasar Banai	III	Banai	Nagari
			Pasar Ampang Kuranji	III	Silago	Nagari
			Pasar Durian Simpai	III	Koto IV di Bauo (bawah)	Nagari
			Pasar Koto Baru Silago	III	Koto IV Bauo	Nagari

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012

**Gambar 18 : Sebaran Pasar di Kabupaten Dharmasraya**



## 9) Industri

Dari data PDRB 2007-2011, kontribusi sektor industri mengalami penurunan dari 5,88% menjadi 5,52% dalam PDRB Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2011, jumlah unit usaha mikro 2.068 unit, usaha kecil 274 unit dengan menyerap tenaga kerja 1.076 orang, dan usaha menengah 286 unit dengan menyerap tenaga kerja 1.160 orang.

## 10) Ketransmigrasian

Program transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya telah dimulai sejak tahun 1965 dan telah dimukimkan sebanyak 12.779 Kepala Keluarga atau 56.079 jiwa. Dalam masa yang panjang tersebut telah terjalin integrasi sosial antara pendatang dan penduduk asli dalam kesatuan daerah Dharmasraya. Lahan yang masih dicadangkan untuk kawasan transmigrasi terdapat di Kecamatan IX Koto.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### a. Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 1) Kemandirian Fiskal Daerah

Salah satu indikator kemandirian ekonomi suatu daerah dapat diperlihatkan dengan menghitung seberapa besar kemampuan keuangan daerah membiayai pengeluarannya. Semakin besar kemampuan keuangan daerah membiayai pengeluarannya maka semakin mandiri daerah tersebut. Istilah yang biasa dipakai untuk menjelaskan kemandirian keuangan daerah adalah Derajat Otonomi Fiskal daerah (DOFD). Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang lebih dikenal dengan derajat otonomi fiskal daerah, menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun tolak ukur untuk mengetahui DOFD adalah: 0% – 10% dinilai sangat kurang; 10% - 20% dinilai kurang; 20% - 30% dinilai sedang; 30% - 40% dinilai cukup; 40% - 50% dinilai baik; 50% keatas dinilai sangat baik.

**Tabel 45: Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya**

Tahun	PAD	Pengeluaran	DOFD
2007	17,404,345,346	297,827,596,325	5,84
2008	21,722,363,712	388,452,586,558	5,59
2009	25,120,058,434	441,100,108,648	5,69
2010	25,541,706,459	453,188,540,605	5,64
2011	34,423,462,235	478,220,636,368	7,20
Rata-rata			6,05

Sumber : LKPD Kabupaten Dharmasraya

Tabel diatas memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Dharmasraya relatif sangat kurang. Dimana secara rata-rata dari tahun 2007-2011 hanya 5.99% artinya pendapatan asli daerah hanya bisa membiayai 5.99% total pengeluaran yang dilakukan. Tetapi kecenderungan pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan yang positif yaitu sebesar 6,05% per tahun.

Bila dibandingkan dengan daerah lain diantara kabupaten di Sumatera Barat, maka kemandirian fiskal Kabupaten Dharmasraya diatas rata-rata yaitu dibawah Kabupaten Tanah Datar dan Kepulauan Mentawai yang sudah menunjukkan angka antara 10% dan 20 % atau masuk dalam kategori kurang seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 46: Derajat Otonomi Fiskal Daerah Di Sumatera Barat**

Kab/Kota	DOFD	Kategori
Kab. Agam	5.15	Sangat kurang
Kab. Kepulauan Mentawai	13.61	Kurang
Kab. Padang Pariaman	3.91	Sangat kurang
Kab. Pasaman	5.78	Sangat kurang
Kab. Pesisir Selatan	4.24	Sangat kurang
Kab. Sijunjung	7.18	Sangat kurang
Kab. Solok	5.34	Sangat kurang
Kab. Tanah Datar	10.42	Kurang
Kab. Pasaman Barat	6.32	Sangat kurang
<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>7.20</b>	<b>Sangat kurang</b>

Kab/Kota	DOFD	Kategori
Kota Bukit Tinggi	12.57	Kurang
Kota Padang	13.91	Kurang
Kota Sawahlunto	10.58	Kurang
Kota Solok	9.34	Sangat kurang
Kota Pariaman	5.77	Sangat kurang

Sumber: Realisasi APBD, Departemen Keuangan 2011

## 2) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian penduduk. Menurut Ernest Engel bila persentase makanan terhadap total pengeluaran lebih dari 80 persen maka tingkat kesejahteraan sangat rendah. Secara umum baik tahun 2008 maupun tahun 2011 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Dharmasraya relatif lebih baik, dimana persentase makanan terhadap total pengeluaran tahun 2008 sebesar 57,68 persen dan tahun 2011 sebesar 47.89 persen.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), pengeluaran total rata-rata per kapita di Kabupaten Dharmasraya tahun 2008 sebesar 519.552 rupiah dan tahun 2011 sebesar 838,559. Pengeluaran untuk bahan-bahan makanan rata-rata menurun kecuali untuk padi-padian, namun untuk pengeluaran tembakau/sirih/rokok meningkat. Biaya pendidikan dan biaya kesehatan juga mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke 2011.

**Tabel 47: Pengeluaran Rata-rata pekapita Perbulan Menurut Kelompok Barang**

Tahun	Makanan		Non Makanan		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2008	299,609	57.68	219,943	42.32	519,552
2011	401,586	47.89	436,973	52.11	838,559

Sumber: BPS, 2012

### b. Infrastruktur

Peran infrastruktur jalan dan irigasi sangat penting untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan peningkatan jalan mengalami penambahan yang cukup berarti selama tahun 2004-2011 tetapi meskipun demikian dimasa depan masih dibutuhkan pengembangan akses untuk menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan wilayah sekitar dan secara internal menghubungkan kawasan produksi pertanian dengan tempat pemasaran atau pengolahan serta menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat pelayanan. Sementara sarana pengairan irigasi kabupaten masih perlu dibangun untuk mendukung produktifitas padi sawah.

Infrastruktur air bersih dan sanitasi lingkungan di Kabupaten Dharmasraya masih sangat terbatas. Diperlukan upaya yang cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaannya.

### c. Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karenanya, memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi setiap pemerintah, Tetapi keterbatasan pemda dalam melakukan pembiayaan pembangunan perekonomian daerah, sering dijadikan alasan mengeluarkan kebijakan yang justru kontraproduktif terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam menciptakan daya saing investasi daerah.

Iklim investasi biasanya sangat dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor kelembagaan, faktor keamanan, politik dan sosial budaya, faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur fisik.

Faktor kelembagaan terkait dengan kepastian hukum, aparaturnya dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan adat. Terkait dengan hal tersebut maka sangatlah penting bagi daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat yang terkait dengan faktor kelembagaan, diantaranya dalam bentuk pemberlakuan peraturan-peraturan daerah yang berpihak kepada dunia usaha.

Kabupaten Dharmasraya sendiri sejak tahun 2009 sudah mempunyai aturan yang baku terkait dengan perizinan khususnya yang menyangkut standar pelayanan minimum dalam pengurusan berbagai perizinan dengan dibukanya Kantor Pelayanan Satu Pintu yang melayani pengurusan berbagai jenis perijinan dengan standar tarif dan jangka waktu pengurusan tertentu sesuai dengan Perda yang dibuat untuk itu.

Faktor keamanan, politik dan sosial budaya, yang kondusif akan menimbulkan perasaan aman bagi investor dalam berinvestasi. Dengan menggunakan proksi banyaknya peristiwa Kamtibmas dan Pelanggaran seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2007 ke tahun 2010 secara keseluruhan menunjukkan trend yang negatif atau semakin sedikitnya terjadi peristiwa yang terkait dengan Kamtibmas dan pelanggaran.

**Tabel 48: Banyaknya Peristiwa Kamtibmas dan Pelanggaran**

Tahun	Jumlah	Perubahan
2007	134	
2008	120	-19.45
2009	151	25.83
2010	127	-15.89
Rata-rata perubahan		-0.17

Sumber: DDA, 2012

Faktor selanjutnya adalah faktor yang terkait dengan potensi-potensi ekonomi yang merupakan keunggulan daya saing investasi daerah dan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya. Seperti kita ketahui, Kabupaten Dharmasraya adalah kabupaten yang unggul di produk-produk perkebunan, Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Disamping itu, kabupaten ini juga

merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, coklat, cengkeh dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Penghasil kelapa sawit paling banyak di kabupaten ini adalah Kecamatan Sungai Rumbai.

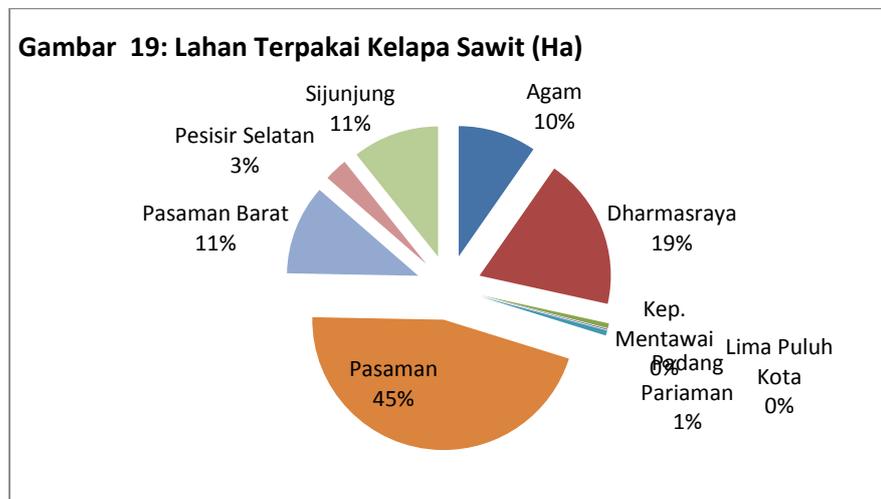
Apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan Kabupaten yang memiliki lahan kelapa sawit kedua terbesar diantara semua kabupaten di Sumatera Barat setelah Pasaman Barat. Bahkan untuk tanaman Karet, Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten yang mempunyai jumlah lahan terbesar diantara kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Barat yaitu 31,23% dari total lahan karet yang ada seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini. Disamping itu terkait dengan Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sumatera, dimana arah kegiatan ekonomi utama pengembangan koridor yaitu kelapa sawit, karet, batu bara dan besi baja.

**Tabel 49: Wilayah Potensi Pengembangan Komoditi Kelapa Sawit dan Karet Di Sumatera Barat**

Kabupaten	Lahan Terpakai (Ha)			
	Kelapa Sawit	%	Karet	%
Agam	31,571	9.64	719	0.58
Dharmasraya	61,690	18.83	38,824	31.23
Kep. Mentawai	2,010	0.61	32	0.03
Lima Puluh Kota	373	0.11	9,221	7.42
Padang Pariaman	2,075	0.63	2,767	2.23
Pasaman	148,972	45.47	19,046	15.32
Pasaman Barat	36,541	11.15	5,446	4.38
Pesisir Selatan	9,403	2.87	6,602	5.31
Sijunjung	34,972	10.67	27,252	21.92
Solok	-	-	1,646	1.32
Solok Selatan	-	-	9,452	7.60
Tanah Datar	-	-	3,295	2.65
<b>TOTAL</b>	<b>327,607</b>	<b>100.00</b>	<b>124,302</b>	<b>100.00</b>

Sumber: BKPMP, 2011

**Gambar 19: Lahan Terpakai Kelapa Sawit (Ha)**



---

#### **d. Sumberdaya Manusia**

Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Dharmasraya dilihat berdasarkan indikator tingkat pendidikan, usia harapan hidup, dan pengeluaran perkapita masih perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada tingkat partisipasi sekolah terutama untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas yang terkait dengan aspek fisik akses sarana sekolah. Usia harapan hidup dan pengeluaran perkapita terkait dengan pengembangan aspek ekonomi masyarakat.

Kesehatan Masyarakat sebagai dasar terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas juga masih perlu ditingkatkan terutama terkait dengan angka kematian ibu (AKI) yang masih diatas target MDGs 2015. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Neonatal (AKN) meskipun sedikit dibawah target MDGs tetapi masih perlu ditingkatkan. Demikian juga balita dengan gizi kurang dan buruk yang masih ditemukan 16,76% dari 15.469 balita yang ditimbang pada tahun 2011 perlu menjadi perhatian untuk peningkatan sumberdaya manusia kedepan karena target standar MDGs prevalensi balita kekurangan gizi MDGs kurang dari 15,5%.

# BAB 3

## ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

*Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.*

*Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang.*

*Langkah dalam analisis isu-isu strategis adalah: pertama merumuskan kerangka pembangunan dalam jangka panjang sehingga tergambar aspek-aspek penting dalam merumuskan perencanaan dalam jangka panjang, kedua, mengidentifikasi permasalahan, potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan yang diamati dari kondisi daerah dan selanjutnya ketiga, mengidentifikasi kesesuaiannya dengan isu-isu strategis dalam wilayah yang lebih luas (regional, nasional, dan internasional).*

### 3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN



Daerah yang memiliki berbagai potensi kekayaan sumberdaya alam tetapi dalam beberapa aspek pembangunan masih perlu mengejar ketertinggalan dari daerah lain serta membangun kemandirian membutuhkan upaya percepatan pembangunan. Berbagai sumberdaya daerah daerah (alam, lingkungan, manusia, sosial, budaya, prasarana, tata kelola pembangunan) yang dibutuhkan dalam pembangunan perlu dikerahkan agar dapat secara sinergis memacu pertumbuhan ekonomi, membangun kesejahteraan masyarakat, pemeratakan pertumbuhan antar kawasan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

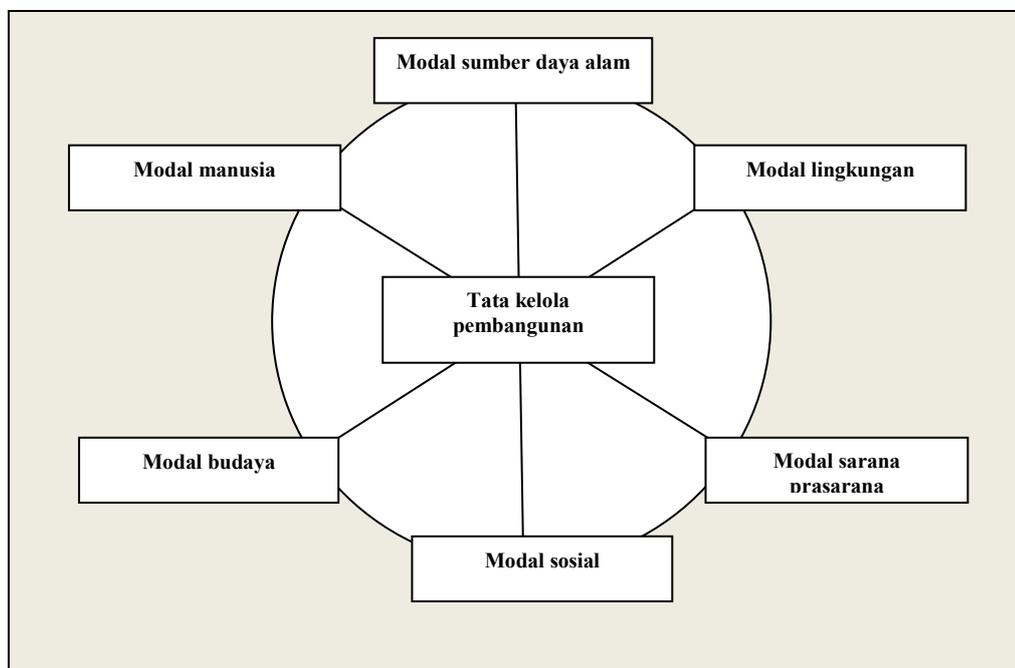
---

Untuk itu pembangunan dapat dilihat dalam kerangka pengelolaan sumberdaya. Pembangunan dalam pendekatan ini merupakan upaya pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan berbagai modal daerah melalui perantara berbagai institusi yang bisa mengambil peran dalam pembangunan (*assets-based development*). Berbagai modal daerah tersebut yaitu modal manusia, modal sosial, modal budaya, modal sumber daya alam, modal lingkungan, dan modal sarana prasarana wilayah yang didukung oleh tata kelola pembangunan.

- a. **Modal manusia** dalam pembangunan yaitu kemampuan penduduk dan kualitas kehidupannya. Untuk mengembangkan modal manusia dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan permukiman yang layak. Tersedianya lapangan kerja yang layak dapat dilihat sebagai dasar pembentukan dan pengembangan modal manusia.
- b. **Modal alam** berupa kekayaan sumberdaya alam (*resource endowment*) berupa mineral, sumber energi terbarukan, keragaman hayati, tanah yang subur dan luas, dan ketersediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah. Modal alam untuk dapat menjamin keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang harus dimanfaatkan atau dieksploitasi secara berkelanjutan, berkeadilan dan memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya sehingga memberi manfaat yang besar bagi penduduk dan daerah. Keunggulan Lokasional termasuk juga sebagai modal alam yang bisa dimanfaatkan. Posisi dalam konstelasi regional tertentu dapat menjadi peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang mengambil manfaat dari nilai lokasi.
- c. **Modal sosial** terdiri atas berbagai organisasi yang berkembang di masyarakat berupa: organisasi budaya (kelembagaan adat dan keagamaan); organisasi yang bersifat ekonomi (seperti kelompok tani dan koperasi); dan organisasi sosial (seperti karang taruna, perkumpulan olahraga, kelompok pengajian dan lain-lainnya). Berbagai organisasi ini merupakan aset untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat sosial budaya dan kegiatan ekonomi berbasis sosial.
- d. **Modal budaya** terdiri atas nilai budaya dan agama yang bersifat intangible sebagai norma kehidupan bersama dan peninggalan sejarah fisik dan tradisi seni budaya sebagai modal identitas budaya yang bersifat tangibel. Keberlanjutan nilai budaya dan adaptasinya sesuai perkembangan zaman, menegakkan semangat dan nilai agama serta pelestarian situs budaya beserta seni budaya menjadi dasar nilai dan identitas untuk membangun daerah.
- e. **Modal lingkungan** yaitu berkaitan dengan kualitas lingkungan untuk mendukung kehidupan. Terjaganya kualitas air sungai, kelestarian hutan, dan kualitas kesuburan lahan dan ancaman lahan dari longsor/erosi akan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.
- f. **Modal sarana prasarana wilayah** yaitu berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana fisik pendukung kegiatan produksi seperti irigasi, pasar, jalan; prasarana permukiman seperti ketersediaan utilitas seperti air bersih, pembuangan limbah, sampah; sarana pelayanan sosial seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana interaksi sosial. Sarana prasarana ini menjadi dasar untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang.

- g. Untuk memelihara, memupuk dan mengembangkan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan **tata kelola pembangunan** yang andal. Peraturan, prosedur, alokasi anggaran, dan tata kelembagaan pembangunan yang tepat merupakan modal pemerintahan dalam mengatur dan membangun daerah. Berbagai aspek yang menjadi syarat terbangunnya tata kelola pembangunan yang baik seperti: kelengkapan sediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan yang didukung sistem informasi; keandalan proses dan prosedur perencanaan; koordinasi pembangunan antar instansi yang baik; dukungan peraturan yang lengkap yang didukung lembaga pelaksana yang efektif; serta kelembagaan pembangunan sosial dan ekonomi yang melibatkan peran berbagai lembaga di daerah sehingga dapat mendorong kemandirian pembangunan daerah.

**Gambar 20: Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan, dan Pengembangan Modal Daerah (*Assets-Based Development*)**



Permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai: (1) kesenjangan antara kondisi perkembangan yang telah terjadi selama ini dengan kondisi seharusnya, dan (2) kesenjangan antara kondisi yang terjadi selama ini dengan gambaran kondisi dimasa depan. Permasalahan pembangunan bersifat retrospektif dan prospektif. Dalam dimensi retrospektif, masalah pembangunan adalah masalah masa sekarang yang perlu diatasi. Dalam dimensi prospektif masalah pembangunan muncul dari penerawangan (*conjecture*) terhadap berbagai peluang atau kemungkinan kejadian di masa depan yang bisa diraih dan perlu diantisipasi.

Dengan demikian permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai permasalahan yang dihadapi dimasa sekarang serta potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan dimasa depan.

Permasalahan masa sekarang adalah berbagai kekurangan yang perlu diatasi. Potensi adalah berbagai sumberdaya yang bisa didayagunakan dengan optimal. Kebutuhan adalah berbagai hal yang perlu dipenuhi sebagai konsekuensi mengatasi masalah atau

---

mengembangkan potensi. Peluang adalah situasi eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi atau mengatasi masalah.

Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten yang belum lama berkembang sebagai hasil pemekaran wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang besar dengan latar belakang identitas sejarah dan budaya beragam. Tetapi dalam pembangunan kedepan masih perlu didukung oleh pengembangan sumberdaya alam bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan, sumberdaya manusia yang berkualitas, sumber daya infrastruktur fisik yang memadai, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan perangkat manajemen dan teknologi informasi yang andal.

Permasalahan, potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya dalam kerangka isu pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan modal daerah yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan penduduk dalam aspek pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga sejahtera sebagai usaha pemupukan dan pengembangan modal manusia.
- b. Pengembangan pertanian, pertambangan, peternakan dan perikanan dengan optimal serta bernilai tambah besar di Kabupaten Dharmasraya sebagai wujud pengembangan modal alam.
- c. Pemberdayaan nagari dan kelompok masyarakat sebagai usaha pemupukan dan pengembangan modal sosial dan modal ekonomi.
- d. Reorientasi peran adat dalam perkembangan sosial ekonomi, menggiatkan kehidupan beragama serta pelestarian peninggalan budaya bekas Kerajaan Dharmasraya merupakan isu dalam modal budaya.
- e. Terjaganya kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian Sub DAS Batanghari hulu dan tengah dengan pengendalian kualitas air sungai, pelestarian hutan, atau pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik lahan sebagai wujud pemeliharaan modal lingkungan.
- f. Ketersediaan berbagai prasarana (sanitasi lingkungan, prasarana sumberdaya air, energi, telekomunikasi dan transportasi) serta sarana pelayanan (pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi dan olah raga) merupakan bentuk dari pengembangan modal sarana prasarana wilayah.
- g. Untuk mendukung pengembangan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang didukung oleh sistem informasi pengelolaan pembangunan sebagai upaya dalam peningkatan tata kelola pembangunan yang andal.

---

## A. Demografi dan Peningkatan Kesejahteraan Penduduk

### 1. Demografi

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya tertinggi diantara daerah kabupaten dan kota di Sumbar yaitu 3,09% sementara rata-rata Sumbar hanya 1,34%. Dari piramida penduduk terlihat kecenderungan tingginya pertumbuhan penduduk alamiah dan migrasi masuk. Hal lain yang terlihat dari sex ratio yaitu indeks perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dharmasraya yaitu 106,9 tertinggi setelah Mentawai, sementara rata-rata Sumbar 98,4 (lebih banyak perempuan daripada laki-laki).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dalam jangka panjang akan berdampak kepada penyediaan lapangan pekerjaan dan sarana prasarana. Struktur lapangan kerja perlu diarahkan agar semakin berkurang proporsi disektor pertanian dengan mengembangkan kegiatan industri berbasis pengolahan hasil pertanian.

### 2. Kesejahteraan Penduduk

Nilai IPM Kabupaten Dharmasraya berdasarkan indikator lama sekolah, pengeluaran perkapita, angka melek huruf dan harapan hidup termasuk yang terendah di Sumbar. Tahun 2010 berada pada urutan ke 17 di Sumbar diatas Solok Selatan dan Mentawai.

Rata-rata lama sekolah 7,77 tahun (rata-rata Sumbar 8,48); Pengeluaran perkapita 608.000 terendah setelah Mentawai (rata-rata Sumbar 635,29); Angka melek huruf 96,38% urutan ke 7 dari 12 kabupaten; dan harapan hidup 66 tahun merupakan yang terendah di Sumbar. Rendahnya nilai IPM menunjukkan bahwa perlu upaya yang keras untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pada setiap indikator.

Isu lebih rinci dalam bidang pendidikan dan kesehatan diuraikan berikut ini.

#### a. Pendidikan

- Kecenderungan makin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit penduduk yang berpartisipasi didalamnya.
- Jika dibandingkan dengan 12 kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat, untuk angka partisipasi sekolah kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ke 6 untuk tingkat SD, peringkat 12 untuk tingkat SLTP, dan peringkat 9 untuk tingkat SLTA. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dharmasraya untuk tingkat SD pada tahun 2011 yaitu 99,30; tingkat SMP 84,68; dan tingkat SMA 54,69.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA rendah pada beberapa kecamatan. Hal ini terkait distribusi sekolah SMA/MA/SMK. Masih ada kecamatan belum memiliki sekolah SMA atau sejenisnya. Kecamatan Tiumbang dan Padang Laweh dengan kepadatan penduduknya di atas 80-100 jiwa/km<sup>2</sup> perlu dipertimbangkan untuk pembangunan sekolah baru untuk tingkat SMA.
- Belum satupun SMP dan SMA yang berstandar nasional karena kekurangan sarana prasarana seperti labor dan perpustakaan
- Perlunya peningkatan intensitas kegiatan sekolah pada berbagai jenjang pendidikan

- 
- Perlunya perguruan tinggi penunjang pengembangan potensi daerah
  - Pelayanan pendidikan yang tertinggal dibanding daerah kecamatan lainnya yaitu: kecamatan IX Koto, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh dan Asam Jujuhan.

#### **b. Kesehatan**

- Dibandingkan dengan standar MDGs 2015, pencapaian indikator kesehatan Kabupaten Dharmasraya yang masih perlu ditingkatkan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih diatas target MDGs 2015. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Neonatal (AKN) meskipun sedikit dibawah target MDGs tetapi masih perlu ditingkatkan. Demikian juga balita dengan gizi kurang dan buruk yang masih ditemukan 16,76% pada tahun 2011 perlu menjadi perhatian karena target standar MDGs prevalensi balita kekurangan gizi MDGs kurang dari 15,5%.
- Dilihat pada posisi Kabupaten Dharmasraya diperbatasan tenggara Sumbar dan jauhnya akses menuju pusat kesehatan regional di Kota Padang maka kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit dari segi tenaga medis perlu ditingkatkan agar tingkat kelengkapan dalam pelayanan semakin tinggi dan mampu menjadi orientasi pelayanan daerah perbatasan sekitar.

Kebutuhan pengembangan kesejahteraan di Kabupaten Dharmasraya masa depan yaitu:

- Menekan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi
- Peningkatan partisipasi pendidikan terutama pada tingkat SMP dan SMA. Sementara pada tingkat SD perlu mencapai APM 100%. Hal ini khususnya untuk sarana SMA dan SMP membutuhkan pemerataan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan. Untuk mendorong partisipasi pendidikan dibutuhkan kebijakan untuk mendorong orang tua menyekolahkan anaknya sebagai kewajiban.
- Program pemberantasan buta huruf perlu ditingkatkan
- Aspek kesejahteraan dengan indikator seperti pengeluaran perkapita dan harapan hidup yang rendah terkait dengan perkembangan sektor ekonomi. Perkembangan ekonomi perlu difokuskan kepada sektor-sektor yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan penduduk berpendapatan rendah.
- Peningkatan kualitas pelayanan medis untuk meningkatkan kemandirian pelayanan rumah sakit dan pelayanan bagi daerah perbatasan sekitar.

Indikator keberhasilan:

- APM SD 100%, proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD 100%, angka melek huruf 100%, rasio APM perempuan/laki-laki setiap jenjang pendidikan 100.
- Terdapat sekolah berstandar nasional pada jenjang SMP dan SMA
- Terdapat perguruan tinggi penunjang pengembangan potensi daerah
- Ranking IPM meningkat pada posisi rata-rata Provinsi Sumbar.
- Kelengkapan rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan di perbatasan tenggara Sumbar yang bisa menjadi orientasi pelayanan daerah perbatasan sekitar.

---

## B. Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Alam

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kegiatan ekonomi kedepan yaitu: (1) perlunya mengembangkan berbagai potensi sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan produk ekonomi daerah agar pendapatan perkapita dapat meningkat (2) perlunya memacu pemerataan pembangunan dengan mengembangkan ekonomi masyarakat agar tercapai ketahanan sosial dan ekonomi daerah.

Berikut ini akan diuraikan berbagai permasalahan pembangunan dalam aspek pengembangan sumberdaya alam.

### a. Pengembangan Tanaman Pangan



Ketahanan pangan menjadi isu penting nasional dimasa depan. Dengan pertambahan penduduk dimasa depan tetapi sebaliknya dibarengi dengan alihfungsi lahan sawah yang tinggi serta prediksi kelangkaan dan mahalnya pangan dalam pasar internasional maka pemanfaatan secara optimal lahan sawah yang ada serta mencari peluang pengembangan lahan sawah yang masih mungkin perlu diupayakan oleh daerah.

Lahan sawah yang ada di D.I. Batanghari tercatat 5.782 Ha. Dari kapasitas debit sebesar 25 m<sup>3</sup> baru sekitar 11 m<sup>3</sup> termanfaatkan. Peluang ekstensifikasi lahan sawah pada DI Batanghari untuk mengoptimalkan pemanfaatan irigasi Batanghari pada lahan yang masih berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan kajian yang telah dilakukan seluas 1.715 Ha. Dengan prediksi nilai ekonomi tanaman pangan yang tinggi dalam jangka panjang, maka pengembangan lahan sawah masih berpeluang ditingkatkan sampai mencapai luas lebih kurang 5.000 Ha. Selain itu perlu peningkatan pengairan irigasi pada D.I. yang dikelola kabupaten pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.

Permasalahan dan potensi pengembangan produksi tanaman pangan di Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan yaitu :

- Pengendalian alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif bagi petani. Kebijakan didukung dengan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada area beririgasi teknis.
- Peningkatan luas lahan sawah DI Batanghari seluas 1.715 Ha sehingga mencapai luas lebih kurang 7.500 Ha.
- Peningkatan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada area mencapai luas 3.500 Ha.

---

Dengan perkiraan optimis dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan yang mendukung di Kabupaten Dharmasraya akan tersedia lahan sawah lebih kurang 14.282 Ha dari sawah tahun 2011 seluas 9.278 Ha.

Luas ini dihasilkan melalui ekstensifikasi lahan sawah pada DI Batanghari dalam jangka menengah lebih kurang 1.715 Ha dan ekstensifikasi tambahan seluas 3.285 Ha dalam jangka panjang. Peningkatan produksi perlu diiringi dengan pemberian insentif kepada petani melalui berbagai bentuk skema yang efektif.

Dalam kondisi tahun 2011, produksi padi mencapai 50.713 Ha dengan produktivitas 4,29 ton/Ha. Dengan perkiraan lahan berdasarkan potensi ekstensifikasi lahan mencapai luas 14.282 Ha dan produktivitas meningkat mencapai rata-rata nasional 5,2 ton/Ha maka produksi padi dalam jangka panjang bisa mencapai 74.266 ton atau meningkat 146% dari produksi sekarang.

#### **b. Pengembangan Pertanian hortikultura**



Pertanian hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran) belum menjadi komoditi yang berperan besar dalam ekonomi daerah. Akan tetapi dengan potensi lahan dan keunggulan komparatif jenis hasil budidaya seperti manggis, duku, durian dan salak terdapat peluang pengembangan kalau dilakukan usaha budidaya, pemasaran dan pengolahan lebih lanjut dengan pola agribisnis.

Potensi pengembangan agribisnis hortikultura buah-buahan bernilai ekonomis dan produksi khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster pada beberapa kecamatan yang potensial (seperti Kec. IX Koto, Pulau Punjung, Koto Besar, Koto Baru).

Berdasarkan potensi lahan dan peluang pasar, dengan perkiraan optimis dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan yang mendukung terbuka peluang untuk berkembangnya sentra agribisnis hortikultura buah-buahan di Kabupaten Dharmasraya.

#### **c. Pengembangan Perikanan**



Kabupaten Dharmasraya meskipun memiliki infrastruktur pendukung budidaya perikanan yang cukup lengkap tetapi memiliki produksi perikanan budidaya yang masih rendah. Peluang pengembangan sektor perikanan dimasa depan yaitu pengembangan budidaya perikanan dengan pendekatan kawasan minapolitan dengan telah ditetapkannya Kabupaten Dharmasraya dalam program nasional sebagai salah satu daerah pengembangan minapolitan.

---

Gambaran masa depan yang diharapkan yaitu:

- Berkembangnya kawasan minapolitan di Kabupaten Dharmasraya
- Meningkatnya produksi perikanan mencapai minimal 300% di Kabupaten Dharmasraya sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi Sumbar bagian selatan (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya).

#### d. Pengembangan Perkebunan

Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang memiliki potensi terbesar untuk tanaman karet dan kedua terbesar untuk kelapa sawit di Sumatera Barat. Permasalahan dan potensi pengembangan dimasa depan dari kedua komoditi terkait dengan aspek budidaya dan pengolahan hasil.

##### Pengembangan Kelapa Sawit



Masalah utama yang perlu diatasi dalam perkebunan sawit yaitu pengolahan hasil kelapa sawit perkebunan rakyat, pemasaran, dan transportasi. Dengan luas lahan kebun kelapa sawit keseluruhan mencapai 90.000 Ha maka dibutuhkan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas produksi total 450 ton/jam<sup>1</sup>. Untuk mengolah hasil kelapa sawit perkebunan rakyat yang mencapai hampir 30.000 Ha maka dibutuhkan pabrik pengolahan dengan kapasitas produksi total 150 ton/jam. Dengan kapasitas produksi PKS yang telah ada sejumlah 290 ton/jam maka masih dibutuhkan penambahan PKS dengan kapasitas produksi 160 ton/jam. PKS dengan kapasitas yang ada sekarang sebagian besar hanya akan mampu menampung hasil perkebunan besar saja (dengan pemanfaatan lahan optimal akan membutuhkan 300 ton/jam) sementara kebutuhan PKS untuk menampung hasil perkebunan rakyat dalam jangka panjang secara bertahap perlu disediakan.

Dalam kondisi sekarang terdapat selisih rendah harga TBS di Kabupaten Dharmasraya disbanding daerah lain sebanyak Rp 200 – 300 per kg TBS . Hal ini karena kurangnya PKS. Dengan adanya penambahan PKS maka bisa dikurangi kerugian harga bagi petani daerah sebanyak 10 -15 milyar/bulan (dengan luas lahan 30.000 Ha dan perkiraan produktifitas 20 ton/Ha/tahun maka produksi mencapai 600.000 tonTBS/tahun atau 50.000 ton TBS/bulan).

Peluang pengembangan industry hilir menghasilkan produk makanan seperti pabrik minyak goreng, mentega, minyak kering dan lainnya. Pabrik minyak goreng di Sumbar yaitu Incasi Raya dengan kapasitas 35.000 ton/tahun sementara kebutuhan minyak goreng Sumbar minimal 48.280 ton/tahun

---

<sup>1</sup> Asumsi kapasitas pabrik pengolahan TBS 20 jam/hari dalam 25 hari/bulan, dengan rumus:  
Kebutuhan pabrik pengolahan =  $\frac{\text{Total produksi TBS/tahun} \times 12,5\%}{500 \text{ jam}} \times 1 \text{ ton TBS}$

---

(Sumbar dengan konsumsi minyak goreng diatas rata-rata nasional 9,95 kg/kapita/tahun, dengan penduduk 4,828 juta). Pada sentra sawit seperti Kabupaten Dharmasraya terbuka peluang untuk membuka pabrik minyak goreng sawit (PMGS) dengan kapasitas 1,5 ton/jam atau 7.200 ton/tahun yang bisa berkontribusi dalam memenuhi pasar minyak goreng Sumbar.

Peningkatan jalan akses pertanian pada kawasan produksi sehingga biaya angkut komoditi dapat ditekan.

Kebutuhan dan peluang pengembangan dimasa depan untuk komoditi unggulan kelapa sawit yaitu:

- Kebutuhan pengadaan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (Dengan asumsi kapasitas PKS 30 ton/jam dibutuhkan penambahan 5 PKS).
- Peluang pengembangan pabrik pengolahan industry hilir makanan (minyak goreng, dll) untuk pasar Sumbar dan wilayah sekitar.

### Pengembangan Karet



Sebagai sentra karet terbesar di Sumbar, Kabupaten Dharmasraya perlu meningkatkan kualitas dan produktifitas bahan olahan karet (bokar). Badan penelitian dan pengembangan pertanian Departemen Pertanian pada tahun 2005 telah menargetkan bahwa bagian yang diterima petani karet minimal 80% FOB (fee on board/harga ekspor) pada tahun 2025.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, oleh karena itu perlu pengembangan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan peningkatan jalan akses pertanian pada kawasan produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan introduksi teknologi tepat guna seperti alat penggiling slab manual.

Produktifitas karet rakyat rata-rata 30% lebih rendah dari karet perkebunan besar. Peningkatan produktifitas karet rakyat perlu dilakukan dengan budidaya bibit unggul dan peremajaan karet rakyat. Departemen Pertanian menargetkan untuk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2012 dilakukan peremajaan 250 Ha lahan tanaman karet rakyat. Lahan tidak produktif karet di Kabupaten Dharmasraya perlu dijadikan produktif. Selain itu kebun produktif juga perlu secara kontinu diremajakan karena 2-3% areal tanaman menghasilkan akan memerlukan peremajaan pertahunnya.

Pasar lelang karet telah dibangun di Kabupaten Dharmasraya (Sitiung III). Pasar lelang secara fisik perlu didukung dengan kelembagaan pemasaran agar harga yang diterima petani berada dalam harga efisiensi pasar.

Dengan luas keseluruhan perkebunan karet rakyat 38.359 Ha maka produksi total karet dimasa depan minimal mencapai 97,32 ton/hari (dengan memakai asumsi produktifitas rata-rata sekarang 926 kg/Ha/tahun). Pabrik pengolahan karet remah (*crumb rubber*) berpeluang dibangun di Kabupaten Dharmasraya

---

untuk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan harga jual bagi petani. Selain itu berbagai produk industri inti barang-barang karet berpeluang dibangun untuk meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.

Hasil kayu tanaman karet yang bisa dihasilkan dalam siklus peremajaan mencapai 316.800 m<sup>3</sup>/tahun atau 868 m<sup>3</sup>/hari.<sup>2</sup> Kayu karet tersebut dapat digunakan untuk furniture atau bahan bangunan<sup>3</sup>. Oleh karena itu terdapat peluang integrasi peremajaan tanaman karet dengan industri kayu dimasa depan.

Kebutuhan dan peluang pengembangan karet dimasa depan yaitu:

- Peningkatan produktifitas karet perkebunan rakyat.
- Pengembangan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani.
- Penyediaan pabrik crumb rubber dan pabrik industri inti barang-barang karet.
- Pengendalian fluktuasi harga karet dengan pendekatan kelembagaan melalui optimalisasi pasar lelang karet .
- Integrasi peremajaan dengan industri kayu.

#### **Pengembangan Komoditi Perkebunan Potensial Lainnya**

Selain kedua komoditi tersebut, pengembangan komoditi perkebunan lain yang potensial dimasa depan seperti kopi dan kakao dengan peningkatan luas tanam, peningkatan produktifitas dan pengolahan hasil. Diversifikasi produksi pertanian di daerah tetap perlu dipertahankan untuk menjaga ketahanan ekonomi wilayah karena wilayah dengan produk yang beragam akan lebih tahan terhadap pengaruh eksternal seperti dampak turunnya harga pasar.

Secara umum, potensi dan masalah pengembangan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- Pengembangan kemandirian daerah dalam pengembangan perkebunan dengan pengembangan pengolahan ditingkat petani untuk menstabilkan harga dan meningkatkan nilai tambah, meningkatkan bantuan permodalan bagi petani, dan pembangunan pabrik pengolahan dengan modal daerah atau pola pelibatan kepemilikan saham petani dalam usaha industri.
- Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao melalui menjamin input bibit unggul, pupuk, dan peremajaan.
- Meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan dengan pengembangan pengolahan hasil perkebunan ditingkat petani.
- Pengembangan pabrik pengolahan sawit dan industri hilir lanjutan pengolahan produk makanan.
- Pengembangan prasarana pemasaran hasil perkebunan dengan mengembangkan pasar agropolitan perkebunan yang berfungsi

---

<sup>2</sup> Hasil kayu minimal 300 m<sup>3</sup>/Ha/siklus. Asumsi satu siklus 30 tahun. Asumsi luas lahan peremajaan adalah lahan produktif dan tidak produktif pada tahun 2011 seluas 31.680 Ha.

<sup>3</sup> Kayu karet memiliki kerapatan tinggi (0,61 g/cm<sup>3</sup>) dan kelas kuat II-III sehingga layak dipakai sebagai bahan struktural dan non struktural bangunan (Abdurachman dan Hadjib, 2009).

---

memperpendek mata rantai pemasaran dan menjaga tingkat harga komoditi serta mengembangkan jalur akses yang menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.

Gambaran keberhasilan sektor perkebunan yang diharapkan yaitu:

- Berkembangnya kemandirian daerah dalam agribisnis perkebunan yang dapat dilihat dari meningkatnya keikutsertaan/peran petani dan pemerintah dalam pengelolaan input produksi, pengolahan hasil produksi dan pemasaran.
- Optimalnya produksi komoditi unggulan sawit, karet, kopi, kakao melalui peningkatan produktifitas menyamai tingkat produktifitas terbaik didaerah lain dan peremajaan tanaman.
- Terpenuhinya kebutuhan pabrik pengolahan kelapa sawit untuk Kabupaten Dharmasraya dan berkembangnya pabrik pengolahan lanjutan produk makanan dari bahan kelapa sawit. Indikator keberhasilan untuk kelapa sawit yaitu:
  - Tersedianya PKS dengan kapasitas total produksi 460 ton/jam.
  - Berkembangnya pabrik pengolahan industri hilir makanan minyak goreng.
- Berkembangnya pengolahan karet ditingkat petani dan pengolahan lebih lanjut produk karet. Indikator keberhasilan untuk komoditi karet:
  - Produktifitas meningkat menjadi diatas 1 ton/Ha/bulan.
  - Membudayanya pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani.
  - Terolahnya sebagian hasil bahan olah karet rakyat di Kabupaten Dharmasraya. Dengan kapasitas produksi karet bisa mencapai lebih 97.320 ton/hari maka pabrik crumb rubber dan berbagai turunan industri inti barang-barang karet berpeluang dikembangkan.
  - Berkembangnya integrasi industri kayu dengan peremajaan kebun karet yang diperkirakan mencapai 316.800 m<sup>3</sup>/tahun.
- Diversifikasi produk membuat stabilitas atau daya tahan ekonomi daerah semakin tinggi. Berkembangnya komoditi potensial perkebunan lainnya seperti kakao dan kopi berikut pengolahan hasilnya sebagai upaya mendukung ketahanan ekonomi daerah.

#### e. Pengembangan Peternakan



Kebijakan pembangunan disektor peternakan nasional yaitu program swasembada daging sapi pada tahun 2014 (PSDS /Program Swasembada Daging Sapi-2014) yang menjadi salah satu program utama Departemen Pertanian. Sumatera Barat merupakan salah satu dari 18 provinsi yang ditetapkan sebagai sentra sapi potong. Salah satu strategi pengembangan yaitu integrasi tanaman – ternak yang untuk kasus Kabupaten Dharmasraya berupa integrasi kelapa sawit – sapi.

---

Dimasa depan terbuka peluang untuk mengintegrasikan perkebunan sawit dengan peternakan sapi. Pada lahan sawit dengan luas 1 Ha dapat menyediakan pakan bagi 3.2 ekor sapi yang berasal dari pelepah sawit, solid, dan bungkil inti sawit. Dengan demikian pada lahan kelapa sawit perkebunan rakyat seluas hampir mencapai 30.000 Ha dan kebun plasma 20.000 Ha dapat diintegrasikan kegiatan pertanian – peternakan sapi sampai mencapai 150.000 ekor. Kalau perkiraan jumlah ternak sapi yang dapat dibudidayakan dalam 1 Ha lahan kebun kelapa sawit rata-rata 2 ekor/hektar maka sapi potong di Kabupaten Dharmasraya dengan pola integrasi sawit -sapi sebanyak 100.000 ekor

Dengan jumlah sapi tahun 2011 sebanyak 25.773 telah menjadikan Kabupaten Dharmasraya swasembada sapi (dengan rata-rata konsumsi daging sapi 2,1 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya 197.600 jiwa maka kebutuhan daging sekitar 401.000 kg/tahun atau setara 2.450 ekor sapi). Populasi sapi untuk potensial stok ini yaitu 15.840 ekor.

Dimasa depan, dalam kerangka swasembada daging sapi pada konsumsi yang ideal yaitu 4,6 kg/kapita/tahun maka jumlah populasi sapi perlu ditingkatkan 2 kali lipat dari jumlah sekarang (dengan rata-rata konsumsi daging sapi ideal 4,5 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya lebih kurang 285.000 pada tahun 2025 maka kebutuhan daging sekitar 1.311.000 kg/tahun atau setara 8.000 ekor sapi. Populasi sapi untuk potensial stok ini yaitu 51.670 ekor).

Dengan peningkatan produksi ternak sapi potong dengan pola integrasi kebun dengan kepemilikan bisa mencapai 1-3 ekor sapi perhektar menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan. Potensi pengembangan masa depan yaitu peningkatan produksi sapi potong dengan strategi pengembangan integrasi kelapa sawit - sapi potong.

Gambaran keberhasilan sektor peternakan yang diharapkan yaitu meningkatnya jumlah sapi potong 2 kali lipat dari jumlah sapi sekarang.

#### f. Industri



Industri skala mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Dharmasraya belum mengalami pertumbuhan yang signifikan kalau dilihat proporsinya dalam struktur perekonomian. Akan tetapi sektor industri meskipun menyerap tenaga kerja yang cukup besar yaitu mencapai lebih dari 4.000 orang (jumlah unit usaha mikro 2.068 unit, usaha kecil menyerap tenaga kerja 1.076 orang, dan usaha menengah menyerap tenaga kerja 1.160 orang), tetapi mempunyai keterbatasan pengembangan karena tergantung dari permintaan pasar lokal.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat peluang untuk produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing sehingga mampu memproduksi tidak

---

hanya berskala lokal tetapi bisa bersaing dalam pasar lebih luas seperti batik atau keripik tempe.

Peluang pengembangan industri yang bernilai tambah besar terdapat pada pengembangan industri hilir pengolahan hasil pertanian perkebunan komoditi kelapa sawit, karet. Pengembangan industri ini akan mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

Gambaran keberhasilan sektor industri yang diharapkan yaitu:

- Terbangunnya pabrik pengolahan industri hilir pertanian perkebunan kelapa sawit dan karet berbasis masyarakat sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat.
- Berkembangnya industri mikro dan kecil rakyat berbasis pengolahan sumber daya pertanian khususnya sawit, karet, kopi dan kakao.
- Berkembangnya pasar untuk produk UKM daerah yang memiliki daya saing

#### **g. Pertambangan**

Batubara dan biji besi yang menjadi produk tambang yang dominan sampai saat ini di Kabupaten Dharmasraya merupakan sumberdaya yang tidak terbaharui sehingga dalam jangka panjang (15-20 tahun kedepan) bisa habis dieksploitasi. Eksploitasi batu bara dan biji besi oleh perusahaan swasta pada lahan seluas 2.388 Ha dalam 10 tahun kedepan diperkirakan akan jauh berkurang produksinya.



Sementara itu potensi pertambangan rakyat yang dimaksudkan untuk memberi dampak kesejahteraan langsung kepada penduduk perlu melibatkan peran aktif pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan bantuan permodalan. Kelembagaan dalam usaha pertambangan rakyat perlu dibina agar

memberi dampak sebesarnya bagi kesejahteraan penduduk dan sekaligus dilakukan tanpa berakibat merusak lingkungan.

Perhatian perlu diberikan kepada kecenderungan untuk mengeksploitasi kawasan sekitar sungai. Pengendalian eksploitasi tambang di kawasan sungai merupakan isu lingkungan yang perlu menjadi perhatian dalam perijinan dan pengendalian penataan ruang.

Permasalahan dan potensi pengembangan sektor pertambangan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- Dalam jangka panjang, perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Dharmasraya tidak bisa digantungkan kepada hasil tambang mengingat terbatasnya deposit.
- Pemanfaatan tambang dimasa depan perlu mempertimbangkan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat dan dilakukan dengan ramah lingkungan.

- Industri pengolahan bahan tambang di Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk dikembangkan mengingat lokasinya yang strategis pada simpul perbatasan 3 provinsi. Industri pengolahan bahan tambang tersebut seperti bijih besi.

Gambaran pencapaian sektor pertambangan dimasa depan yaitu berkembangnya eksploitasi pertambangan dan pengolahan hasil tambang yang memberi dampak yang besar kepada kesejahteraan masyarakat dan terjaganya kelestarian lingkungan.

#### **h. Wisata Alam**

Pengembangan objek wisata dan rekreasi alam dilakukan dengan mengembangkan objek prioritas berdasarkan daya tarik dan jangkauan pelayanan target pengunjung. Berdasarkan pertimbangan jangkauan akses pengunjung, pengembangan objek wisata di Kabupaten Dharmasraya dapat dibagi atas 4 klaster wisata. Usulan klaster tersebut yaitu:

- a). Klaster barat meliputi Kec. IX Koto dan Pulau Punjung.
- b). Klaster utara meliputi Kec. Timpeh dan Kec. Sitiung.
- c). Klaster timur meliputi Kec. Kec Koto Baru, Kec. Koto Salak, Kec Padang Laweh, dan Kec. Tiumang
- d). Klaster selatan meliputi, Kec. Sungai Rumbai, Koto Besar, dan Kec. Asam Jujuhan.



Potensi dan peluang pengembangan objek wisata dan rekreasi dimasa depan yaitu: pengembangan kawasan cagar budaya sekaligus sebagai wisata budaya dan pengembangan objek wisata dan rekreasi alam dengan pendekatan klaster, pengembangan taman wisata bertema (*theme park*), dan RTH objek wisata dan rekreasi pada setiap klaster.

Gambaran keberhasilan aspek pariwisata alam yang diharapkan yaitu berkembangnya objek wisata dan rekreasi alam prioritas pada setiap klaster wisata dan rekreasi.

### **C. Pemberdayaan Nagari dan Masyarakat**

Nagari merupakan unit sosial terkecil sekaligus unit terbawah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena peran aktif nagari sangat penting dalam keberhasilan pembangunan sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Secara lengkap, nagari dapat dilihat dalam empat fungsi yaitu sebagai: (1) unit administratif; (2) unit adat dan sosial budaya; (3) unit keamanan; dan (4) unit sosial-ekonomi.

1. Sebagai unit administratif, nagari berperan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan administrasi seperti perijinan serta pendataan dan pengumpulan informasi.

- 
2. Sebagai unit adat dan sosial budaya, nagari merupakan satu kesatuan sosial dengan hak ulayat adat yang memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai perihal adat, budaya dan kehidupan bersama didalam nagari.
  3. Sebagai unit keamanan, nagari dapat mengefektifkan mekanisme keamanan melalui perangkat sosial dan budaya yang dimilikinya.
  4. Sebagai unit sosial-ekonomi, nagari dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mengelola usaha-usaha ekonomi yang dimiliki nagari atau diprogramkan untuk dijalankan di nagari.

Berbagai program pembangunan daerah terkait peningkatan ekonomi dan penyediaan infrastruktur pendukung telah melibatkan peran pengelolaan nagari seperti PNPM, kredit mikro nagari, unit simpan pinjam dan lainnya. Mengingat besarnya modal sumberdaya alam dan penduduk didukung dengan modal sosial, peran sosial-ekonomi yang lebih besar berpeluang dikembangkan dimasa depan dalam pengelolaan usaha ekonomi seperti pengelolaan koperasi pertanian atau pengembangan lembaga bank mikro nagari.

Selain itu disisi lain data dan informasi sebagai landasan keputusan pembangunan mestinya menggambarkan berbagai kondisi fisik, sosial, ekonomi secara rinci dan akurat berbagai kondisi daerah. Data dan informasi yang akurat bisa dimulai dari unit terkecil nagari. Data dan informasi kondisi, potensi dan masalah nagari secara lengkap dan akurat dapat dikumpulkan dari unit nagari untuk kemudian seterusnya dikompilasi menjadi data dan informasi pembangunan daerah kecamatan dan kabupaten.

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi sumberdaya alam berupa lahan yang luas untuk pengembangan usaha pertanian dan berbagai bahan tambang. Potensi ini dan berbagai kegiatan industri dan jasa ikutannya dapat menjadi modal daerah untuk mensejahterakan penduduk dan mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Pengelolaan usaha ekonomi bisa dilakukan dengan menggerakkan berbagai potensi pembiayaan dan pengelolaan melalui badan usaha yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan nagari.

Kebutuhan dan peluang pengembangan modal sosial Kabupaten Dharmasraya sebagai dasar pengembangan ekonomi yaitu: pengembangan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat dan nagari dengan mengembangkan berbagai pengelolaan usaha ekonomi oleh kelembagaan masyarakat dan nagari.

Gambaran keberhasilan pemberdayaan nagari dan masyarakat yang diharapkan yaitu: (1) berkembangnya fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari dengan meningkatnya kemandirian ekonomi dengan berkurangnya ketergantungan ekonomi dengan pelaku bisnis luar terkait pemodal, distribusi barang dan pemasaran, dan (2) Berkembangnya peran berbagai lembaga yang mengelola usaha ekonomi kelompok masyarakat (koperasi, kelompok tani dan lainnya).

---

## D. Pelestarian Budaya dan Peran Adat Dalam Perkembangan Sosial

### Pelestarian Situs Cagar Budaya



Sejarah Dharmasraya dapat ditelusuri mulai dari Kerajaan Swarnabhumi yang berpusat di Dharmasraya dari tahun 1347 hingga 1375 Masehi dengan raja Adityawarman. Peninggalan fisik berupa situs atau artefaknya terdapat tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten Dharmasraya.

Situs-situs tersebut perlu dilestarikan dan juga dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata budaya. Pelestarian dan pemanfaatan situs sebagai objek wisata perlu dilakukan dengan pendekatan kawasan. Dalam pendekatan ini yang dilestarikan bukan hanya objek situs tetapi termasuk lingkungannya. Peruntukan kawasan cagar budaya masih memerlukan penelitian lebih lanjut menyangkut zonasi kawasan.

### Peran Adat Dalam Perkembangan Sosial



Komunitas adat Minangkabau pada awalnya berkembang pada daerah dengan basis ekonomi tanaman pangan padi sawah. Rumah gadang beserta lahan sawah dengan tradisi matrilinealnya merupakan satu kesatuan penyangga kehidupan beradat. Tradisi merantau ikut menjaga adat matrilineal Minangkabau.

Dengan perkembangan jaman, pada kawasan perkebunan nilai ekonomi padi sawah dikalahkan oleh komoditi perkebunan. Selain itu pada saat sekarang kecenderungan merantau mulai berkurang, laki-laki mulai banyak menggarap lahan milik kaum. Sementara tanaman perkebunan memiliki karakteristik berumur panjang kira-kira sama dengan umur satu generasi manusia dan berbeda dengan tanaman padi sawah yang berumur semusim. Sementara itu lahan sawah mulai banyak terlantar.

Kalau dibayangkan satu generasi kedepan, gejala perkembangan yang terjadi ini perlu diantisipasi. Pengaturan pewarisan dan pengelolaan lahan perkebunan beserta tanaman di atasnya yang berumur panjang perlu dipikirkan karena dalam berpotensi menimbulkan konflik dan berkurangnya peran rumah gadang. Apalagi ditambah dengan semakin tingginya tekanan pertumbuhan penduduk dan budidaya perkebunan oleh penduduk.

Perkebunan merupakan basis ekonomi Kabupaten Dharmasraya. Meskipun memiliki masyarakat yang heterogen tetapi dengan kecenderungan yang diuraikan diatas maka berbagai kebijakan perlu dipikirkan oleh lembaga adat beserta pemerintah

---

agar peran adat dapat tetap vital sebagai norma pengorganisasian kehidupan sehari-hari.

Gambaran pencapaian pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan modal budaya yang diharapkan yaitu: (1) terpeliharanya situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata, dan (2) tetap vitalnya adat sebagai modal budaya pengaturan kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

### **Menggiatkan Kehidupan Beragama**

Dalam budaya Minangkabau terdapat pepatah “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah”, yang berarti terdapat kesatuan nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan beragama penting dikembangkan dalam dunia pendidikan dan kehidupan bermasyarakat-bernegara. Berbagai agenda untuk menanamkan nilai agama di sekolah dan menggiatkan kegiatan beragama disekolah, nagari dan jorong perlu terus dibangun seperti seringkali diucapkan dalam ungkapan semangat: “kembali ke surau”.

## **E. Kelestarian Lingkungan Hidup**

### **i. Kelestarian Kawasan Hutan**

Kawasan hutan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK MenHut 304 Tahun 2011 seluas 87.174 Ha (28,91% dari luas kabupaten). Dari seluruh kawasan hutan tersebut, kawasan hutan berfungsi lindung yaitu hutan lindung dan hutan suaka alam/pelestarian alam seluas 17.368 Ha (5,74% dari luas kabupaten). Sementara itu dilihat dari tutupan vegetasi, luas tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya tercatat tinggal seluas 7.290 Ha.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pembangunan adalah masih terdapat penduduk yang tinggal didalam kawasan hutan lindung di Di Kabupaten Dharmasraya yaitu di Kecamatan IX Koto. Kebijakan yang tepat perlu diambil untuk tidak menghambat usaha mensejahterakan mereka. Permukiman masyarakat di dalam kawasan hutan seperti terjadi di IX Koto menjadi problematik dalam pembangunan. Kawasan hutan lindung dalam aturannya tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sementara kenyataannya terdapat permukiman yang telah lama ada didalamnya.

Kebutuhan pembangunan disektor kehutanan yaitu: pelestarian dan reboisasi hutan terutama pada kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam/pelestarian alam; pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu sebagai pendapatan penduduk disekitar hutan secara lestari; pengembangan industri kehutanan; serta penguatan dan pemantapan peraturan daerah dan kebijakan pembangunan terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan hutan dalam rangka menjaga kelestarian sekaligus pemanfaatan bagi kesejahteraan penduduk sekitar.

### **j. Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup**

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi bencana alam longsor dan banjir. Kerawanan longsor sedang dan tinggi terdapat pada kawasan berbukit dengan topografi curam. Kawasan yang berpotensi banjir di Kabupaten

---

Dharmasraya terdapat pada morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol. Bahaya banjir sering terjadi di Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, dan di Kecamatan Koto Salak.

Masalah lain yang dihadapi yaitu ambang baku mutu air raksa yang telah dilewati pada sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan juga terdapat pada sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan. Hal ini akibat penambangan emas ilegal yang membuang limbah kesungai.

Pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian pada kawasan bergelombang dan berbukit yang terdapat pada bagian barat dan sebagian timur kabupaten rawan terhadap erosi, longsor dan gerakan tanah kalau ditanami vegetasi yang tidak sesuai. Budidaya tanaman kelapa sawit pada bentang alam seperti ini perlu dihambat.

Eksplorasi tambang yang berpotensi mencemari sungai perlu diantisipasi dengan penguatan peraturan dan pengawasan yang melibatkan tidak hanya instansi perijinan dan pengendalian pembangunan pemerintah daerah tetapi perlu melibatkan unit pemerintahan yang lebih rendah seperti kecamatan dan nagari dan bisa juga melibatkan lembaga masyarakat agar tercapai efektifitas pengendalian.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dan pertambangan perlu dikendalikan sesuai dengan karakteristik lahan agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Untuk itu dibutuhkan perangkat peraturan dan kelembagaan pelaksanaan yang lebih baik dan efektif dengan melibatkan masyarakat secara luas.
- Pengendalian lingkungan hidup tidak bisa berdiri sendiri dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya karena terkait dengan wilayah lain di Kabupaten Solok Selatan yang berada pada daerah hulu Batanghari. Oleh karena itu perlu dijalin kerjasama pengendalian lingkungan dalam kerangka Sub DAS Batangharu Hulu dan DAS Batanghari secara keseluruhan.

Gambaran pencapaian dalam aspek lingkungan hidup yang diharapkan yaitu: (1) terjaganya kelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya, (2) berkembangnya kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hutan secara lestari bagi penduduk sekitar, (3) terjaganya kualitas, debit, dan fluktuasi sungai Batanghari, (4) minimalnya kerawanan gerakan tanah/longsor.

---

## F. Dukungan Pelayanan Sarana Prasarana Dalam Pembangunan

### a. Sarana Perdagangan dan Jasa

Pusat perdagangan dalam berbagai skala terdapat di 28 lokasi di Kabupaten Dharmasraya. Kawasan perdagangan utama yang telah berkembang di Kabupaten Dharmasraya terdapat di sepanjang koridor Pulau Punjung – Sikabau, Sungai Rumbai, Koto Baru, dan Sitiung.

Kabupaten Dharmasraya yang terletak pada perbatasan tenggara Sumatera Barat berada pada daerah tarik menarik pasar antar wilayah. Oleh karena itu pengembangan perdagangan eceran dan grosir perlu dilakukan untuk mengubah orientasi belanja penduduk bukan hanya penduduk kabupaten tetapi juga dari wilayah perbatasan agar mengarah pada pusat perdagangan di kabupaten.

Kebutuhan pembangunan yaitu : pengembangan kawasan perdagangan wilayah berikut akses transportasi dan terminal. Terutama pasar wilayah menjadi pasar sehat kabupaten. (pasar kelas I dan II sebagai pusat perdagangan wilayah di Kabupaten Dharmasraya). Selain itu pengembangan pasar pada kawasan perbatasan diarahkan agar dapat mengarahkan orientasi belanja ke kabupaten Dharmasraya dimasa depan.

Selain itu kondisi geografi Kabupaten Dharmasraya yang berada pada perbatasan provinsi dibelah oleh jalan lintas Sumatera sepanjang lebih kurang 62,5 Km dan memiliki Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) lebih dari 4.000 menjadi peluang untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa memanfaatkan peluang pergerakan sepanjang koridor ini dengan fasilitas seperti rest area.

Kabupaten Dharmasraya dengan potensi pengembangannya sebagai sentra perkebunan (sawit, karet dan juga komoditi lain seperti kopi dan kakao), peternakan sapi, dan perikanan darat memerlukan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli secara *spot* (tersedianya barang/produk ditempat) maupun *forward* (proses dan mekanismenya tanpa tersedianya barang/produk di tempat).



Pasar berfungsi untuk menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui transparansi mekanisme penentuan harga, pengadaan sumber informasi harga, memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan, menciptakan insentif

bagi peningkatan produksi dan mutu serta meningkatkan pendapatan petani produsen. Pasar yang telah dibangun yang perlu dikembangkan lebih lanjut fungsinya yaitu: pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak. Pasar yang masih perlu dibangun yaitu pasar minapolitan (perikanan).

---

Gambaran pencapaian dalam sektor perdagangan yang diharapkan yaitu:

- Berkembangnya kawasan pasar regional kebutuhan harian dan barang konsumsi yang menjadi orientasi belanja kebutuhan sekunder penduduk bukan hanya untuk daerah Kabupaten Dharmasraya saja tetapi juga melayani wilayah kabupaten lain yang berbatasan. Pasar ini terdapat di Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, dan Padang Laweh sebagai pasar yang berprospek dikembangkan dimasa depan. Pasar ini memerlukan penataan fisik dan perlu dilengkapi dengan terminal.
- Berkembangnya pasar nagari sebagai tempat pemenuhan kebutuhan harian penduduk sekitar.
- Berkembangnya sarana perdagangan dan jasa berfungsi rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.
- Berkembangnya pasar pelayanan sentra produksi berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan.

#### **b. Sarana Olah Raga**

Sarana olah raga dan rekreasi adalah sarana pelayanan masyarakat yang penting untuk disediakan. Kabupaten Dharmasraya dimasa depan sudah membutuhkan sarana sosialisasi masyarakat berupa stadion olah raga untuk pelayanan kabupaten yang bersifat multifungsi yang dapat digunakan untuk kegiatan berbagai macam olah raga, acara publik atau kegiatan launching suatu produk.

Selain itu untuk menyalurkan aktifitas anak nagari pada setiap kecamatan dan nagari perlu didorong pembangunan RTH serbaguna kecamatan dan nagari yang berfungsi sebagai lapangan olah raga untuk berbagai bentuk kegiatan olahraga yang juga berfungsi serbaguna untuk berbagai kegiatan sosial.

#### **c. Prasarana Energi**

Pelanggan listrik di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010 mencapai 31.277 pelanggan dengan kelompok rumah tangga sebanyak 28.070 pelanggan (89,89% dari rumah tangga). Pengembangan jaringan listrik terutama pada Kecamatan Asam Jujuhan dan IX Koto yang belum teraliri listrik.

Kebutuhan pembangunan bidang energi dimasa depan yaitu memberikan akses pelayanan listrik kepada seluruh penduduk di Kabupaten Dharmasraya dan mencari sumber energi alternatif pada daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Selain itu mengingat besarnya potensi sungai membuka peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi lokal terbarukan yang murah dengan alternatif membangun pembangkit mikrohidro. Selain itu untuk kawasan terpencil bisa dikembangkan alternatif pemanfaatan teknologi sel surya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik.

Gambaran keberhasilan penyediaan sarana kelistrikan dimasa depan yaitu rasio elektrifikasi Kabupaten Dharmasraya mencapai 100%.

---

#### **d. Prasarana Air Minum dan Sanitasi Lingkungan**

##### **Prasarana Air Minum**

Pelayanan dari sumber air minum Kabupaten Dharmasraya masih tertinggal dari daerah lain. Penyediaan air minum dengan perpipaan menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian dimasa depan.

Berdasarkan perkembangan kegiatan kawasan perkotaan maka kawasan yang perlu dilayani oleh jaringan air minum yaitu kawasan Gunung Medan dan Sungai Duo, kawasan Koto Baru, Sitiung Blok B, kawasan Padang Laweh, dan kawasan Sungai Rumbai. Selain itu Pengembangan SPAM pedesaan pada pusat pelayanan lingkungan yang belum terlayani yaitu di: Kec. Timpeh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kec. IX Koto.

##### **Sanitasi Lingkungan**

Meskipun jumlah SPAL tinja tertinggi kedua di kabupaten setelah Agam tetapi proporsi pembuangan lubang tanah masih tertinggi di Sumatera Barat Hal ini menandakan masih adanya ketimpangan dalam ketersediaan sarana sanitasi.

Sementara sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum tersedia. Dimasa depan, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kepadatan permukiman yang akan ditimbulkannya maka penyediaan prasarana ini perlu diantisipasi.

Pelayanan persampahan pada pusat kegiatan (Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai) seiring dimasa depan akan semakin berkembangnya kawasan perlu ditingkatkan demikian juga optimalisasi TPA yang telah ada sekarang.

Kebutuhan pembangunan di masa depan yaitu:

- Peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi layak sesuai standar MDGs
- Peningkatan sarana pembuangan limbah tinja RT dan IPLT dimasa depan.
- Peningkatan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan pedesaan. Sesuai standar MDGs.
- Pelayanan air bersih perpipaan terutama pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Koto Baru dan Sungai Rumbai).
- Peningkatan pelayanan persampahan pada pusat-pusat kegiatan di wilayah bagian utara (Pulau Punjung dan Sitiung sekitarnya) dan selatan (Koto Baru dan Sungai Rumbai sekitarnya) dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai.
- Selain air limbah domestik, kegiatan yang menghasilkan limbah dalam skala yang membahayakan kesehatan lingkungan seperti pasar yang menghasilkan limbah yang signifikan seperti pasar ternak, rumah sakit dan industri perlu dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air limbah.
- Perbaiki lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.

Gambaran keberhasilan pengelolaan air bersih dan sanitasi dimasa depan yaitu: (1) peningkatan proporsi RT dengan akses sanitasi layak meningkat (standar MDGs perkotaan 76,82%, pedesaan 55,55%); (2) proporsi RT dengan akses air

---

minum layak (standar MDGs perkotaan 75,29%, perdesaan 65,81%); (3) Terlayannya kebutuhan air bersih pada kawasan cepat tumbuh, (4) Tersedianya pengelolaan persampahan pada kawasan pusat kegiatan bagian utara dan selatan, (5) Pengembangan sarana IPAL pada fasilitas yang berpotensi mencemari lingkungan, dan (6) kawasan dengan sanitasi lingkungan buruk dengan kerawanan tinggi terhadap penyakit akibat kondisi lingkungan berkurang.

#### e. Prasarana transportasi dan sumberdaya air

##### Prasarana Transportasi

Pengembangan jaringan jalan dilakukan dengan pertimbangan: (1) mengembangkan akses menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara). Hal ini sejalan dengan orientasi pemasaran komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya berupa komoditi perkebunan (sawit dan karet) serta hasil tambang batu bara; (2) Pengembangan akses jalan lingkaran utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya serta ruas jalan lingkaran Sungai Batanghari untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mengurangi beban jalan Lintas Sumatera, (3) pengembangan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo; (4) Pengembangan akses permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan yaitu menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung sebagai PPWp, kawasan perkotaan Sungai Rumbai sebagai PKL, serta PPK dan PPL; dan (5) meningkatkan akses pendukung produksi dari kawasan pertanian; (6) Untuk mendukung akses transportasi maka dibutuhkan pembangunan jembatan melintasi sungai yaitu seperti: Pengembangan jembatan gantung melintasi Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya, pengembangan jembatan melintasi Sungai Batanghari di Batu Rijal – menuju Padang Laweh dan lokasi lainnya yang membutuhkan.

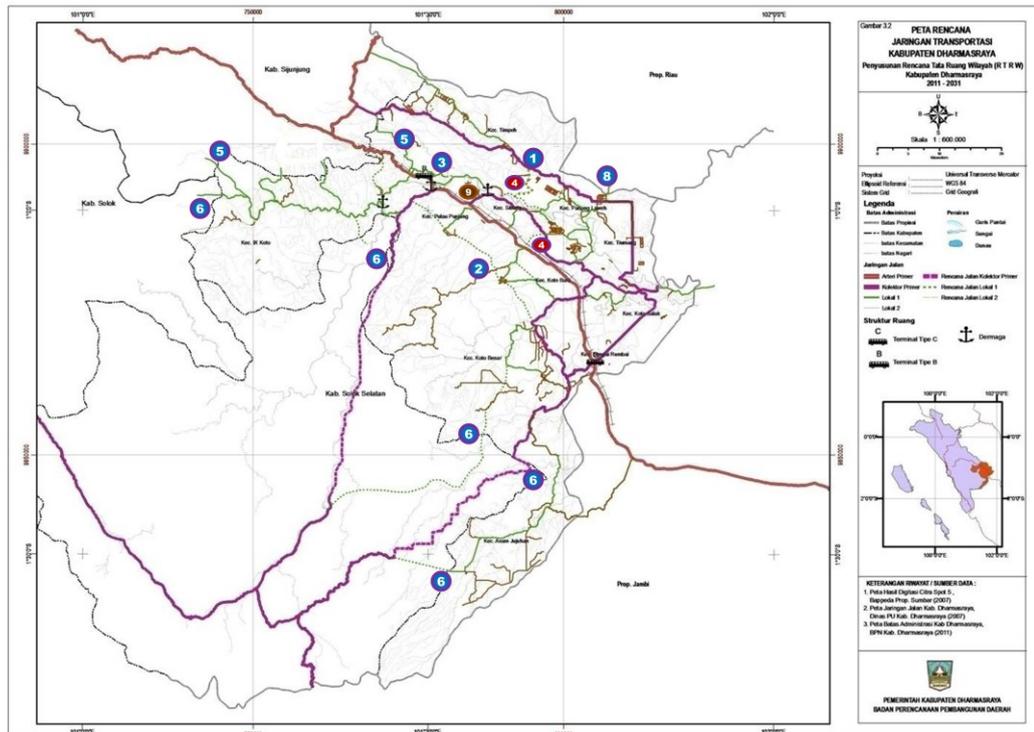
Selain itu dilihat dari moda transportasi sungai, Sungai Batanghari masih berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur transportasi wisata alam dan budaya di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki peninggalan historis yang bernilai tinggi. Segmen sungai antara Bendung Batubakawik – Pasar lama Pulau Punjung – Siguntur berpotensi dikembangkan sebagai wisata air dan sekaligus jalur akses menuju kawasan wisata bersejarah Dharmasraya di Siguntur.



Sebagai pendukung, pengembangan terminal perlu dilakukan pada kawasan perkotaan utama yaitu Pulau Punjung yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Pengembangan (PKWp) dan Kota Sungai Rumbai yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Rencana pengembangan jaringan transportasi dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 terlihat pada peta berikut ini.

**Gambar 21: Peta Rencana Jaringan Transportasi Kabupaten Dharmasraya**



1. Pengembangan jalan lingkaran utara
  - Sungai Rumbai – Ampalu – Sungai Langkok - Padang Laweh – Timpeh - Kamang Baru (kolektor primer)
2. Pengembangan jalan lingkaran selatan
  - Sungai Rumbai – Koto Besar - Bukit Gadiang – Aur Jaya - Bukit Mindawa – Sungai Dareh (lokal)
3. Pengembangan jalan lingkaran Sungai Batang Hari
  - Kampung Surau – Lubuk Bulang - Siluluak- Sungai Langsek –Pulau Tengah Sitiung - Pulai- Bukit Tujuh
4. Pengembangan jalan menuju pusat kegiatan
  - Panyubarangan – Sungai Langsek (menuju Kota Pulau Punjung)
  - Koto Padang – rencana pusat kegiatan masyarakat –Sungai Atang - Koto Baringin -Batu Rijal – Padang Laweh
  - Simpang Abai – Lubuak Harto
  - Jalan lingkaran Sungai Rumbai
  - Jalan usaha tani (kaw minapolitan) (Koto Tuo – Tebing Tinggi)
  - Siguntur –Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata)
5. Pengembangan jalan Perbatasan dengan Kabupaten Sijunjung
  - Pulau Punjung – Kampung surau - PT Bina – Sungai Tambang
  - Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan
  - Sungai Dareh menuju batas Solok Selatan (Pulau Panjang - Abai Sangir– Lubuak Malako)
  - Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Solok Selatan (Abai Sangir– Lubuak Malako)
  - Sungai Rumbai – Lubuk Karya – menuju batas Solok Selatan (Lubuak Malako)

- Sungai Rumbai – Sinamar – Sungai Limau - Batu Kangkung – Lubuk Besar - menuju batas Solok Selatan (Taluak Aia Putih – Pungut Kerinci)
- 6. Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tebo
  - Ampalu – Pulau Mainan - Tj. Simalidu – menuju batas Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur)
- 7. Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Sengingi
  - Sopanjaya – menuju batas Kuantan Sengingi (Sungkai– Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera)
- 8. Pengembangan jembatan (gantung) melintas Sungai Batang Hari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
- 9. Pengembangan jembatan melintas Sungai Batang Hari di Batu Rijal –menuju Padang Laweh.

Selain itu terdapat rencana pembangunan jalur Sawahlunto - Muaro - Teluk Kuantan/Pekanbaru dan Muaro - Muaro Bungo bagian dari rencana jaringan Kereta Api Trans Sumatera (Connecting Trans Sumatera Railway) yang menjadi peluang untuk pengembangan kegiatan pergudangan (transshipment) di Dharmasraya.

Sungai Batanghari masih berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur transportasi wisata alam dan budaya di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki peninggalan historis yang bernilai tinggi.

Simpul transportasi berupa lokasi dermaga sungai yang terdapat di sepanjang alur Sungai Batanghari yaitu: Bendung Batubakawik (tepi barat), Pasar Lama Pulau Punjung (tepi barat), Siluluak (tepi barat), Siguntur (tepi timur), Baturijal (tepi timur), Padang Laweh (tepi barat) dan Simalidu (tepi timur).

Segmen yang terdapat antara Bendung Batubakawik – Pasar lama Pulau Punjung – Siguntur berpotensi dikembangkan sebagai wisata air dan sekaligus jalur akses menuju kawasan wisata bersejarah Dharmasraya di Siguntur.

Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Dharmasraya disesuaikan dengan fungsi kota. Rencana tersebut yaitu:

Terminal tipe B di kawasan perkotaan Pulau Punjung yang berfungsi sebagai PKWp.  
Terminal tipe C di Kota Sungai Rumbai yang berfungsi sebagai PKL.

### Prasarana Sumberdaya Air



Sumberdaya air untuk keperluan pengairan lahan sawah di Kabupaten Dharmasraya cukup besar. Kapasitas irigasi Batanghari baru termamfaatkan lebih kurang 11 m3 dengan total kapasitas mencapai luas pengairan 18.936 Ha dengan debit 25 m3/dt. dan

D.I. yang dikelola kabupaten pada lahan lebih kurang 3.500 Ha memerlukan juga peningkatan pengairan. Keberhasilan pengelolaan sumber daya air sangat ditentukan oleh personil pengelola jaringan irigasi

Gambaran pencapaian keberhasilan pengembangan sumberdaya air yaitu: (1) pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan selanjutnya dalam jangka panjang masih terdapat potensi ekstensifikasi lahan seluas 3.276 Ha (total luas 5.000 Ha); (2) meningkatnya pengairan pada D.I. Kabupaten; dan (3) terdapatnya manajemen air yang semakin handal.

### f. Prasarana Kawasan Permukiman dan Perumahan

Kawasan permukiman dan perumahan yang tidak layak huni terutama di Sungai Rumbai, Koto Baru dan Pulau Punjung secara bertahap perlu diprioritaskan

---

penyediaan prasarana lingkungannya terutama pada kawasan yang memiliki kasus penyakit yang diakibatkan buruknya sanitasi lingkungan.

Gambaran pencapaian keberhasilan perbaikan kawasan permukiman dan perumahan dimasa depan yaitu: (1) berkurangnya jumlah permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni, dan (2) berkurangnya kasus penyakit akibat sanitasi lingkungan yang buruk.

#### **g. Sarana Prasarana Kawasan Tertinggal**

Kawasan tertinggal adalah kawasan yang mengalami keterisolasian akibat minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan pelayanan publik lainnya, ekonomi yang kurang berkembang diakibatkan akses pasar yang tidak ada, serta prasarana sosial seperti sekolah dan puskesmas yang minim.

Di Kabupaten Dharmasraya saat ini terdapat 31 nagari tertinggal yang terdapat di 10 kecamatan dan 16 nagari terpencil yang terdapat pada 4 kecamatan. Khusus Kecamatan IX Koto dan Asam Jujuhan memiliki kawasan yang sangat terpencil yang membutuhkan prioritas penanganan ketertinggalan.

Pembangunan di kawasan tertinggal perlu diprioritaskan dalam menciptakan pemerataan pembangunan. Diharapkan secara bertahap tercapai pemerataan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

### **G. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan**

#### **Pengembangan Sistem informasi Pengelolaan Pembangunan Daerah**

Penyediaan data base yang akurat merupakan suatu keharusan agar berbagai perencanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pembangunan daerah akan menjadi hal vital dalam pembangunan daerah dimasa depan. Dalam hal ini, Departemen Dalam Negeri pernah menginstruksikan untuk mengembangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) di Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu secara bertahap mengembangkan sistem informasi pengelolaan pembangunan Daerah.

Sistem pengelolaan pembangunan daerah tersebut terdiri dari: sistem informasi data base daerah, sistem informasi data spasial, sistem informasi perencanaan pembangunan, sistem informasi keuangan daerah, sistem informasi pengendalian pembangunan, sistem informasi kepegawaian, sistem administrasi kependudukan, sistem informasi perijinan, dan lainnya. Pengelolaan basis data dan informasi daerah untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pengembangan peluang investasi daerah agar efektif perlu ditangani oleh satu unit fungsional “pangkalan data dan informasi” dengan alternatif dibawah sekretariat daerah yang mempunyai kewenangan untuk menghimpun, mengolah dan mendistribusikan data dan informasi dari SKPD dalam bentuk data elektronik.

---

Peran nagari sebagai penyedia informasi basis data juga sangat penting. Profil nagari perlu disusun agar dapat menggambarkan masalah, potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan nagari. Profil nagari yang lengkap menjadi salah satu syarat mutlak agar pendekatan pembangunan bottom-up berbasis nagari dapat berjalan dengan efektif. Selain itu dengan kecenderungan banyaknya program pembangunan dan bantuan dari lembaga donor dengan pendekatan partisipatif ditujukan pada satuan terkecil daerah (dalam hal ini nagari) maka data dan informasi nagari yang relevan dengan program pembangunan menjadi sangat penting.

Isu lain yang penting diperhatikan dalam sistem informasi pengelolaan pembangunan adalah tersedianya sistem informasi pertanahan yang mampu mengkoordinasikan data pertanahan lintas instansi yang mengurus lahan. Dengan sistem informasi yang baik dapat dicegah tumpang tindih status lahan dan konflik pertanahan dapat diidentifikasi dari awal, demikian juga perijinan dapat dilakukan dengan pertimbangan data yang andal.

### **Pembakuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah**



Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, penyusunan RKPD dan terakhir penyusunan APBD. Proses perencanaan secara sistemik dilakukan untuk menjamin alokasi anggaran pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan menjamin konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Proses perencanaan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan efisien perlu diselenggarakan dengan prosedur dan metoda baku. Untuk itu dibutuhkan dukungan data dan informasi yang akurat pada setiap instansi dan tingkatan mulai dari nagari, kecamatan, dan kabupaten; usulan yang terumuskan dengan baik; serta prosedur penentuan prioritas kegiatan yang akan dianggarkan dalam kerangka menjamin alokasi sumberdaya yang optimal dan adil.

### **Pengembangan Kelembagaan Investasi**

Pola investasi khususnya terkait dengan pertanian dan industri yang membutuhkan modal besar biasanya dilakukan oleh pihak investor swasta berjangka panjang (25-50 tahun). Dalam model ini porsi keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam ikut aktif mengelola usaha terbatas.

Disisi lain terdapat alternatif pola investasi yang dapat melibatkan berbagai sumber daya pengelolaan didaerah secara optimal. Pola investasi dengan pendekatan sumber daya dalam pembangunan melihat adanya berbagai peluang bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan sehingga masyarakat tidak hanya sebatas tenaga

---

kerja atau penonton. Manfaat ekonomi yang didapat masyarakat dan daerah juga menjadi besar.

Masyarakat memiliki sumberdaya utama berupa: lahan, organisasi, tenaga kerja. Swasta memiliki sumber daya berupa: modal, peralatan, fasilitas. Pemerintah memiliki sumber daya berupa: anggaran, organisasi, dan regulasi. Perlu dikembangkan alternatif bentuk pola investasi yang dapat secara optimal mengkombinasikan sumberdaya tersebut sehingga memberikan manfaat ekonomi yang besar serta mampu mendorong kemandirian ekonomi di Kabupaten Dharmasraya yang kaya sumber daya alam.

Alternatif bentuk pola investasi yang mampu mensinergikan berbagai sumberdaya yang dimiliki daerah seperti: pendirian perusahaan daerah dengan kepemilikan saham kolektif antara pemerintah dan masyarakat/organisasi masyarakat, kemitraan usaha melibatkan saham daerah, masyarakat dengan pihak swasta sebagai operator atau bentuk lain yang mungkin dikembangkan.

### **Pengendalian Tata Ruang**

Pengendalian alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan serta pengendalian kegiatan pertambangan liar menjadi isu penting dalam bidang penataan ruang.

Untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan peraturan yang lengkap menyangkut ketentuan perijinan dan sanksi. Selain itu, berbagai bentuk insentif dan disinsentif dibutuhkan untuk mengendalikan secara tidak langsung kecenderungan pemanfaatan ruang. Dalam mengendalikan pembangunan secara lebih efektif dalam wilayah yang luas seperti Kabupaten Dharmasraya, delegasi perijinan pada tingkat kecamatan dan nagari dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata ruang perlu menjadi pertimbangan.

Gambaran pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan dimasa depan yaitu: (1) tercapainya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; (2) berfungsinya Sistem Informasi Pengelolaan Pembangunan Daerah dalam koordinasi pembangunan, investasi dan perijinan; (3) Berfungsinya pola investasi pembangunan yang memanfaatkan potensi sumberdaya daerah dan masyarakat secara optimal, dan (4) terwujudnya pemanfaatan ruang yang harmonis di Kabupaten Dharmasraya.

## **3.2. ISU-ISU STRATEGIS**

Perumusan isu strategis pada bagian ini berdasarkan analisis lingkungan eksternal. Selain berdasarkan pengamatan lingkungan internal, Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan isu-isu pembangunan daerah dengan isu eksternal dalam wilayah lebih luas. Rumusan isu strategis yang dihasilkan adalah keterpaduan/sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan wilayah sekitar dan wilayah yang lebih luas (dengan arah kebijakan rencana jangka panjang nasional, kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi, atau kecenderungan lain berskala nasional, global lainnya dimasa depan).

---

Isu-isu lingkungan eksternal jangka panjang yang selaras dengan isu pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya yaitu: rencana dan target MDGs, RPJPN, MP3EI, Rencana Strategis Sektor/Kementrian, dan RPJP Provinsi.

#### MDGs Tahun 2015

Berbagai tujuan dan arget pencapaian MDGs yang relevan untuk rujukan perumusan isu strategis pembangunan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan target: menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (ppp) per hari; dan menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda; dan menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan
2. mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target: menjamin semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target: menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan
4. menurunkan angka kematian anak dengan target: menurunkan angka kematian balita, bayi, neonatal.
5. meningkatkan kesehatan ibu dengan target: menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua
6. memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan target: memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang; mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan laju kehilangan yang signifikan; menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar; dan mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

#### RPJPN Tahun 2005-2025

Visi pembangunan nasional tahun seperti tertera dalam RPJP Nasional 2005–2025 adalah: “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

- 
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
  6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
  7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
  8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

#### Isu Strategis Sektor/Kementrian

- a) Arah kebijakan pangan dalam RPJP Nasional yaitu menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Salah satu program utama pemerintah yaitu mewujudkan swasembada beras. Sebagai pendukung telah ada Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- b) Program Swasembada Daging Sapi 2014 (PSDS-2014). Sumatera Barat ditetapkan sebagai salah satu dari 18 sentra sapi potong. Salah satu program yang prospektif yaitu sistem integrasi Tanaman –Ternak seperti integrasi kelapa sawit-sapi.
- c) Dalam Rencana Jangka Menengah Nasional, salah satu pendekatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep Minapolitan. Kabupaten Dharmasraya menjadi salahsatu daerah pengembangan minapolitan.
- d) Beberapa agenda penting dalam pembangunan sektor perkebunan bagi perbaikan rantai nilai kelapa sawit dan karet dalam MP3EI yang perlu dilihat sebagai acuan pembangunan komoditi yang sama di Kabupaten Dharmasraya yaitu:
  - Peningkatan produksi kelapa sawit akan lebih difokuskan kepada peningkatan produktifitas CPO per hektar, yang saat ini baru mencapai 3,8 Ton/Ha, mengejar ketertinggalan dari Malaysia yang telah mampu mencapai 4,6 Ton/Ha.
  - Perbaikan infrastruktur jalan (akses jalan) dari lahan ke PKS, dan penyediaan tangki timbun yang memadai. Hasil penggilingan secara terstruktur harus mampu ditingkatkan, yakni dari rata-rata produksi CPO sekitar 21% menjadi diantara 24 – 25%.
  - Hilirisasi produk kelapa sawit untuk memperkuat posisi strategis Indonesia.
  - Perbaikan mutu bibit karet (wajib bersertifikat), perbaikan teknik budi daya (jarak tanam) dan perawatan tanaman karet yang baik. Sebanyak mungkin dihimbau untuk menggunakan kultivar karet bibit unggul (siap panen umur 3,5 tahun);
  - Melakukan budidaya tumpang sari pada dua tahun pertama budidaya karet dengan tanaman pangan, seperti kacang tanah, jagung, ubi jalar dll, sehingga menambah penghasilan petani karet, dan secara tidak langsung ikut membangun ketahanan pangan setempat;
  - Mengeliminasi kecurangan pencampuran lateks dengan bahan-bahan pengotor karet oleh para petani karet, serta meminimalkan jumlah pedagang perantara karet, agar penghasilan yang diterima petani menjadi lebih besar;

- 
- Penataan kelembagaan dan eksistensi para pengolah karet rakyat yang tidak efisien, perbaikan teknik pengolahan karet rakyat (bokar) dan karet lembaran (sheet);
  - Menumbuhkembangkan industri produk hilir karet di dalam negeri, terutama untuk ban, sarung tangan, busa kasur dan bantal, kondom, sol sepatu, vulkanisir ban dan lain sebagainya.
- e) Program nasional Kementerian Perdagangan untuk merevitalisasi pasar tradisional di seluruh tanah air (yang berjumlah 12.000- 13.000 unit pasar) untuk menjadi pasar rakyat yang handal dan berdaya saing.
- f) Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, menyatakan bahwa informasi geospasial merupakan dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Sistem informasi geospasial perlu dibuat terintegrasi secara nasional seperti disosialisasikan oleh Bakosurtanal.
- g) Kecenderungan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang aspiratif dan partisipatif seperti skema PNPM dan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- h) Kecenderungan untuk terus melakukan pengelolaan data berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- i) Tata ruang sebagai aspek penting pemandu investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### MP3EI

Meskipun tidak termasuk kedalam rencana MP3EI Koridor Sumatera tetapi dengan posisi geografis yang berdekatan dan komoditi unggulan daerah yang sama maka berbagai program pengembangannya perlu dilihat sebagai rujukan pembangunan daerah. Tema pembangunan MP3EI koridor Sumatera yaitu Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional dengan komoditi utama kelapa sawit, karet, batu bara, Perkapalan, Besi Baja, dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda. Tiga komoditi utama pertama adalah menjadi komoditi utama Kabupaten Dharmasraya. Mengkaitkan peluang pembangunan Kabupaten Dharmasraya dengan adanya pengembangan MP3EI menjadi salah satu isu penting.

#### RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 yaitu: Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025. Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah: Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. Salah satu agenda penting dalam rencana pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut yaitu memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Sasaran pembangunannya yaitu pemantapan pemerintahan nagari, sistem pengelolaan keuangan nagari, peningkatan SDM penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan partisipasi masyarakat (perantau dalam pembangunan nagari).

**Tabel 50 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten dengan Isu Nasional dan Provinsi**

No.	Isu Nasional dan Provinsi	Isu Kabupaten Dharmasraya
<b>A</b>	<b>Demografi dan Kesejahteraan Penduduk (Modal Manusia)</b>	
	Penurunan angka kelahiran secara nasional	penurunan laju pertumbuhan penduduk.
	Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	nilai IPM yang rendah.
		Menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
		Pemerataan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan.
		Peremberantasan buta huruf
		Pengembangan usaha ekonomi bagi penduduk berpendapatan rendah.
		Pengembangan fungsi pelayanan kesehatan bagi daerah perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya.
<b>B</b>	<b>Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam yang Bernilai Tambah dan Mandiri (Modal Sumber Daya Alam)</b>	
	Ketahanan pangan dan swasembada beras	Pengendalian alih fungsi lahan sawah yang ada
		Peningkatan luas lahan sawah D.I. Batanghari dan D.I. kabupaten
		Pengembangan agribisnis hortikultura buah-buahan
	Pembangunan perikanan berbasis wilayah (minapolitan)	Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Dharmasraya
	Swasembada Daging Sapi Nasional, Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu sentra.	Pengembangan peternakan sapi potong dengan strategi utama integrasi kelapa sawit - sapi potong.
	Pengembangan daya saing komoditas unggulan karet, kelapa sawit, kakao.	Meningkatnya produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit, kako dan kopi
		Berkembangnya kemandirian daerah dalam kegiatan perkebunan melalui pembangunan pabrik pengolahan sawit dan karet, pengolahan karet rakyat, pengendalian fluktuasi harga, peningkatan akses jala.
	Pengolahan hasil tambang dan kebijakan pertambangan yang memberi manfaat bagi masyarakat	Pengembangan eksploitasi pertambangan yang memberi manfaat sosial yang besar dan ramah lingkungan.
	Peningkatan ketersediaan RTH	Pengembangan objek wisata dan rekreasi alam per klaster wisata dan rekreasi.
<b>C</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup (Modal Lingkungan)</b>	
	Misi nasional mewujudkan Indonesia asri dan lestari	Pelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya.
		Pemanfaatan hasil hutan secara lestari bagi penduduk sekitar.
		Pengendalian pencemaran sungai
<b>D</b>	<b>Pemberdayaan Nagari dan Masyarakat dalam Aspek Sosial- Budaya dan Sosial Ekonomi (Modal Sosial dan Budaya)</b>	
	Pemberdayaan nagari sebagai basis pembangunan daerah.	Pengembangan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat untuk mewujudkan kemandirian
		Pemberdayaan fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari.
		Pengembangan kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari.
		Penguatan adat sebagai modal budaya pengaturan kehidupan keluarga dan bermasyarakat.
		Pemeliharaan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata.
<b>E</b>	<b>Penguatan Dukungan Sarana Prasarana (Modal Sarana Prasarana)</b>	
	Misi RPJPD mengurangi kesenjangan	Penataan sarana pasar untuk orientasi belanja kebutuhan

No.	Isu Nasional dan Provinsi	Isu Kabupaten Dharmasraya
	sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat	sekunder penduduk di kawasan perdagangan kabupaten dan sekitarnya.
	Peningkatan ketersediaan RTH	Menyediakan sarana lapangan olah raga serbaguna untuk lingkup kabupaten, kecamatan dan nagari.
	membangun infrastruktur yang maju	Peningkatan akses transportasi jalan untuk produksi dan pelayanan masyarakat Terlayannya persampahan pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai.
	Peningkatan rasio elektrifikasi nasional	Terwujudnya akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten.
	Sasaran MDGs menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar	Meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi layak sesuai standar MDGs Semakin baiknya sarana pembuangan limbah tinja RT dan terbangunnya IPLT dimasa depan. Meningkatnya akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan. Sesuai standar MDGs Terlayannya air bersih perpipaan PDAM terutama pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai)
	Sasaran MDGs peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.	Semakin berkurangnya lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni
<b>F</b>	<b>Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan</b>	
	Standarisasi perosedur Perencanaan Pembangunan nasional dan daerah	Terselenggaranya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang baku dan konsisten.
	Kecenderungan untuk melakukan pengelolaan data berbasis teknologi informasi	Tersedianya Sistem informasi Pengelolaan Pembangunan Daerah
	Tata ruang sebagai aspek penting pemandu investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang	Terkendalinya tata ruang terkait dengan alih fungsi lahan sawah, kawasan hutan dan pengembangan kegiatan pertambangan.

### Penelaahan Keterpaduan Dengan Rencana Pembangunan Daerah Tetangga

Kebutuhan Keterpaduan rencana pembangunan Kabupaten Dharmasraya dengan daerah kabupaten tetangga yang perlu dibangun dalam jangka panjang yaitu dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan antar daerah.

Peluang pengembangan kerjasama antar daerah tersebut yaitu: (a) kerjasama peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo, (b) Konektivitas tersebut berkaitan dengan kerjasama penyediaan kegiatan perdagangan serta pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan di perbatasan, (c) kerjasama pengendalian kawasan hutan dan hulu sungai dalam DAS Batanghari dengan kabupaten Solok dan Solok Selatan, dan (d) kerjasama pemberian insentif dan disinsentif dalam pengembangan kawasan DAS Batanghari dengan kabupaten tetangga dan kabupaten/kota di hilir DAS Batanghari.

Simpul-simpul konektivitas di Kabupaten Dharmasraya dalam kerangka kerjasama pengembangan kawasan perbatasan yaitu: Silago di kawasan perbatasan Dharmasraya – Solok; Padang Laweh di kawasan perbatasan Dharmasraya – Kuantan Singingi; Sungai

---

Limau dan Sungai Rumbai di Kawasan Perbatasan Dharmasraya – Bungo; Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai di kawasan perbatasan Dharmasraya – Solok Selatan.

# BAB 4

## VISI DAN MISI DAERAH

### 4.1 Visi

Visi adalah gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan. Visi jangka panjang Kabupaten Dharmasraya sampai pada tahun 2025 yaitu:

***Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya<sup>4</sup>***

*Pengertian dari visi:*

**Maju** : Masyarakat sejahtera dan mandiri serta Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.

**Berbudaya** : Masyarakat cerdas, pembangunan berkeadilan, serta kehidupan berlandaskan adat, iman dan taqwa.



<sup>4</sup> Hasil Focus Group Discussion (FGD) perumusan visi RPJP Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan atas Kerjasama Bappeda Kabupaten Dharmasraya dengan Perkumpulan Peduli Tahun 2011 merumuskan nilai-nilai yang harus diwujudkan sebagai visi yaitu: "Kabupaten Dharmasraya yang cerdas, sejahtera, mandiri, adil dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa". Rumusan visi: "Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya" adalah ringkasan yang mudah diingat dari nilai visi yang telah dirumuskan sebelumnya.

---

Penjelasan lebih lanjut dari pengertian visi yaitu:

- Kesejahteraan** : Penduduk dengan taraf hidup tinggi, sehat, dengan terpenuhinya kebutuhan hidup secara fisik dan ekonomi.
- Kemandirian** : Pengelolaan sumberdaya alam dan kegiatan ekonomi turunannya melibatkan peran kelompok masyarakat dan memberi manfaat yang besar untuk masyarakat dan daerah.
- Cerdas** : Tingginya tingkat pendidikan formal dan keterampilan dalam mengolah sumberdaya yang dimiliki daerah dan menjalankan kegiatan sosial ekonomi.
- Berkeadilan** : Pemerataan kualitas hidup dalam masyarakat dan Pemerataan pembangunan antar kawasan.
- Pusat pengembangan ekonomi:** Kabupaten Dharmasraya menjadi lokasi utama produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan), kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan pariwisata alam dan budaya di Sumatera Barat Bagian Tenggara yang mencakup juga sebagian wilayah kabupaten di provinsi tetangga.
- Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai simpul kegiatan ekonomi wilayah Sumatera Barat Bagian Tenggara yang terkoneksi dengan pusat pemasaran regional di Pulau Sumatera.
- Pusat pelayanan sosial** : Kabupaten Dharmasraya berperan menjadi lokasi utama orientasi pelayanan pendidikan dan kesehatan di Sumatera Barat Bagian Tenggara yang mencakup juga sebagian wilayah kabupaten di provinsi tetangga.
- Berlandaskan adat, iman dan taqwa** : Kemajuan ekonomi dan kehidupan sehari-hari yang dibingkai oleh norma dan semangat adat dan nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## 4.2 Misi

Misi adalah berbagai upaya untuk mencapai visi. Misi Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai

upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi paguyuban, kelembagaan adat, karang taruna dan lainnya) sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.
7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

**Tabel 51 : Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya**

Visi	Misi
Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya	
Kabupaten Dharmasraya maju. <i>Pengertian maju: Masyarakat sejahtera dan mandiri serta Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.</i>	1. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
	2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.
	3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
	4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
	5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
Kabupaten Dharmasraya berbudaya. <i>Pengertian berbudaya: Masyarakat cerdas, pembangunan berkeadilan, serta kehidupan berlandaskan adat, iman dan taqwa</i>	6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.
	7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

# BAB 5

## ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

*Sasaran pokok menggambarkan kondisi yang diinginkan dengan pencapaian visi/misi pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun.*

*Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap.*

*Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.*

### 5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya



Sasaran pembangunan yang diturunkan dari 7 (tujuh) misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya yaitu terdiri dari 28 sasaran pokok dan 63 arah kebijakan pembangunan diuraikan berikut ini.

**Misi 1:** Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran pokok untuk pengembangan bidang kependudukan dan kualitas sumberdaya manusia yaitu:

1. Tercapainya penurunan laju pertumbuhan penduduk.
2. Meningkatnya nilai IPM mencapai rata-rata Provinsi Sumatera Barat.
3. Terlayannya pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.
4. Tercapainya Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 1) Menggalakkan program Keluarga Berencana (yang bisa diintegrasikan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah) .
- 2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif dan preventif.
- 3) Meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA.
- 4) Memeratakan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan.
- 5) Meningkatkan kualitas sekolah (dengan mengembangkan berbagai bentuk program seperti mengadakan sekolah berstandar nasional pada jenjang SD, SMP dan SMA dan semakin banyaknya sekolah dengan program “full day”)
- 6) Membebaskan kabupaten dari buta huruf.
- 7) Peningkatan kualitas keluarga.
- 8) Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.
- 9) Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional dengan:
  - peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya dengan meningkatkan sumberdaya kesehatan dan sarana prasarana kesehatan.
  - mengembangkan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan khususnya bidang pertanian dan kesehatan.

**Misi 2:** Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

#### Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran pokok untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yaitu:

5. Meningkatnya produksi dan produktifitas padi sawah untuk memantapkan peran Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung ketahanan pangan.
6. Berkembangnya klaster agribisnis hortikultura berdaya saing tinggi.

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 10) Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif produksi bagi petani. Kebijakan didukung dengan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada area beririgasi teknis.

- 
- 11) Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari seluas 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang.
  - 12) Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.
  - 13) Mengembangkan agribisnis hortikultura buah-buahan khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster.

#### Perikanan

Sasaran pokok untuk pengembangan perikanan yaitu:

7. Berkembangnya kawasan minapolitan di Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra perikanan darat pada wilayah Sumatera Barat bagian tenggara.

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 14) Meningkatkan produksi perikanan mencapai lebih 300% sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi wilayah Sumatera Barat bagian tenggara (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya).
- 15) Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan (balai benih, balai penelitian, pasar minapolitan).

#### Perkebunan

Sasaran pokok untuk pengembangan perkebunan yaitu:

8. Berkembangnya usaha perkebunan rakyat yang maju dan mandiri.

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 16) Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao melalui jaminan input produksi (seperti bibit unggul, distribusi pupuk).
- 17) Peremajaan tanaman perkebunan sawit dan karet.
- 18) Membangun pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas PKS 150 ton/jam.
- 19) Membangun pabrik pengolahan industri hilir makanan (minyak goreng) untuk pasar Sumatera Barat dan wilayah sekitar.
- 20) Mengembangkan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan pengolahan lebih lanjut produk karet.
- 21) Mengembangkan komoditi potensial perkebunan lainnya seperti kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi wilayah.
- 22) Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao).
- 23) Mengembangkan pasar lelang agro hasil perkebunan.
- 24) Membangun pola investasi usaha budidaya perkebunan dan industri yang mendorong kemandirian petani dengan melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, lembaga nagari, dan pemerintah daerah).
- 25) Meningkatkan akses menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.

---

### Peternakan

Sasaran pokok untuk pengembangan peternakan yaitu:

9. Berkembangnya budidaya sapi potong dengan strategi utama pengembangan integrasi kelapa sawit - sapi potong.

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 26) Memberdayakan petani peternak dalam budidaya sapi potong mencapai minimal 2 kali lipat dari jumlah sapi sekarang (mencapai minimal 50.000 ekor).
- 27) Mengembangkan dan melengkapi sarana pendukung sentra peternakan (pasar ternak, rumah potong hewan, puskesmas).

### Pertambangan

Sasaran pokok untuk pengembangan pertambangan yaitu:

10. Berkembangnya kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang yang berkelanjutan dan memberi manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 28) Mengorientasikan kegiatan pertambangan yang memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat
- 29) Mengembangkan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan.
- 30) Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang.
- 31) Melakukan reklamasi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat.

### Industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

11. Berkembangnya usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM) prospektif.

- 32) Percepatan peningkatan produksi dan pasar industri dan usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif.

Dengan pencapaian misi ke-2: pemanfaatan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar, maka diharapkan tingkat pendapatan penduduk akan meningkat sehingga indikator pengeluaran perkapita dalam IPM penduduk Kabupaten Dharmasraya yang pada tahun 2011 yang berada pada urutan ke 18 di Provinsi Sumatera Barat dapat meningkat mencapai rata-rata Sumatera Barat pada tahun 2025.

**Misi 3:** Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pokok untuk kualitas lingkungan yaitu:

12. Terjaganya kelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya.
13. Terkendalinya pemanfaatan lahan budidaya sesuai aturan tata ruang

---

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 33) Mengembangkan kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari bagi penduduk sekitar.
- 34) Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan.
- 35) Menjaga kualitas dan debit air sungai Batanghari
- 36) Meminimalkan kerawanan bencana longsor dan erosi lahan.
- 37) Mengarahkan kegiatan budidaya pertanian dan eksploitasi pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

**Misi 4:** Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sasaran pokok untuk memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi yaitu:

14. Berkembangnya fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari.
15. Meningkatnya kemandirian ekonomi terkait pengelolaan usaha, distribusi barang, pengolahan hasil, dan pemasaran.

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 38) Memperkuat fungsi nagari sebagai pelaku kegiatan sosial-budaya.
- 39) Mengembangkan fungsi nagari sebagai pelaku sosial-ekonomi.
- 40) Memberdayakan berbagai lembaga pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.

**Misi 5:** Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan

Sasaran pokok untuk aspek prasarana dan sarana yaitu:

16. Tersedianya pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan internal daerah serta menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya.
17. Terpenuhinya sarana prasarana untuk mengentaskan kawasan tertinggal (yaitu kawasan terisolir akibat minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan pelayanan publik lainnya, ekonomi kurang berkembang diakibatkan akses pasar yang sulit, serta prasarana sosial seperti sekolah dan puskesmas yang minim).
18. Berkembangnya kawasan dan objek wisata dan rekreasi dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serba guna (Sebagian pengeluaran masyarakat untuk rekreasi dan wisata dibelanjakan di daerah sendiri dan dapat mendatangkan pengunjung dari luar daerah).
19. Terpenuhinya kebutuhan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman minimal mencapai standar pelayanan minimal.
20. Tersedianya dukungan prasarana sumber daya air pendukung kegiatan produktif.
21. Tingginya tingkat keterjangkauan (aksesibilitas) antar kawasan di daerah.
22. Terjalinnnya konektivitas wilayah Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten sekitarnya (Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Kuantan Singingi, Bungo, dan Tebo) serta dengan pusat kegiatan ekonomi koridor Pulau Sumatera.

---

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 41) Revitalisasi pasar-pasar nagari sebagai tempat pemenuhan kebutuhan harian penduduk yang nyaman.
- 42) Pengembangan pasar tematik (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan) untuk mendukung fungsi Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- 43) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, kawasan perkotaan Padang Laweh yang berprospek berkembang dimasa depan serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.
- 44) Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal.
- 45) Membangun kawasan terpadu wisata alam-budaya serta taman rekreasi bertema (*theme park*).
- 46) Membangun objek wisata dan rekreasi prioritas kawasan.
- 47) Membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) serbaguna untuk tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).
- 48) Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya).
- 49) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs.
- 50) Terlayannya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai).
- 51) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.
  - Meningkatkan jumlah rumah tangga perkotaan dan perdesaan dengan akses sanitasi layak minimal mencapai standar MDGs.
  - Melengkapi kebutuhan prasarana sanitasi dengan membangun sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
  - Meningkatkan pelayanan persampahan pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai yang mampu melayani wilayah bagian utara dan selatan kabupaten.
- 52) Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.
- 53) Membangun Prasarana Pengairan
  - pengembangan jaringan irigasi dalam D.I. Batanghari dan D.I. Kabupaten.
  - Mengembangkan manajemen air irigasi yang handal.
- 54) Membangun jaringan transportasi antar kawasan.
  - Mengembangkan akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan dan kawasan pertanian.
  - Membangun prasarana terminal pada pusat perdagangan.
  - Mengembangkan moda transportasi sungai Batanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya.
- 55) Membangun jaringan transportasi antar wilayah.
  - Membangun akses menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara).
  - Mengembangkan akses jalan lingkar utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya serta ruas jalan lingkar Sungai Batanghari untuk

---

menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mengurangi beban jalan Lintas Sumatera.

- Mengembangkan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo;
- mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara dan sungai.

**Misi 6:** Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.

Sasaran pokok untuk menegakkan kehidupan beragama dan beradat yaitu:

23. Tetap berperannya adat dan tradisi serta lestariannya identitas daerah.

24. Mewujudkan kehidupan yang religius.

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

56) Memperkuat peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan peri kehidupan masyarakat.

57) Melestarikan situs budaya dan potensi pemanfaatannya sebagai aset wisata.

58) Mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari.

**Misi 7:** Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan

Sasaran pokok untuk tata kelola pemerintahan yaitu:

25. Terbangunnya sistem perencanaan prioritas pembangunan daerah yang baku dan konsisten.

26. Tersedianya sistem informasi pengelolaan pembangunan daerah yang akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

27. Berkembangnya pola investasi pembangunan berbasis kemandirian daerah.

28. Terbangunnya mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif.

Arah kebijakan pembangunan yaitu:

59) Menyusun dan menyelenggarakan standar prosedur dan metoda baku sebagai pedoman penentuan prioritas pembangunan.

60) Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari

61) Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.

62) Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, badan usaha pemerintah, nagari dan *Community Social Responsibility* – CSR- dari perusahaan swasta).

63) Mengefektifkan aspek perijinan, pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.

**Tabel 52: Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025**

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat	1. Tercapainya penurunan laju pertumbuhan penduduk.	(1) Menggalakkan program Keluarga Berencana.
	2. Meningkatnya nilai IPM mencapai rata-rata provinsi Sumatera Barat.	(2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif dan preventif. (3) Meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA. (4) Memeratakan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan. (5) Meningkatkan kualitas sekolah (dengan mengembangkan berbagai bentuk program seperti mengadakan sekolah berstandar nasional pada jenjang SD, SMP dan SMA atau program "full day school") (6) Membebaskan kabupaten dari buta huruf. (7) Peningkatan kualitas keluarga.
	3. Terlayannya pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.	(8) Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.
	4. Tercapainya Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.	(9) Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional dengan: – peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya dengan meningkatkan sumberdaya kesehatan dan sarana prasarana kesehatan. – mengembangkan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan khususnya bidang pertanian dan kesehatan.
Misi 2 : Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.	Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Peningkatan produksi dan produktifitas padi sawah untuk memantapkan peran Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung ketahanan pangan.	(10) Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif produksi bagi petani. Kebijakan didukung dengan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada area beririgasi teknis. (11) Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari seluas 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang. (12) Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.
	6. Berkembangnya klaster agribisnis hortikultura berdaya saing tinggi.	(13) Mengembangkan agribisnis hortikultura buah-buahan khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster.
	Bidang Perikanan 7. Berkembangnya kawasan minapolitan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra perikanan darat pada wilayah Sumatera Barat bagian tenggara.	(14) Meningkatkan produksi perikanan sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi wilayah Sumatera Barat bagian tenggara (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya) mencapai lebih 300%. (15) Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan (balai benih, balai penelitian, pasar minapolitan).

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	Bidang Perkebunan 8. Berkembangnya usaha perkebunan rakyat yang maju dan mandiri.	(16) Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao. (17) Peremajaan tanaman perkebunan sawit dan karet. (18) Membangun pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas PKS 150 ton/jam. (19) Membangun pabrik pengolahan industri hilir makanan (minyak goreng) untuk pasar Sumatera Barat dan wilayah sekitar. (20) Mengembangkan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan pengolahan lebih lanjut produk karet. (21) Mengembangkan komoditi potensial perkebunan lainnya seperti kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi wilayah. (22) Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao). (23) Mengembangkan pasar lelang agro hasil perkebunan. (24) Membangun pola investasi usaha budidaya perkebunan dan industri yang mendorong kemandirian petani dengan melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, nagari, pemerintah). (25) Meningkatkan akses menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.
	Bidang Peternakan 9. Berkembangnya budidaya sapi potong dengan strategi utama pengembangan integrasi kelapa sawit - sapi potong.	(26) Memberdayakan petani peternak dalam budidaya sapi potong mencapai minimal 2 kali lipat dari jumlah sapi sekarang (mencapai minimal 50.000 ekor). (27) Mengembangkan dan melengkapi sarana pendukung sentra peternakan (pasar ternak, rumah potong hewan, puskesmas dan sarana lainnya).
	Bidang Pertambangan 10. Berkembangnya kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang yang berkelanjutan dan memberi manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.	(28) Mengorientasikan kegiatan pertambangan yang memberi dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat (29) Mengembangkan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan. (30) Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang. (31) Melakukan reklamasi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat.
	11. Berkembangnya usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM) prospektif	(32) Percepatan peningkatan produksi dan pasar industri dan usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif.
Misi 3 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	12. Terjaganya kelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya.	(33) Mengembangkan kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hutan kayu dan non kayu secara lestari bagi penduduk sekitar.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		(34) Pengembangan industri hasil hutan.
	13. Terkendalinya pemanfaatan lahan budidaya sesuai aturan tata ruang	(35) Menjaga kualitas dan debit air sungai Batanghari (36) Minimalnya kerawanan bencana longsor dan erosi lahan. (37) Mengarahkan kegiatan budidaya pertanian dan eksploitasi pertambangan sesuai dengan rencana zonasi/tata ruang.
Misi 4 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi	14. Berkembangnya fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari.	(38) Memperkuat fungsi nagari sebagai pelaku kegiatan sosial-budaya.
	15. Meningkatnya kemandirian ekonomi terkait pengelolaan usaha, distribusi barang, pengolahan hasil, dan pemasaran.	(39) Mengembangkan fungsi nagari sebagai pelaku sosial-ekonomi. (40) Memberdayakan berbagai lembaga pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.
Misi 5 : Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.	16. Tersedianya pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan internal daerah serta menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya.	(41) Revitalisasi pasar-pasar nagari sebagai tempat pemenuhan kebutuhan harian penduduk yang nyaman.
		(42) Pengembangan pasar tematik (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan) untuk mendukung fungsi Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan.
		(43) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.
	17. Terpenuhinya sarana prasarana untuk mengentaskan kawasan tertinggal.	(44) Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal
	18. Berkembangnya kawasan dan objek wisata dan rekreasi dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serba guna.	(45) Membangun: – kawasan terpadu wisata alam-budaya serta – taman rekreasi bertema ( <i>theme park</i> ). (46) Mengembangkan objek wisata dan rekreasi prioritas kawasan. (47) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).
19. Terpenuhinya kebutuhan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman minimal mencapai standar pelayanan minimal.	(48) Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya). (49) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs. (50) Terlayannya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai). (51) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Meningkatkan jumlah rumah tangga perkotaan dan perdesaan dengan akses sanitasi layak minimal mencapai standar MDGs.</li> <li>– Melengkapi kebutuhan prasarana sanitasi dengan membangun sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).</li> <li>– Meningkatkan pelayanan persampahan pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai yang mampu melayani wilayah bagian utara dan selatan kabupaten.</li> </ul> <p>(52) Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.</p>
	20. Tersedianya dukungan prasarana sumber daya air pendukung kegiatan produktif.	<p>(53) Membangun Prasarana Pengairan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pengembangan jaringan irigasi dalam D.I. Batanghari dan D.I. Kabupaten.</li> <li>– Mengembangkan manajemen air irigasi yang handal.</li> </ul>
	21. Tingginya tingkat keterjangkauan (aksesibilitas) antar kawasan di daerah.	<p>(54) Membangun jaringan transportasi antar kawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mengembangkan akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan dan kawasan pertanian.</li> <li>– Membangun prasarana terminal pada pusat perdagangan.</li> <li>– Mengembangkan moda transportasi sungai Batanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya.</li> </ul>
	22. Terjalinya konektivitas wilayah Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten sekitarnya (Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Kuantan Singingi, Bungo, dan Tebo) dengan pusat kegiatan ekonomi koridor Pulau Sumatera.	<p>(55) Membangun jaringan transportasi antar wilayah untuk akses ekonomi menuju koridor timur Pulau Sumatera dan kabupaten berbatasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Membangun akses menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara).</li> <li>– Mengembangkan akses jalan lingkar utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mengurangi beban jalan Lintas Sumatera.</li> <li>– Mengembangkan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo;</li> <li>– mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara</li> </ul>
Misi 6 : Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.	23. Tetap berperannya adat dan tradisi serta lestariannya identitas daerah.	<p>(56) Memperkuat peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan peri kehidupan masyarakat.</p> <p>(57) Melestarikan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata.</p>

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	24. Mewujudkan kehidupan yang religius.	(58) Mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari.
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.	25. Terbangunnya sistem perencanaan prioritas pembangunan daerah yang baku dan konsisten.	(59) Menyusun dan menyelenggarakan standar prosedur dan metoda baku sebagai pedoman penentuan prioritas pembangunan.
	26. Tersedianya sistem informasi pengelolaan pembangunan daerah yang akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.	(60) Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari. (61) Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.
	27. Berkembangnya pola investasi pembangunan berbasis kemandirian daerah.	(62) Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, badan usaha pemerintah, nagari, dan CSR).
	28. Terbangunnya mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif.	(63) Mengefektifkan aspek perijinan, pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.

## 5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan

*Tahapan dan prioritas pembangunan merupakan skenario pencapaian visi dan misi jangka panjang dalam periode 5 tahunan. Periode rencana jangka panjang dibagi 4 yaitu: periode I (2005-2010); periode II (2010-2015); periode III (2015-2020); periode IV (2020-2025). Dengan catatan Periode I adalah periode yang telah dilewati dan periode II sebagian sedang berjalan.*

*Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.*

*Tahapan prioritas pembangunan merupakan penyederhanaan pembagian pencapaian visi misi pembangunan jangka panjang dalam bentuk fokus tema atau agenda pembangunan dalam setiap periode jangka menengah (5 tahun).*

### Prioritas Pembangunan Tahap I (2005-2010)

Pembangunan Kabupaten Dharmasraya dalam periode ini telah membawa perubahan berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk kabupaten. Beberapa pencapaian dalam periode ini yaitu secara ekonomi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya termasuk tinggi di Provinsi Sumatera Barat; pembangunan infrastruktur jalan meningkat pesat; program pembangunan dibidang kesejahteraan sosial telah meningkat dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi meskipun pencapaiannya berbagai indikator kesejahteraan seperti IPM masih

---

dibawah rata-rata Sumatera Barat. Dari evaluasi terlihat benang merah prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yaitu:

Mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain sebagai titik awal pembangunan sejak pemekaran wilayah.

### **Prioritas pembangunan Tahap II (2010-2015)**

Prioritas pembangunan tahap II yaitu:

Menyiapkan landasan percepatan pembangunan Kabupaten Dharmasraya dan pemerataan pembangunan dengan membangun infrastruktur, kelembagaan tata kelola pembangunan yang maju dan peningkatan kualitas manusia.

Fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap II yaitu:

- a. Memperkuat sistem perencanaan pembangunan agar terwujud konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
- b. Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari
- c. Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi
- d. Menyiapkan perangkat regulasi dan kelembagaan investasi pembangunan.
- e. Melakukan percepatan pemerataan pembangunan wilayah dengan memprioritaskan pembangunan kawasan tertinggal dan akses penduduk menuju pusat pelayanan.
- f. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar ranking IPM Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat meningkat.
- g. Pemberdayaan pengembangan ekonomi masyarakat.
- h. Membangun sarana prasarana pendukung produksi, pengolahan dan pemasaran.

### **2. Prioritas pembangunan Tahap III (2015-2020)**

Prioritas pembangunan tahap III yaitu:

Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah.

Fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap III yaitu:

- a. Membangun lebih lanjut sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran.
- b. Meningkatkan kemampuan nagari dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi.
- c. Mengembangkan lebih lanjut produksi dan pengolahan hasil produksi untuk mendukung kemandirian perekonomian rakyat.
- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar ranking IPM Kabupaten Dharmasraya mencapai rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

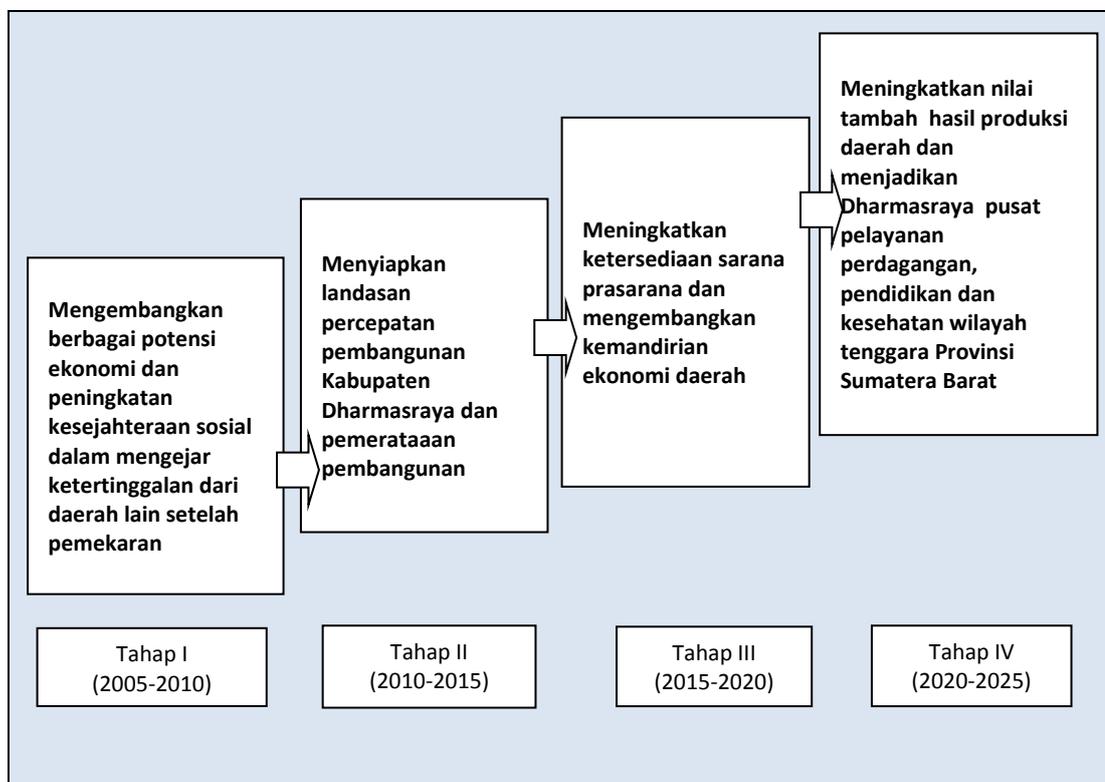
### 3. Prioritas pembangunan Tahap IV (2020-2015)

Meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah dan menjadikan Dharmasraya pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan kesehatan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap IV yaitu:

- Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan pertambangan.
- Mengembangkan pasar sebagai usaha mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat perdagangan.
- Mengembangkan lebih lanjut kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan wisata kabupaten sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

**Gambar 22: Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025**



**Tabel 53: Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya 2005-2025**

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
<b>1</b>	<b>Tercapainya penurunan laju pertumbuhan penduduk</b>							
	1. Menggalakkan program Keluarga Berencana.	jumlah peserta KB dan Laju pertumbuhan Penduduk (LPP)	Peserta keluarga KB aktif 14,5%. LPP 3,09% (2 kali lipat LPP nasional 1,49%; LPP sumbar 1,34%)	Konsolidasi program keluarga Berencana	Meningkatnya peserta KB aktif	Meningkatnya peserta KB aktif. LPP Menurun kurang dari 3%	Meningkatnya peserta KB aktif. LPP menurun mencapai kurang 2,5 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta Keluarga KB aktif termasuk tinggi di Provinsi Sumbar</li> <li>▪ LPP dalam kategori sedang</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Meningkatnya nilai IPM mencapai rata-rata provinsi Sumatera Barat</b>		69,13 (Urutan 17 dari 19 daerah)	Konsolidasi pembangunan sosial	Meningkat (satu tingkat)	Menengah (meningkat 2 tingkat mendekati rata-rata Sumatera Barat)	Menengah (Rata-rata Sumatera Barat)	Pada rata-rata Sumatera Barat
	2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif dan preventif.	Angka harapan hidup	66 tahun (terendah di Sumatera Barat)	Konsolidasi pembangunan kesehatan	Peningkatan program pembangunan kesehatan	Peningkatan program pembangunan kesehatan	Meningkat (mendekati rata-rata Sumatera Barat)	Mendekati rata-rata Sumatera Barat
	3. Meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA.	Rata-rata lama sekolah	7,77 tahun (urutan ke 8 dari 12 kabupaten)	Meningkat	Meningkat (satu tingkat)	Menengah (meningkat 2 tingkat mendekati rata-rata Sumatera Barat)	Menengah (rata-rata Sumatera Barat)	Pada rata-rata Sumatera Barat
	4. Memeratakan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan.	Meratanya akses sarana pendidikan	Masih ada 5 kecamatan tanpa sarana SMA dan akses yang jauh untuk sarana lainnya.	Pembangunan di kecamatan prioritas	Pembangunan di 1-2 kecamatan prioritas	Pembangunan di 1-2 kecamatan prioritas	Pembangunan di 1-2 kecamatan prioritas	Tersedianya sarana pendidikan menengah dalam radius akses pelajar di tiap kecamatan.
	5. Meningkatkan kualitas sekolah	Standar sekolah	Belum ada sekolah berstandar nasional	Perintisan sekolah	Adanya sekolah berstandar nasional	Meningkatnya jumlah sekolah	Meningkatnya jumlah sekolah	Dominannya jumlah sekolah berstandar nasional
	6. Membebaskan kabupaten dari buta huruf.	Angka melek huruf	96,38% (urutan ke 8 dari 12 kabupaten)	Meningkat	Meningkat 1 tingkat	Meningkat 2 tingkat	100%	Bebas buta huruf
	7. Peningkatan kualitas keluarga	Jumlah keluarga miskin	Keluarga miskin 10,56%	menurun	menurun	menurun	menurun	Jumlah keluarga miskin berkurang dengan signifikan
		Pengeluaran per kapita rata-rata	Urutan 18 di Sumatera Barat	meningkat	Meningkat 1 tingkat	Meningkat 2 tingkat	Menengah (rata-rata Sumatera Barat)	Pada rata-rata Sumatera Barat

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
		penduduk					Barat)	(pencapaian kinerja pengeluaran per kapita bagian dari kinerja misi lain terutama misi ke-2 memanfaatkan sumberdaya alam)
<b>3</b>	<b>Terlayannya pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.</b>							
	8. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.	Pelayanan dasar nagari tertinggal dan terpencil	31 nagari tertinggal dan 16 nagari terpencil	Prioritas program pembangunan nagari tertinggal dan sangat terpencil	Berkurangnya 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Berkurangnya 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Berkurangnya 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Terbebaskannya nagari dari ketertinggalan dan keterpencilan akses pendidikan dan kesehatan dasar
<b>4</b>	<b>Tercapainya Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat</b>							
	9. Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional dengan: – peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya – mengembangkan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan khususnya bidang pertanian dan kesehatan	Kelengkapan sarana prasarana dan sumber daya manusia bidang kesehatan yang berkualitas	Orientasi pelayanan kesehatan penduduk kabupaten sebagian masih keluar kabupaten	Melengkapi sarana prasarana dan sumberdaya kesehatan	Lengkapinya sarana prasarana dan sumberdaya kesehatan	Pelayanan penduduk lokal	Pelayanan lokal dan wilayah sekitar	Kabupaten Dharmasraya menjadi bagian orientasi pelayanan kesehatan wilayah tenggara Sumatera Barat dan sekitarnya.
		Pelayanan pendidikan tinggi dan kejuruan untuk wilayah sekitar	Pelayanan lokal	Perintisan pendidikan tinggi	Berkembangnya pendidikan tinggi	Berkembangnya pendidikan tinggi dan menengah pelayanan wilayah	Berkembangnya pendidikan tinggi dan menengah pelayanan wilayah	Kabupaten Dharmasraya menjadi bagian orientasi pendidikan wilayah tenggara Sumatera Barat dan sekitarnya.
<b>5</b>	<b>Peningkatan produksi dan produktifitas padi sawah untuk memantapkan peran Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung ketahanan pangan</b>							
	10. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif produksi bagi petani.	Pengendalian alih fungsi lahan sawah ke fungsi lain	Kecenderungan adanya alih fungsi lahan	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Bertahannya luas sawah eksisting

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	11. Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari seluas 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang.	Luas sawah Produktifitas sawah	Luas sawah 9.278 Ha (D.I. Batanghari 5.782 Ha dan lainnya 3.500 Ha). Produksi 50.713 Ha dengan produktifitas rata-rata 4,9 ton/Ha.	Penambahan luas sawah D.I. Batanghari 1.715 Ha dan peningkatan luas dan pengairan irigasi lainnya	Penambahan luas sawah D.I. Batanghari 1.715 Ha dan peningkatan luas dan pengairan irigasi lainnya	Penambahan luas sawah D.I. Batanghari dan peningkatan luas dan pengairan irigasi lainnya	Penambahan luas sawah D.I. Batanghari dan peningkatan luas dan pengairan irigasi lainnya	Bertambahnya luas sawah 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang. Produktifitas meningkat menjadi 5,2 ton/ha. Produksi mencapai 74.270 ton (meningkat 146%).
	12. Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.							
<b>6</b>	<b>Berkembangnya klaster agribisnis hortikultura berdaya saing tinggi</b>							
	13. Mengembangkan agribisnis hortikultura buah-buahan khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster	Produksi dan klaster	Belum berkembang	Studi kelayakan	Penjajakan dan persiapan pengembangan	Pengembangan produksi	Pengembangan agribisnis	Berkembangnya klaster. agribisnis hortikultura
<b>7</b>	<b>Berkembangnya kawasan minapolitan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra perikanan darat pada wilayah Sumatera Barat bagian tenggara</b>							
	14. Meningkatkan produksi perikanan sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi wilayah Sumatera Barat bagian tenggara (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya) mencapai lebih 300%.	Produksi bertambah 3 kali lipat	Produksi perikanan budidaya 1.555 ton	Studi kelayakan	Penjajakan dan persiapan pengembangan	Pengembangan produksi	Pengembangan agribisnis	Berkembangnya agribisnis kawasan minapolitan dengan produksi lebih 4.650 ton.
	15. Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan	Ketersediaan sarana prasarana pendukung	Sebagian sarana telah tersedia	Studi kelayakan	Peningkatan	Peningkatan dan pembangunan	Peningkatan dan pembangunan	Berkembangnya prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan (balai benih, balai penelitian, pasar minapolitan).

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
8	<b>Berkembangnya usaha perkebunan rakyat yang maju dan mandiri</b>							
16.	Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan (karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao)	Produksi dan produktifitas	Produktifitas belum optimal. Masih tersedia lahan pengembangan.	Meningkatkan produktifitas dan ekstensifikasi lahan	Meningkatkan produktifitas dan ekstensifikasi lahan	Meningkatkan produktifitas dan ekstensifikasi lahan	Meningkatkan produktifitas	Produksi meningkat. Produktifitas sesuai standar nasional.
17.	Peremajaan tanaman perkebunan sawit dan karet.	Berkembangnya industri pengolahan olahan kayu peremajaan karet	Belum berkembang	Perintisan	Penjajakan dan persiapan Pengembangan	Pengembangan	Pengembangan	Terdapat industri pengolahan kayu karet untuk lebih kurang 316.800 m3/tahun
18.	Membangun pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas PKS 150 ton/jam.	Kapasitas pabrik pengolahan sawit	Kapasitas 290 ton/jam	Perintisan	Pembangunan pabrik kapasitas 30 ton/jam	Lanjutan pembangunan pabrik	Lanjutan pembangunan pabrik	Tersedianya pabrik kelapa sawit dengan kapasitas mencapai 440 ton/jam
19.	Membangun pabrik pengolahan industri hilir untuk pasar Sumatera Barat dan wilayah sekitar.	Terbangunnya pabrik	Belum terbangun	Perintisan	Penjajakan	Pembangunan pabrik hilir	Peningkatan produksi	Tersedianya pabrik pengolahan hilir makanan dari sawit (seperti minyak goreng)
20.	Mengembangkan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan pengolahan lebih lanjut produk karet.	Pengolahan karet oleh petani	Belum berkembangnya pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani	Perintisan/pilot project	Sosialisasi dan pemberdayaan	Berkembang	Meningkat	Berkembangnya pengolahan karet ditingkat petani.
21.	Mengembangkan komoditi potensial perkebunan lainnya seperti kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi wilayah.	Produksi komoditi lain (seperti kopi dan kakao)	Luas kopi: 459 Ha, produktif 423 Ha. Luas kakao: 1.693 Ha, produktif 652 Ha	Peningkatan produksi dan produktifitas	Peningkatan produksi dan produktifitas	Pengembangan pengolahan hasil.	Berkembangnya Pengolahan hasil produksi.	Berkembangnya produksi dan pengolahan hasil komoditi perkebunan lain (kopi dan kakao).
22.	Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao).	Perkembangan industri pengolahan skala mikro dan kecil	Belum banyak berkembang	Perintisan	Stimulasi dan pemberdayaan	Berkembang	Peningkatan	Berkembangnya industri rakyat dalam pengolahan hasil perkebunan (sawit, karet, kopi dan kakao).
23.	Mengembangkan pasar lelang agro hasil perkebunan.	Perkembangan pasar lelang agro hasil perkebunan	Sudah terbangun fisik pasar agro untuk komoditi sawit	Pembangunan pasar	Pemantapan kelembagaan pasar	Peningkatan kapasitas pasar	Peningkatan kapasitas pasar	Berkembangnya kegiatan pasar agro hasil perkebunan yang menguntungkan petani.

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	24. Membangun pola investasi usaha budidaya perkebunan dan industri yang mendorong kemandirian petani dengan melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah.	pelibatan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah	Pola investasi yang memberi manfaat sosial besar masih belum terbentuk	Perintisan	Studi alternatif pola investasi	Penerapan pola	Penerapan pola	Berkembangnya pola investasi yang memberi manfaat sosial yang besar.
	25. Meningkatkan akses menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.	Penambahan biaya akibat kurangnya akses jalan perkebunan	Harga jual hasil perkebunan ditingkat petani rendah karena akses yang buruk	Peningkatan akses jalan	Peningkatan harga akibat Peningkatan akses jalan	Peningkatan harga akibat Peningkatan akses jalan	Peningkatan harga akibat Peningkatan akses jalan	Tidak terdapat masalah harga jual akibat akses jalan area perkebunan.
<b>9</b>	<b>Berkembangnya budidaya sapi potong dengan strategi utama pengembangan integrasi kelapa sawit - sapi potong.</b>							
	26. Memberdayakan petani peternak dalam budidaya sapi potong.	Jumlah sapi bertambah minimal 2 kali lipat	Jumlah sapi potong 25.773 ekor	Perintisan	Sosialisasi dan pemberdayaan	Peningkatan jumlah sapi setengah dari kondisi awal	Peningkatan jumlah sapi 2 kali lipat kondisi awal	Jumlah sapi mencapai lebih 50.000 ekor.
	27. Mengembangkan dan melengkapi sarana pendukung sentra peternakan (pasar ternak, rumah potong hewan, puskesmas).	Ketersediaan sarana prasarana pendukung	Sudah terdapat pasar ternak, rumah potong hewan.	Pembangunan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana	Terlengkapinya ketersediaan sarana prasarana	Optimalisasi pemanfaatan	Berfungsi optimalnya sarana pendukung sentra peternakan
<b>10</b>	<b>Berkembangnya kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang yang berkelanjutan dan memberi manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat</b>							
	28. Mengorientasikan kegiatan pertambangan yang memberi dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat	Pendapatan pemerintah, nagari dan masyarakat	Belum optimalnya pertambangan yang terorganisir dan terkendali.	Perintisan	Penjajakan dan persiapan peraturan dan alokasi kawasan	Eksplorasi dan kegiatan lanjut	Eksplorasi dan kegiatan lanjut	Pertambangan yang memberi dampak besar bagi Pemda, nagari dan masyarakat
	29. Mengembangkan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan.	Eksploitasi dengan teknologi ramah lingkungan	Penerapan belum optimal	Perintisan	Penerapan (pilot project)	Penerapan	Penerapan	Eksplorasi tambang yang ramah lingkungan
	30. Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang.	Terbangunnya industri	Belum terbangun	Perintisan	Penjajakan investasi	Pembangunan	Pembangunan	Berkembangnya industri pengolahan hasil tambang di Kabupaten.
	31. Melakukan reklamasi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat.	Luas lahan direklamasi	Belum berlangsung	Perintisan	inventarisasi	Kegiatan reklamasi	Kegiatan reklamasi	Reklamasi lahan yang bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat.

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
<b>11</b>	<b>Berkembangnya usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM)</b>							
	32. Percepatan peningkatan produksi dan pasar usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif.	Perkembangan produksi dan pasar industri dan usaha prospektif.	Kecenderungan perkembangan lambat	Studi industri prospektif	Stimulasi perkembangan industri prospektif	Peningkatan	Peningkatan	Berkembangnya industri dan usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif
<b>12</b>	<b>Terjaganya kelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya</b>							
	33. Mengembangkan kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hutan kayu dan non kayu secara lestari bagi penduduk sekitar.	Tutupan vegetasi hutan pada kawasan hutan berfungsi lindung seluas 17.368 Ha (5,74%).	Tutupan hutan dengan vegetasi primer 7.290 Ha.	Reboisasi	Reboisasi dan pemanfaatan hasil hutan	Reboisasi dan pemanfaatan hasil hutan	Reboisasi dan pemanfaatan hasil hutan	Terwujudnya kawasan hutan berfungsi lindung dengan tutupan vegetasi yang dapat dimanfaatkan hasil hutannya secara lestari.
	34. Pengembangan industri hasil hutan.	Berkembangnya produksi dan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu	Masih pada tahap pengembangan awal	Perintisan	Sosialisasi dan pemberdayaan Pengembangan	Pengembangan	Pengembangan	Berkembangnya produksi dan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu pada kawasan hutan
<b>13</b>	<b>Terkendalnya pemanfaatan lahan budidaya sesuai aturan tata ruang</b>							
	35. Menjaga kualitas dan debit air sungai Batanghari	Terjaganya kualitas dan debit sungai Batanghari	Indikasi pencemaran sungai Batanghari	Konsolidasi pengendalian kegiatan pertambangan	Penguatan peraturan dan kelembagaan Pengendalian kegiatan pertambangan	Terkendalnya kegiatan pertambangan	Terkendalnya kegiatan pertambangan	Air sungai Batanghari tidak mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan dan debit terjaga.
	36. Minimalnya kerawanan bencana longsor dan erosi lahan.	Tingkat kerawanan bencana longsor/erosi lahan	Masih adanya kawasan rawan longsor/erosi lahan	Deliniasi kawasan rawan bencana	Terkendalnya perijinan dan pengawasan budidaya sesuai karakteristik lahan	Terkendalnya perijinan dan pengawasan budidaya sesuai karakteristik lahan	Terkendalnya perijinan dan pengawasan budidaya sesuai karakteristik lahan	Minimalnya kerawanan bencana longsor/erosi lahan

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	37. Mengarahkan kegiatan budidaya pertanian dan eksploitasi pertambangan sesuai dengan rencana zonasi/tata ruang.	Kesesuaian dengan rencana zonasi/tata ruang	Masih terdapat eksploitasi tidak sesuai zonasi/tata ruang	Penguatan perangkat perijinan	Penataan zonasi dan pengawasan	Efektifnya pengawasan dan penindakan	Efektifnya pengawasan dan penindakan	Eksplorasi pertambangan sesuai dengan peraturan zonasi/tata ruang
<b>14</b>	<b>Berkembangnya fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari</b>							
	38. Memperkuat fungsi nagari sebagai pelaku kegiatan sosial-budaya.	fungsi sosial-budaya nagari	Fungsi terbatas	Pemberdayaan nagari	Pemberdayaan nagari	Berkembangnya fungsi sosial budaya pada beberapa nagari	Berkembangnya fungsi sosial budaya sebagian besar nagari	Nagari berfungsi sebagai unit sosial-budaya
<b>15</b>	<b>Meningkatnya kemandirian ekonomi terkait pengelolaan usaha, distribusi barang, pengolahan hasil, dan pemasaran</b>							
	39. Mengembangkan fungsi nagari sebagai pelaku sosial-ekonomi.	fungsi sosial ekonomi- nagari	Fungsi terbatas	Pemberdayaan nagari	Pemberdayaan nagari	Berkembangnya fungsi sosial ekonomi pada beberapa nagari	Berkembangnya fungsi sosial ekonomi sebagian besar nagari	Nagari berfungsi sebagai unit sosial-ekonomi
		Jumlah lembaga pengelola kegiatan ekonomi (distribusi, pengolahan, jasa)	Terbatas	Pemberdayaan nagari	Pemberdayaan nagari	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola ekonomi	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola ekonomi	Pengelolaan ekonomi lebih mandiri tidak banyak bergantung kepada pelaku ekonomi luar.
	40. Memberdayakan berbagai lembaga pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.	Peran kelembagaan ekonomi oleh kelompok masyarakat	Terbatas	Pemberdayaan kelompok	Pemberdayaan kelompok	Meningkatnya peran kelompok masyarakat	Meningkatnya peran kelompok masyarakat	Meningkatnya peran kelompok masyarakat dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
<b>16</b>	<b>Tersedianya pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan internal daerah serta menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya</b>							
	41. Revitalisasi pasar-pasar nagari sebagai tempat pemenuhan kebutuhan harian penduduk yang nyaman.	Kelengkapan fisik pasar	Terdapat 28 pasar nagari	Perbaikan dan peningkatan pasar	Perbaikan dan peningkatan 5-10 pasar	Perbaikan dan peningkatan 5-10 pasar	Perbaikan dan peningkatan 5-10 pasar	Tersedianya pasar nagari yang nyaman dan sehat sebagai orientasi penduduk kawasan.

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	42. Pengembangan pasar tematik untuk mendukung fungsi Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Kelengkapan fisik pasar dan kelembagaan	Telah terbangun pasar ternak dan pasar lelang sawit	Pembangunan fisik pasar	Peningkatan fisik dan penataan kelembagaan pemasaran	Pembangunan dan penataan kelembagaan	Pembangunan dan penataan kelembagaan	Berkembangnya pasar pendukung produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menguntungkan petani dan peternak (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan)
	43. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, dan kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.	Orientasi perdagangan regional	Pasar masih bersifat lokal dengan jenis barang sekunder terbatas dan kebutuhan sehari-hari	Perbaikan dan pembangunan pusat perdagangan kabupaten	Perbaikan dan pembangunan pusat perdagangan kabupaten	Perbaikan dan pembangunan pusat perdagangan kabupaten dan pengembangan pusat perdagangan regional baru	Pengembangan pusat perdagangan regional baru	Orientasi perdagangan regional wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat sekitarnya ke pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Dharmasraya.
<b>17</b>	<b>Terpenuhinya sarana prasarana fisik untuk mengentaskan kawasan tertinggal</b>							
	44. Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal	Nagari tertinggal dan terpencil secara fisik	31 nagari tertinggal dan 16 nagari terpencil	Perintisan Pembangunan sarana dan prasarana fisik nagari tertinggal dan sangat terpencil	Pembangunan sarana dan prasarana fisik 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Pembangunan sarana dan prasarana fisik 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Pembangunan sarana dan prasarana fisik 5-10 nagari tertinggal dan sangat terpencil	Terentaskannya nagari tertinggal dan terpencil dalam aspek ketersediaan sarana prasarana.
<b>18</b>	<b>Berkembangnya kawasan dan objek wisata dan rekreasi dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serba guna</b>							
	45. Membangun kawasan terpadu wisata alam-budaya serta taman rekreasi bertema ( <i>theme park</i> ).	Berkembangnya kawasan	Belum ada fokus pengembangan	Identifikasi kawasan	Perencanaan	Pengembangan kawasan	Pengembangan kawasan	Berkembangnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kawasan cagar dan objek budaya.</li> <li>- taman rekreasi bertema.</li> </ul>

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
	46. Mengembangkan objek wisata dan rekreasi kawasan prioritas.	Terpenuhinya kebutuhan rekreasi penduduk	Objek wisata dan rekreasi yang telah ramai dimanfaatkan Batu Bakawik dan Danau Cinta.	Identifikasi kawasan	Pengembangan objek wisata dan rekreasi pada kaw. prioritas	Pengembangan objek wisata dan rekreasi pada kaw. prioritas	Pengembangan objek wisata dan rekreasi pada kaw. prioritas	Berkembangnya Ruang Terbuka Hijau Rekreatif pada setiap klaster kawasan.
	47. Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).	Sarana olahraga multifungsi tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari	Belum tersedia	Perencanaan awal	Pembangunan stadion dan GOR tingkat kabupaten	Pembangunan tingkat kecamatan dan nagari	Pembangunan tingkat kecamatan dan nagari	Tersedianya pelayanan aktifitas olah raga dan sosial masyarakat.
<b>19</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman sesuai dengan standar pelayanan minimal</b>							
	48. Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya).	akses pelayanan listrik	Rasio elektrifikasi 89,89%	Peningkatan	Meningkat lebih 90%	Meningkat mencapai 95%	Meningkat (100%)	Rasio elektrifikasi 100%
	49. Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs.	Pelayanan air minum dan Akses sumber air minum layak.	Proporsi pelayanan air minum perpipaan baru 0,67%. Akses sumber air minum layak: perkotaan 49,18%; perdesaan 55,75%	Meningkat	Meningkat mencapai diatas 1%	Meningkat mencapai 5%	Meningkat mencapai rata-rata Sumbar	Mencapai rata-rata Sumatera Barat 2011 yaitu 15,95%. Mencapai standar MDGs akses air minum layak perkotaan 75,29% dan perdesaan 65,81%.
	50. Terlayannya air bersih perpipaan terutama pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai).	Daerah terlayani	Masih sedikit terlayani	Pelayanan kawasan pusat kegiatan pemerintahan	Meningkatnya pelayanan kawasan pusat pemerintahan	Meningkatnya pelayanan kawasan cepat tumbuh	Meningkatnya pelayanan kawasan cepat tumbuh	Terlayannya air bersih perpipaan terutama pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai)
	51. Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.	Jumlah RT dengan sanitasi layak.	▪ Ketersediaan SPAL tinja tertinggi kedua di kabupaten Sumatera Barat	Meningkatkan pelayanan SPAL tinja	Meningkatnya pelayanan sanitasi perkotaan mencapai lebih	Meningkatnyapelayanan sanitasi perkotaan mencapai lebih 45%	Meningkatnyapelayanan sanitasi perkotaan mencapai standar	Mencapai standar MDGs akses sanitasi perkotaan minimal 76,82% dan perdesaan 55,55%.

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
			(57,42%) tetapi dengan proporsi pembuangan lubang tanah tertinggi di Sumatera Barat (20%). ▪ Sanitasi layak perkotaan 21,76%, perdesaan 57,31%		30%		MDGs	
		Kelengkapan prasarana sanitasi	▪ Belum tersedia IPLT dan IPAL	Perencanaan	Perencanaan dan pembangunan	Pembangunan dan operasionalisasi sarana sanitasi	Pembangunan dan operasionalisasi sarana sanitasi	Tersedianya sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
		Kasus penyakit akibat sanitasi buruk	Penderita diare tercatat 5.021 tahun 2010.	Menurun	Menurunnya kasus penderita	Menurunnya kasus penderita	Jarangnya kasus penderita	Sedikitnya kasus penyakit akibat sanitasi buruk
		Daerah Pelayanan persampahan	Pelayanan terbatas pada beberapa kawasan.	Meningkatnya pelayanan pada kawasan ibukota kabupaten	Meningkatnya pelayanan pada kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatnya pelayanan pada kawasan pusat pertumbuhan selatan	Terlayannya persampahan pusat pertumbuhan kabupaten	Terlayannya persampahan kawasan komersial dan pelayanan umum di wilayah bagian utara dan selatan kabupaten.
	52. Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.	Luas kawasan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni	Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni
<b>20</b>	<b>Tersedianya dukungan prasarana sumber daya air pendukung kegiatan produktif</b>							
	53. Membangun Prasarana Pengairan – pengembangan jaringan irigasi dalam D.I. Batanghari dan D.I. Kabupaten. – Mengembangkan manajemen air irigasi yang handal.	Luas pelayanan irigasi	Luas sawah beririgasi teknis 5.155 Ha (55,56%); setengah teknis 1.421 Ha (15,32%); irigasi lainnya 2.702 Ha	Meningkatnya luas sawah	Meningkatnya luas sawah untuk mencapai target 1.715 Ha.	Meningkatnya luas sawah untuk mencapai target 1.715 Ha dan target jangka panjang.	Meningkatnya luas sawah untuk mencapai target 5.000 Ha	pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan dalam jangka panjang 5.000 Ha.

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
			(29,13%)					
<b>21</b>	<b>Tingginya tingkat keterjangkauan (aksesibilitas) antar kawasan di daerah</b>							
	54. Membangun jaringan transportasi antar kawasan. – Mengembangkan akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan dan kawasan pertanian. – Membangun prasarana terminal pada pusat perdagangan. – Mengembangkan moda transportasi sungai Batanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya. – mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara dan sungai.	Terbentuknya struktur jaringan transportasi	Masih perlu dibentuknya struktur jaringan transportasi sesuai dengan rencana tata ruang	Konsolidasi struktur jaringan jalan kabupaten	Meningkatnya pembangunan jaringan transportasi penghubung antar kawasan	Meningkatnya pembangunan jaringan transportasi penghubung antar kawasan	Meningkatnya pembangunan jaringan transportasi penghubung antar kawasan	Terbangunnya: – akses jalan lingkar utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya serta ruas jalan lingkar Sungai Batanghari – akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan. – Akses dari dan menuju kawasan pertanian. – prasarana terminal pada pusat perdagangan. – moda transportasi sungai Batanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya.  mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara dan sungai.
<b>22</b>	<b>Terjalannya konektivitas wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten sekitarnya dan dengan pusat kegiatan ekonomi koridor Pulau Sumatera</b>							
	55. Membangun jaringan transportasi antar wilayah untuk akses ekonomi menuju koridor timur Pulau Sumatera dan kabupaten berbatasan.	Keterkaitan akses	Belum terbentuknya struktur jaringan jalan menghubungkan kabupaten berbatasan dan kawasan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera.	Perintisan pembangunan jaringan jalan	Pembangunan jaringan jalan lingkar dan akses menuju kabupaten berbatasan	Pembangunan jaringan jalan lingkar dan akses menuju kabupaten berbatasan	Pembangunan jaringan jalan lingkar dan akses menuju kabupaten berbatasan	– Akses menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
								<p>lumbung energi (batu bara).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mengembangkan akses jalan lingkar utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mengurangi beban jalan Lintas Sumatera.</li> <li>– Mengembangkan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan (Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo)</li> </ul>
<b>23</b>	<b>Tetap berperannya adat dan tradisi serta lestariannya identitas daerah</b>							
	56. Memperkuat peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan peri kehidupan masyarakat.	<p>Kasus sengketa tanah ulayat</p> <p>Berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial</p>	<p>Kecenderungan bergesernya pengelolaan tanah ulayat dan potensi konfliknya dimasa depan dan berkurangnya peran fungsional rumah gadang dan ninik mamak.</p>	Penguatan kelembagaan dan regulasi	Penguatan kelembagaan dan regulasi	Berkurangnya kasus sengketa tanah ulayat dan berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial	Berkurangnya kasus sengketa tanah ulayat dan berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial	<p>Berperannya norma dan kelembagaan adat dalam pengeloaan tanah ulayat dan adat</p> <p>Berfungsinya rumah gadang sebagai pusat organisasi sosial</p>
	57. Melestarikan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata.	Pelestarian kawasan dan situs cagar budaya		Perintisan	Penetapan dan studi kawasan dan situs	Pemeliharaan dan Pengembangan kawasan dan situs	Pemeliharaan dan Pengembangan kawasan dan situs	Terwujudnya kawasan cagar budaya dan pelestarian situs budaya.

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
<b>24</b>	<b>Mewujudkan kehidupan yang religius</b>							
	58. Mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari.	Pengembangan kegiatan keagamaan	Program kegiatan masih terbatas	Peningkatan kegiatan dengan target sekolah dan nagari	Peningkatan kegiatan dengan target sekolah dan nagari	Peningkatan kegiatan dengan target sekolah dan nagari	Peningkatan kegiatan dengan target sekolah dan nagari	Berkembangnya kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari
<b>25</b>	<b>Terbangunnya sistem perencanaan prioritas pembangunan daerah yang baku dan konsisten</b>							
	59. Menyusun dan menyelenggarakan standar prosedur dan metoda baku sebagai pedoman penentuan prioritas pembangunan	Perbandingan antara program prioritas diusulkan nagari dan penganggaran	Usulan program prioritas nagari belum baku disaring dalam prosedur penganggaran	Kajian awal	Tersusunnya prosedur dan metoda perencanaan pembangunan	Pelaksanaan secara konsisten	Pelaksanaan secara konsisten	Terpadunya perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan
<b>26</b>	<b>Tersedianya sistem informasi pengelolaan pembangunan daerah daerah yang akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan</b>							
	60. Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari.	Data dan informasi nagari yang akurat dan relevan untuk perencanaan	Basis data dan informasi dinagari masih sangat kurang	Kajian awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya format data dan informasi di nagari</li> <li>- Tersusunnya kelembagaan sistem informasi</li> </ul>	Peningkatan kelengkapan data dan informasi	Peningkatan kelengkapan data dan informasi	Tersedianya informasi pembangunan daerah berbasis nagari yang akurat dan relevan untuk dasar penyelenggaraan pembangunan
	61. Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.	Penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data berbasis teknologi informasi	Data dan informasi belum terkoordinasi pada satu satuan kerja	Kajian awal	Tersedianya infrastruktur sistem informasi	Pemantapan sistem informasi	Pemantapan sistem informasi	Berjalannya sistem informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi
<b>27</b>	<b>Berkembangnya investasi pembangunan berbasis kemandirian daerah</b>							
	62. Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah	Pola investasi yang mendukung kemandirian ekonomi	Pola umum investasi skala besar hanya oleh swasta	Perintisan	Kajian pengembangan pola investasi	Berkembangnya investasi dengan modal daerah/masyarakat	Berkembangnya investasi dengan modal daerah/masyarakat	Berkembangnya pola investasi yang melibatkan berbagai potensi sumber daya daerah/masyarakat.

No	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja Pembangunan (Tahun 2011)	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				Tahap I (2005-2010)	Tahap II (2010-2015)	Tahap III (2015-2020)	Tahap IV (2020-2025)	
28	Terbangunnya mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif							
63.	Mengefektifkan aspek perijinan, pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.	Penyimpangan pemanfaatan ruang	Masih terdapat penyimpangan pemanfaatan ruang	Berkurangnya kasus penyimpangan	Berkurangnya kasus penyimpangan	Berkurangnya kasus penyimpangan	Berkurangnya kasus penyimpangan	Efektifnya aspek pengendalian tata ruang (perijinan, pengawasan dan sanksi).

---

# BAB 6

## INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

### 6.1 Integrasi dan Sinkronisasi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RTRW Tahun 2011-2031

Dokumen rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang terdiri dari RPJPD dan RTRW. Kedua dokumen tersebut perlu diintegrasikan dan disinkronisasikan.

Rumusan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yaitu: *“Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya”*.

Integrasi RPJP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dilakukan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan rencana pengembangan kawasan strategis dalam arah kebijakan pembangunan.

#### a. Perwujudan Struktur Ruang

Perwujudan struktur ruang adalah upaya pengembangan pusat kegiatan perkotaan dan jaringan prasarana wilayah.

Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan

Rencana pengembangan pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya dilakukan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan. Integrasi dan sinkronisasi perwujudan pusat kegiatan perkotaan dalam RTRW Kabupaten dengan RPJP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 54: Arahan Kebijakan Pembangunan dalam RPJP Untuk Mewujudkan Rencana Pusat Kegiatan Perkotaan dalam RTRW**

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJP	Rencana RTRW		
	Rencana Pusat Kegiatan	Fungsi	
<p>(9) Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya</li> <li>– mengembangkan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan khususnya bidang pertanian dan kesehatan.</li> </ul> <p>(23) Mengembangkan pasar lelang agro hasil perkebunan.</p> <p>(41) Revitalisasi pasar-pasar nagari.</p> <p>(42) Pengembangan pasar tematik (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan)</p> <p>(43) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.</p> <p>(47) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).</p> <p>(49) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs.</p> <p>(50) Terlayannya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau</p>	<p>Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Punjung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pertumbuhan wilayah selatan provinsi Sumatera Barat</li> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan kabupaten dan wilayah perbatasan kabupaten.</li> <li>▪ Pusat kegiatan pemerintahan kabupaten</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial (pendidikan dan kesehatan) kabupaten.</li> </ul>	
	<p>Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai Rumbai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan wilayah perbatasan.</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial kawasan selatan kabupaten.</li> </ul>	
	<p>Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koto Baru</li> <li>▪ Sitiung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kabupaten.</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial bagian wilayah kabupaten dan perbatasan</li> </ul>	
	<p>Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Padang Laweh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa promosi bagian wilayah perbatasan kabupaten.</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial promosi bagian wilayah perbatasan kabupaten.</li> </ul>	
	<p>Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sungai Limau</li> <li>▪ Silago</li> <li>▪ Pinang Makmur</li> <li>▪ Koto Salak</li> <li>▪ Tiumang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan sosial kecamatan.</li> <li>▪ Pusat kegiatan administrasi kecamatan.</li> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan kebutuhan harian.</li> </ul>	



## b. Perwujudan Pola Ruang

Perwujudan pola ruang terdiri dari perwujudan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan dalam RPJP Kabupaten dengan rencana peruntukan ruang dalam RTRW Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 55: Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RPJPD untuk Mewujudkan Rencana Peruntukan Ruang Dalam RTRW**

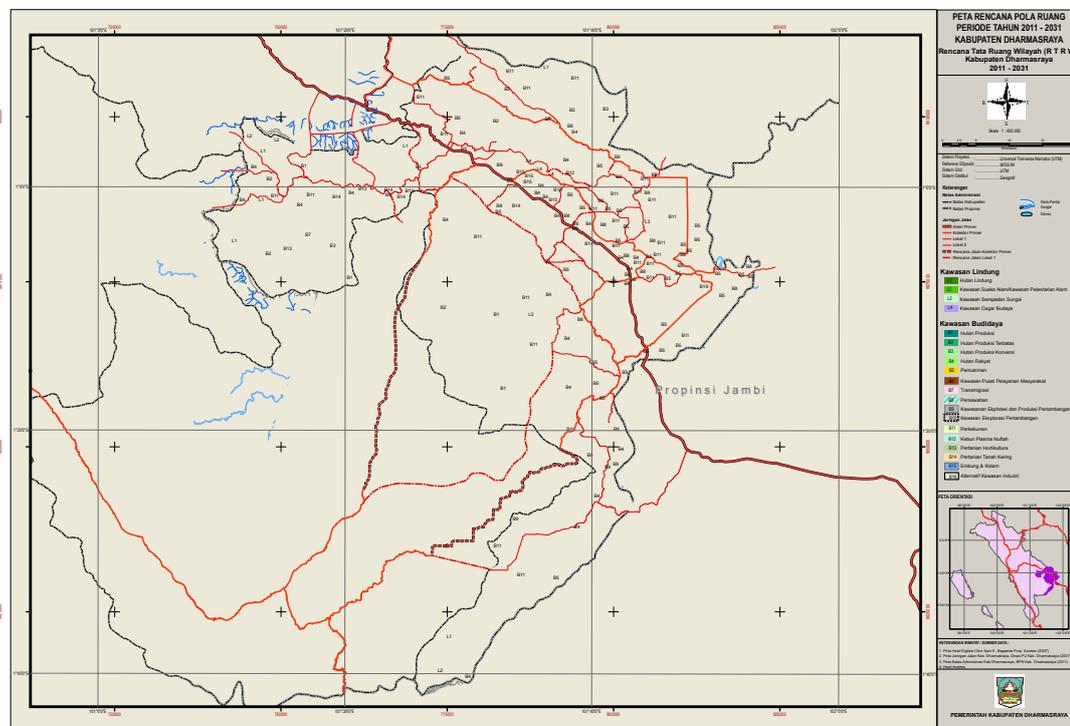
Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJPD	Rencana Peruntukan Ruang Dalam RTRW	Luas (Ha)	
(33) Mengembangkan kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hutan kayu dan non kayu secara lestari bagi penduduk sekitar.	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>22.995</b>	
	- Kawasan Hutan Lindung	11.958	
	- Kawasan Suaka Alam/ Pelestarian Alam	5.410	
(34) Pengembangan industri hasil hutan.	- Kawasan Sempadan Sungai	4.709	
(35) Menjaga kualitas dan debit air sungai Batanghari	- Kawasan Cagar Budaya	918	
(36) Minimalnya kerawanan bencana longsor dan erosi lahan.		<b>279.604</b>	
(37) Mengefektifkan aspek perijinan, pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.	Kawasan Hutan Berfungsi Budidaya		
	- Kawasan Hutan Produksi	26.161	
	- Kawasan Hutan Produksi Konversi	15.568	
	- Kawasan Hutan Produksi Terbatas	31.845	
	- Kawasan Hutan Rakyat	25.239	
	<b>Kawasan Budidaya</b>		
(10) Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif produksi bagi petani. Kebijakan didukung dengan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada area beririgasi teknis.	Kawasan Pertanian Lahan Basah	14.643	
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	5.285	
(11) Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari seluas 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang.			
(12) Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.			
(16) Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao.	Kawasan Perkebunan	138.032	
			(17) Peremajaan tanaman perkebunan sawit dan karet.
			(20) Mengembangkan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan pengolahan lebih lanjut produk karet.

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJPD	Rencana Peruntukan Ruang Dalam RTRW	Luas (Ha)
<p>(21) Mengembangkan komoditi potensial perkebunan lainnya seperti kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi wilayah.</p> <p>(22) Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao).</p> <p>(24) Membangun pola investasi usaha budidaya perkebunan dan industri</p> <p>(25) Meningkatkan akses menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.</p> <p>(26) Memberdayakan petani peternak dalam budidaya sapi potong mencapai minimal 2 kali lipat dari jumlah sapi sekarang (mencapai minimal 50.000 ekor).</p> <p>(27) Mengembangkan dan melengkapi sarana pendukung sentra peternakan (pasar ternak, rumah potong hewan, puskesmas dan sarana lainnya).</p> <p>(62) Membangun pola investasi</p>		
<p>(13) Mengembangkan agribisnis hortikultura buah-buahan khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster.</p>	Kawasan Pertanian Hortikultura, Tanaman Kehutanan, dan Perkebunan	6.685
<p>(28) Mengorientasikan kegiatan pertambangan yang memberi dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat</p>	Kawasan Pertambangan *)	
<p>(29) Mengembangkan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan.</p>	- Kawasan Operasi Produksi	2.388
<p>(31) Melakukan reklamasi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat.</p>	- Alokasi kawasan potensial pengembangan pertambangan	20.917
<p>(62) Membangun pola investasi</p>		
<p>(18) Membangun pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas PKS 150 ton/jam.</p>	Kawasan Industri	500
<p>(19) Membangun pabrik pengolahan industri hilir makanan (minyak goreng) untuk pasar Sumatera Barat dan wilayah sekitar.</p>		
<p>(30) Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang</p>		
<p>(62) Membangun pola investasi.</p>		
<p>(14) Meningkatkan produksi perikanan sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi wilayah Sumatera Barat bagian tenggara (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya) mencapai lebih 300%.</p>	Kawasan Peruntukan Perikanan (embung dan kolam)	134
<p>(15) Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan (balai benih, balai penelitian, pasar minapolitan).</p>		

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJPD	Rencana Peruntukan Ruang Dalam RTRW	Luas (Ha)
(62) Membangun pola investasi		
<p>(9) Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional</p> <p>(43) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.</p> <p>(46) Mengembangkan objek wisata dan rekreasi prioritas kawasan.</p> <p>(47) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).</p> <p>(50) Terlayannya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai).</p> <p>(51) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.</p>	Kawasan Koridor Pusat Kegiatan Masyarakat	526
<p>(45) Membangun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kawasan terpadu wisata alam-budaya serta</li> <li>– taman rekreasi bertema (theme park).</li> </ul> <p>(16) Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao.</p> <p>(62) Membangun pola investasi</p>	Kawasan Kebun Keragaman Hayati	771
<p>(48) Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya).</p> <p>(49) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs.</p> <p>(50) Terlayannya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai).</p> <p>(51) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Meningkatkan jumlah rumah tangga perkotaan dan perdesaan dengan akses sanitasi layak minimal mencapai standar MDGs.</li> <li>– Melengkapi kebutuhan prasarana sanitasi dengan membangun sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).</li> </ul>	<p>Rencana Kawasan Transmigrasi</p> <p>Kawasan Pemukiman</p>	<p>1.312</p> <p>10.515</p>

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJPD	Rencana Peruntukan Ruang Dalam RTRW	Luas (Ha)
<p>– Meningkatkan pelayanan persampahan pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai yang mampu melayani wilayah bagian utara dan selatan kabupaten.</p> <p>(52) Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.</p>		
<b>Luas Kabupaten</b>		<b>302.599</b>

**Gambar 24: Rencana Pola Ruang Kabupaten Dharmasraya**



### c. Perwujudan Kawasan Strategis

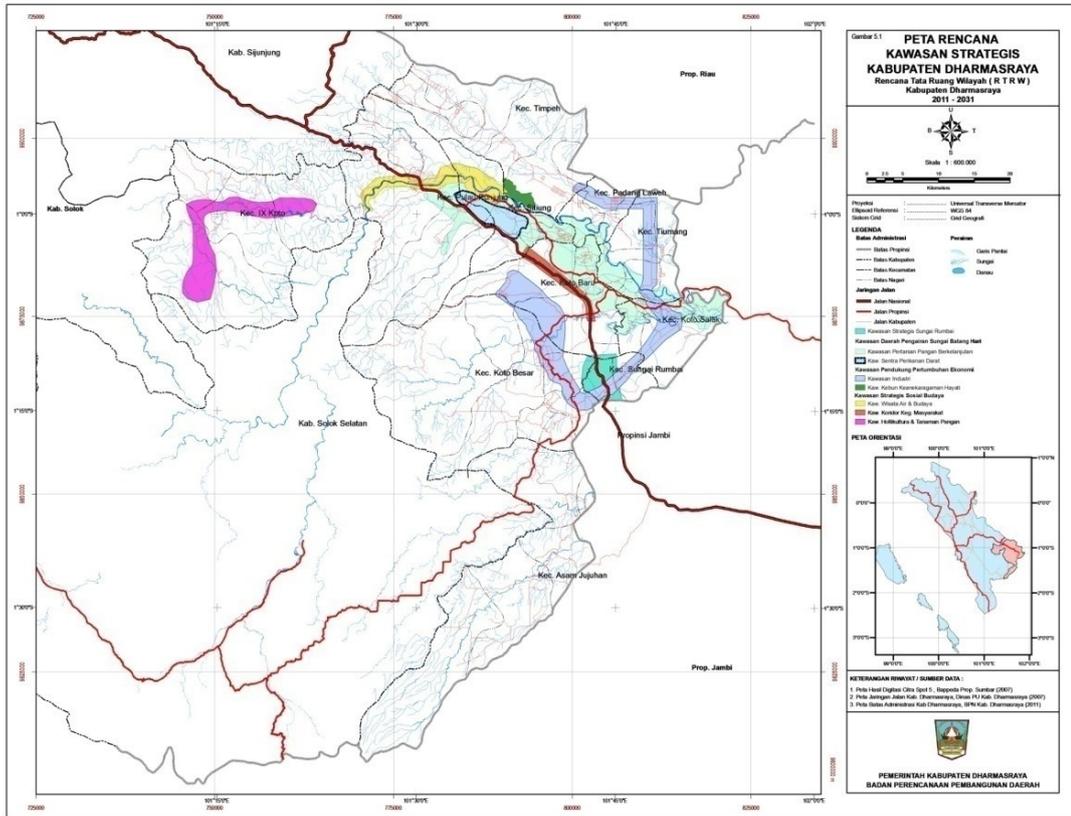
Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan dalam RPJP yang perlu disinkronkan dengan rencana RTRW untuk mewujudkan kawasan strategis dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 56: Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RPJPD untuk Mewujudkan Rencana Kawasan Strategis Dalam RTRW**

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJP	Rencana Kawasan Prioritas
<b>A. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Dharmasraya</b>	
Terkait dengan arah kebijakan pelestarian kawasan hutan (No: 33 - 36) pengendalian tata ruang yang efektif (No: 63)	Kawasan TNKS yang termasuk kedalam wilayah Kabupaten Dharmasraya di Kec. Asam Jujuhan seluas 3.546 Ha
<b>B. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Dharmasraya</b>	
Terkait dengan arah kebijakan menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya (No:41 - 43)	<p>Kawasan Strategis Sungai Rumbai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan penyediaan fasilitas rest area dilengkapi dengan fasilitas informasi tentang Sumatera Barat seperti taman miniatur Sumatera Barat.</li> <li>▪ Pasar komoditi hasil pertanian dari kecamatan sekitar, Kabupaten Kerinci, dan kawasan perbatasan Kabupaten Solok Selatan.</li> <li>▪ Pasar kebutuhan penduduk dan pelayanan jasa Kabupaten Dharmasraya bagian selatan, kawasan perbatasan Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Jujuhan dan Kabupaten Tebo.</li> </ul>
<b>C. Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya</b>	
<b>1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi</b>	
Terkait dengan kebijakan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura pengembangan klaster agribisnis dan bidang perikanan (No: 10 -15). pengendalian tata ruang yang efektif (No: 63).	<p>a. Kawasan Daerah Pengairan Sungai Batanghari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah</li> <li>– Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Darat</li> </ul>
Pengembangan kawasan industri terkait dengan kebijakan pengembangan industri (No: 18,19,30). Pengembangan kawasan kebun keragaman hayati terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan terpadu wisata alam dan budaya serta taman rekreasi bertema (No: 45) serta pendukung bagi peningkatan produk unggulan perkebunan (pengembangan bibit unggul) (No:16). Membangun pola investasi (No:62)	<p>b. Kawasan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kawasan Industri</li> <li>– Kawasan Kebun Keragaman Hayati</li> </ul>
Terkait dengan pengembangan klaster agribisnis hortikultura berdaya saing tinggi (No: 13) Terkait dengan kelestarian kawasan hutan (No: 33-36)	<p>c. Kawasan Hortikultura dan Tanaman Kehutanan</p>
<b>2. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya</b>	
Terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan terpadu wisata alam dan budaya serta taman rekreasi bertema, objek wisata dan rekreasi prioritas kawasan (No: 45,46) Melestarikan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata (No:57) Pengembangan transportasi (No:55)	<p>a. Kawasan wisata air dan budaya</p> <p>Kawasan wisata air Sungai Batanghari dan kawasan budaya yang terdapat di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dikembangkan sebagai produk wisata Kabupaten Dharmasraya yang memadukan wisata alam dengan wisata budaya sebagai magnet wisata sejarah dan</p>

Arah kebijakan pembangunan yang terkait Dalam RPJP	Rencana Kawasan Prioritas
Membangun pola investasi (No:62)	budaya dibagian tengah Pulau Sumatera. Program utama: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.</li> <li>▪ Pengadaan transportasi wisata sungai.</li> <li>▪ Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh</li> <li>▪ Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.</li> <li>▪ Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).</li> <li>▪ Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.</li> </ul>
Terkait dengan mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional (No:9) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial) (No: 47) Membangun pola investasi (No:62)	b. Kawasan Koridor Kegiatan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kawasan kegiatan pendidikan tinggi bidang pertanian dan pendidikan kejuruan.</li> <li>▪ Pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu di Kec. Koto Baru.</li> <li>▪ Pengembangan sarana kesehatan dengan prakarsa swasta masyarakat terutama untuk pelayanan wilayah selatan Kabupaten Dharmasraya.</li> </ul>

**Gambar 25: Rencana Kawasan strategis Kabupaten Dharmasraya**



**6.2 Arah Kebijakan Dalam RPJP Yang Terkait Dengan Pemerataan Pembangunan**

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu nilai yang harus diwujudkan dalam pembangunan. Arah kebijakan yang terkait dengan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 57: Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RPJP untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan**

Arah kebijakan	Wilayah administrasi
(1) Menggalakkan program Keluarga Berencana.	Setiap Jorong
(2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif dan preventif.	Setiap Jorong
(3) Meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA.	
(4) Memeratakan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan.	(setiap jorong untuk SD, Setiap Nagari untuk SMP, setiap Kecamatan untuk SMA)
(5) Meningkatkan kualitas sekolah (dengan mengembangkan berbagai bentuk program seperti	Sekurang-kurangnya terdapat setiap kecamatan 1 sd, 1SMP dan 1SMA

<b>Arah kebijakan</b>	<b>Wilayah administrasi</b>
mengadakan sekolah berstandar nasional pada jenjang SD, SMP dan SMA atau program "full day school")	berstandar nasional dan full day
(6) Membebaskan kabupaten dari buta huruf.	Setiap jorong
(7) Peningkatan kualitas keluarga	Setiap jorong
(8) Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal (44) Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal	Nagari tertinggal dan terpencil
(32) Percepatan peningkatan produksi dan pasar industri dan usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif.	Setiap Nagari
(37) Mengarahkan kegiatan budidaya pertanian dan eksploitasi pertambangan sesuai dengan rencana zonasi/tata ruang.	Setiap Nagari
(39) Memperkuat fungsi nagari sebagai pelaku kegiatan sosial-budaya (40) Memberdayakan berbagai lembaga pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.	Setiap Nagari
(48) Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya). (49) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs	Setiap Nagari
(56) Memperkuat peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan peri kehidupan masyarakat.	Setiap Nagari
(60) Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari. (61) Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.	Setiap Nagari
(62) Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, badan usaha pemerintah, nagari, dan CSR).	Setiap Nagari

---

# BAB 7

## KAJIDAH PELAKSANAAN



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 berisi visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 memberi pedoman dalam memelihara, memupuk, dan pengembangan berbagai modal pembangunan daerah dalam jangka panjang sesuai dengan aspirasi dan visi pembangunan daerah.

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dibagi menjadi 4 tahapan yaitu: Tahap I (Tahun 2005-2010), Tahap II (Tahun 2010-2015), Tahap III (Tahun 2015-2020) dan Tahap IV (Tahun 2020-2025).

---

Tahapan-tahapan tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan setiap periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.
2. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 bersandingan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dalam jangka panjang.

Sebagai dokumen pembangunan jangka panjang, RPJPD berfungsi sebagai pedoman pengambilan kebijakan publik bagi para pengambil keputusan di daerah dan untuk membangun komitmen bagi seluruh pelaku pembangunan. Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya dapat terwujud kalau nilai-nilai pembangunan yang menjadi aspirasi bersama yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, mandiri, adil dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa dapat ditegakkan.

BU

